

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2006-2013**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



**Disusun Oleh:
TARYOKO
12804241057**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2006-2013**

Oleh:

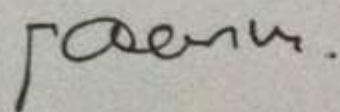
Taryoko

NIM. 12804241057

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Maret 2016

Dosen Pembimbing



Maimun Sholeh, M. Si.

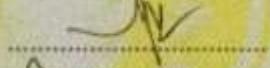
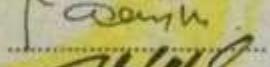
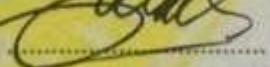
NIP. 19660606 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2006-2013**

Oleh:
TARYOKO
NIM. 12804241057

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada 16 Maret 2016 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

| Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|------------------------|---------------|--|------------|
| Suwarno, M. Pd. | Ketua Penguji |  | 30/03/2016 |
| Maimun Sholeh, M. Si. | Sekretaris |  | 29/03/2016 |
| Aula Ahmad HSF, M. Si. | Penguji Utama |  | 24/03/2016 |

Yogyakarta, 31 Maret 2016

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan



Dr. Sugiharsono, M. Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taryoko

NIM : 12804241057

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2006-2013**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 11 Maret 2016
Yang menyatakan,



Taryoko
NIM. 12804241057

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka.”

(QS Ar Raad: 11)

“Masing-masing dari kita mempunyai mimpi, bangun dan raih mimpi itu atau tetap tidur dan hidup dalam mimpi.”

(Penulis)

“Don’t stop when you are tired, but stop when you are done.”

(NN)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk kalian...

Kedua orang tuaku, Bapa Sastro Sarno dan Mama Kalimah.

Kedua saudaraku, Bang Supriyadi dan Dek Finka Erlina Diasih.

Serta kamu yang selalu menemaniku, Dyah Ayu Anggraeni.

Untuk Indonesia-ku, semoga bermanfaat.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2006-2013**

**Oleh:
TARYOKO
NIM. 12804241057**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2006-2013. Penelitian ini menganalisis 4 variabel independen menggunakan data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari *cross-section* 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *time series* selama 8 tahun. Alat analisis yang digunakan berupa regresi data panel dengan *fixed effect model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PDRB berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 2) Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 3) Jumlah Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 4) Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan 5) Seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kata kunci: kemandirian keuangan daerah, PDRB, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, sumber daya alam

***ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECT FINANCIAL AUTONOMY
OF REGIONAL IN YOGYAKARTA SPECIAL TERRITORY IN THE PERIOD
2006-2013***

**TARYOKO
12804241057**

ABSTRACT

This study aims to analyze factors affecting financial autonomy of regional in Yogyakarta Special Territory in the period 2006-2013. The study analyzed four independent variables using secondary data in the form of panel data with a cross-section in five regencies/cities in Yogyakarta Special Territory and a time series of eight years. The analysis was regression with a fixed effect model. The result of the study showed that: 1) Gross Regional Domestic Product (GRDP) had a positive effect on the financial autonomy of regional, 2) The Population had a positive effect on the financial autonomy of regional, 3) The Employment did not have a significant effect on the financial autonomy of regional, 4) Natural Resources had a positive effect on the financial autonomy of regional, and 5) All of independent variable had an effect on the dependent variable.

Keywords: financial autonomy of regional, GRDP, population, employment, natural resources

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013” ini dengan baik.

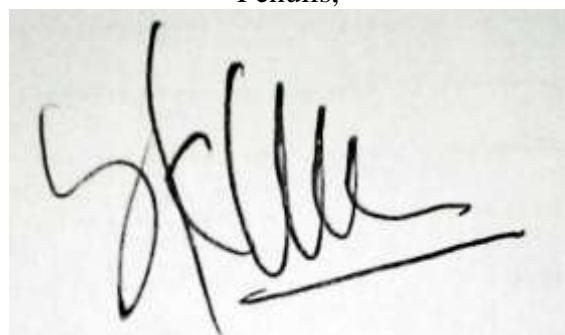
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Sugiharsono, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
2. Tejo Nurseto, M. Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan layanan jurusan Pendidikan Ekonomi.
3. Daru Wahyuni, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses studi.
4. Maimun Sholeh, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang selalu sabar memberikan pembelajaran yang berharga dan bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Aula Ahmad HSF, M. Si., selaku Narasumber yang telah memberikan arahan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Suwarno, M. Pd., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan saran yang lebih baik dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama proses studi.
8. Pak Dating Sudrajat, selaku Admin Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan pelayanan jurusan yang sangat T-O-P.

9. HIMA Pendidikan Ekonomi 2013-2014 dan DPM Fakultas Ekonomi 2015 yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga yang tidak didapatkan di bangku kuliah.
10. Sahabat BSCM, Bang Ali, Berta, Ikhsan, Arip, Fian, Sebo, Kabul, Yulhan, Satrio, Daniel, Tri, Yusron, dan Harno.
11. Enumerator Bank Indonesia, Mbak Heni, Mas Rais, Mbak Riska, Mbak Alfi, Mbak Arum, Mbak Novia, Mbak Ruli, Mbak Hesty, Ayu, Dian, dan Ervin.
12. Tim Generasi Cerdas Keuangan, Mbak Eka, Ilyana, Candra, Desi, Dwi, Maizura, dan Umi.
13. Sahabat “The Canceled” Beswan Djarum 30 UNY, Olla, Rosyid, Andin, dan Novita.
14. Sahabat PENNOMIKA 2012 tanpa terkecuali.
15. Sahabat-sahabatku, Aan, Ucup, Himatul, Retno, Umi Alma, Lintang, Bu Desi, Intan, Santi, Ratna, Fenti, Oliv, dan Ilham.
16. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam studi hingga terselesaiannya Tugas Akhir Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga bantuan dan dukungan baik yang bersifat moral maupun material dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 11 Maret 2016
Penulis,



Taryoko
NIM. 12804241057

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| C. Batasan Masalah | 9 |
| D. Rumusan Masalah..... | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 11 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 11 |
| 2. Manfaat Praktis | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Kajian Teori..... | 12 |
| 1. Laporan Keuangan Pemerintah..... | 12 |
| 2. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 17 |
| 3. Kemandirian Keuangan Daerah | 19 |
| 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Kauangan Daerah ... | 22 |
| B. Penelitian Sebelumnya..... | 28 |
| C. Kerangka Berpikir | 31 |
| D. Hipotesis Penelitian | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Desain Penelitian | 36 |
| B. Definisi Operasional Variabel Penelitian | 36 |
| 1. Variabel Dependen..... | 36 |
| 2. Variabel Independen | 37 |
| C. Data dan Jenis Data | 38 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| E. Teknik Analisis Data | 39 |
| 1. Analisis Regresi Data Panel..... | 39 |
| 2. Uji Spesifikasi Model | 41 |
| 3. Uji Asumsi Klasik..... | 43 |
| 4. Uji Signifikansi | 45 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta | 47 |
| B. Deskripsi Data Penelitian | 55 |
| C. Analisis Data..... | 57 |
| 1. Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel..... | 57 |
| 2. Hasil Uji Asumsi Klasik | 58 |
| 3. Analisis Data Panel..... | 62 |
| D. Hasil Uji Signifikansi | 62 |
| E. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 65 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Keterbatasan Penelitian | 71 |
| C. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN..... | 76 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di DIY tahun 2006-2013 | 5 |
| 2. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | 20 |
| 3. Kriteria Pengujian Durbin Watson | 45 |
| 4. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Daerah di DIY | 48 |
| 5. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu | 53 |
| 6. Klasifikasi Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di DIY | 55 |
| 7. Stastistik Deskriptif | 56 |
| 8. Hasil Uji Chow | 57 |
| 9. Hasil Uji Hausman | 58 |
| 10. Hasil Uji Multikolinearitas | 60 |
| 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas | 61 |
| 12. Hasil Estimasi Model | 62 |
| 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi | 63 |
| 14. Distribusi Persentase PDRB DIY Tahun 2006-2013 | 68 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Bagan Kerangka Berpikir | 34 |
| 2. Peta Daerah Istimewa Yogyakarta | 47 |
| 3. PDRB Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2006-2013 | 51 |
| 4. Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota di DIY 2006-2013..... | 52 |
| 5. Hasil Uji Normalitas..... | 59 |

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan sejak Januari 2001 sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pemberlakuan kebijakan tersebut memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi pengeluaran, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat paling optimal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi dan kebutuhan daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga diharapkan dana yang dibelanjakan lebih mengenai sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Setiap daerah memiliki potensi yang beragam dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Potensi daerah tersebut misalnya

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan juga pembangunan daerah. Kemampuan mengenali potensi daerah yang beragam ini tidak dapat ditangani sendiri oleh salah satu pihak saja (pemerintah pusat). Kewenangan fiskal pemerintah daerah inilah yang menjadikan daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Hal ini memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang merupakan kekayaan daerah milikinya menjadi semakin lebar.

Suprapto (2006) menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangan secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Keberhasilan pengelolaan potensi daerah tersebut dapat diukur dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang

bersangkutan. Halacmi (2005) dalam Darmanto (2012) menyataan bahwa salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mencapai pemerintahan yang baik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan sektor publik menjalankan tugasnya dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah daerah ini merupakan ujung dari tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal yang menyebabkan

keterbatasan penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan pemerintah daerah, antara lain: (1)Penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial. (2)Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget*, yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Penyusunan dengan pendekatan *incremental* tersebut, sering kali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD. Misalkan adanya prinsip “yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikkan itu diperlukan biaya yang tidak efisien”. Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, APBD seharusnya disusun dengan pendekatan kinerja (*performance budget*). (3)Penelitian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBDnya.

Meskipun penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan pemerintah daerah masih sangat terbatas, namun hasil analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah daerah, selanjutnya dapat digunakan untuk tolak ukur dalam: (1)Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membangun penyelenggaraan otonomi daerah. (2)Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. (3)Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan

pendapatan daerahnya. (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. (5) Melihat pertumbuhan atau perkiraan perolehan pendapatan dan pengelolaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pendapatan daerah (Aula, 2013). Melalui analisis rasio kemandirian daerah ini, dapat diketahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Berikut ini disajikan rasio kemandirian keuangan daerah di DIY tahun 2006-2013.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di DIY tahun 2006-2013

| Kabupaten/Kota | Rerata Kemandirian Keuangan Daerah | Kriteria |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Bantul | 9,81% | Rendah Sekali |
| Gunung Kidul | 5,57% | Rendah Sekali |
| Kulon Progo | 7,68% | Rendah Sekali |
| Sleman | 16,62% | Rendah Sekali |
| Yogyakarta | 22,69% | Rendah Sekali |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas, kemandirian keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2013 termasuk dalam kriteria rendah sekali karena nilai kemandirian keuangan daerahnya kurang dari 25%. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus. Kriteria rendah sekali ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah pula. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2014) menunjukkan bahwa PDRB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Saragih (2003) dalam Putri (2014) mengatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau PDRB. Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah.

Winarna (2010) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah. Sedangkan Darmanto (2012) yang melakukan penelitian pada pemerintah daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Steven dan McGowen (1983) menyatakan bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun penelitian lainnya menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa Jumlah Penduduk (Patriati dan Winarna, 2010), PDRB (Winarna, 2010) dan Jumlah Tenaga Kerja (Darmanto, 2012) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2014) menunjukkan bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan

Daerah. Sumber Daya Alam yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari sumber daya alam masing-masing daerah, tentunya mengindikasikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah yang telah dilakukan oleh Putri (2014), Darmanto (2012), Steven dan McGowen (1983), Patriati dan Winarna (2010) serta Jolianis (2014) di atas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Pertama, pada penelitian Putri (2014) terbukti bahwa PDRB berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan pada penelitian Winarna (2010) variabel PDRB terbukti tidak berpengaruh. Kedua, Jumlah Penduduk pada penelitian Darmanto (2012) menunjukkan adanya pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun pada penelitian Patriati dan Winarna (2010) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Ketiga, Jolianis (2014) mengungkapkan bahwa Sumber Daya Alam yang dimiliki setiap daerah turut mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Perbedaan lain penelitian ini terletak pada tempat penelitian, yaitu kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rentang waktu antara tahun 2006 sampai 2013.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pengujian kembali faktor-faktor yang

mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah ini dilakukan guna mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah. Faktor-faktor yang diuji kembali dalam penelitian ini, yaitu PDRB sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dan Winarna (2010), Jumlah Penduduk sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Darmanto (2012), variabel Jumlah Tenaga Kerja seperti penelitian yang dilakukan oleh Steven dan McGowen (1983) dan Sumber Daya Alam pada penelitian Jolianis (2014). Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut.

1. Setiap daerah memiliki potensi yang beragam dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
2. Kemampuan mengenali potensi daerah yang beragam ini tidak dapat ditangani sendiri oleh salah satu pihak saja (pemerintah pusat).
3. Perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah menjadikan pemerintah daerah berusaha untuk memanfaatkan keunggulan potensi yang dimiliki daerahnya.
4. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan perlu adanya pengukuran kinerja

keuangan pemerintah daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan sektor publik.

5. Adanya tuntutan terhadap kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
6. Perlu adanya identifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, sehingga langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah.
7. Identifikasi faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yang telah dilakukan sebelumnya masih terdapat beberapa perbedaan hasil.
8. Kemandirian keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kriteria rendah sekali.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi batasan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti agar penelitian lebih fokus. Penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan data seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2006-2013. Penelitian dilakukan terutama untuk menganalisis variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.

1. Apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang dicapai, yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui apakah Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Mengetahui apakah Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Mengetahui apakah PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis berkaitan dengan ekonomi regional, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah ekonomi regional mengenai Kemandirian Keuangan Daerah.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bagian informasi sekaligus sumbangan pemikiran terhadap arah kebijakan yang akan dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, khususnya terkait peningkatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, ralisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- 2) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 3) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 4) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 5) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 6) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 7) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

2. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

Sebagaimana diketahui bahwa pada awal tahun, Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun dan sumber pembiayaan kegiatan tersebut.

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan daerah. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah posisi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan beberapa metode analisis yang lazim digunakan untuk menganalisis terhadap laporan keuangan. Suprapto (2006) menyebutkan salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Suyono (2010) mengatakan bahwa untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu organisasi atau badan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari organisasi atau badan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan, salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan yang

dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi atau badan yang selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu.

3. Kemandirian Keuangan Daerah

a. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Halim (2001) mengemukakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik menggunakan sumber daya keuangan yang digali dari potensi daerahnya sendiri.

b. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang

berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat dan propinsi semakin rendah. Formula yang digunakan untuk menentukan tingkat kemandirian daerah, yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, sebagai berikut (Halim, 2001).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan rasio Kemandirian Keuangan Daerah beserta interpretasinya.

Tabel 2. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

| Rasio Kemandirian Daerah | Kriteria |
|---------------------------------|-----------------|
| 00,00% - 25,00% | Rendah Sekali |
| 25,01% - 50,00% | Rendah |
| 50,01% - 75,00% | Sedang |
| 75,01% - 100,00% | Tinggi |

Sumber: Halim (2001)

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Selain itu, rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

c. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan ideal apabila sumber pendapatan asli daerah menyumbang bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber lainnya. Namun dalam kenyataannya di banyak daerah, pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran, proporsinya terhadap pendapatan selain dari pendapatan asli daerah merupakan indikasi derajat Kemandirian Keuangan Daerah. Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) pola hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas empat macam, antara lain:

- 1) Pola hubungan instuktif, peranan pemerintah pusat lenih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Laju pertumbuhan PDRB disumbang oleh sembilan faktor, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu, atau

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi. (BPS, 2015)

Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Metode tak langsung biasa digunakan jika data yang diperlukan untuk menghitung PDRB tidak tersedia.

Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil (tidak ada pengaruh harga). Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu: revaluasi, ekstrapolasi, deflasi dan deflasi berganda. Menurut BPS, kegunaan PDRB dan PDRB per kapita adalah:

- 1) PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

- 2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, setiap sektor atau komponen penggunaan dari tahun ke tahun.
- 3) PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- 4) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Tingkat PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi. Putri (2014) melakukan pengujian terkait pengaruh PDRB terhadap kemandirian daerah. Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tinggi.

b. Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk yang berada pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Darmanto (2012) menyatakan bahwa salah satu indikator yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, yaitu pemerintah daerah yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

Jumlah populasi penduduk yang menempati daerah juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar Jumlah Penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah Penduduk mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak Jumlah Penduduk maka semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik.

c. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi dan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika tenaga kerja terlibat dalam proses produksi, tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya, yakni upah. Menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, seperti:

- 1) Pekerjaan tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya.
- 2) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.

3) Orang-orang yang bekerja dibidang keahlian seperti dokter atau tukang.

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas di samping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja

Menurut Winarna (2010) Jumlah Tenaga Kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, pengagas dan pelaksana di suatu daerah, sehingga sumber daya ini dapat menentukan maju atau mundurnya daerah yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Steven dan McGowen (1983) menyatakan bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin besar tingkat Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki oleh suatu daerah, maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan pemerintah daerah yang tinggi inilah yang akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

d. Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam berpotensi memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara dan daerah. Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah yang dapat dinilai secara ekonomi dapat dilihat dari besaran pendapatan sektor alam terhadap PDRB, antara lain sektor pertanian dan sektor penggalian dan pertambangan.

1) Sektor pertanian

Sektor pertanian mencakup pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Sektor pertanian mencakup subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Subsektor tanaman bahan makanan meliputi seluruh kegiatan yang menghasilkan komoditas bahan makanan. Subsektor tanaman perkebunan meliputi semua kegiatan yang menghasilkan komoditas tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun perusahaan perkebunan. Subsektor peternakan dan hasil-hasilnya meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh usaha peternakan. Subsektor kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk disini kegiatan perburuan. Subsektor perikanan

mencakup kegiatan penangkapan, pemberian, budidaya segala jenis ikan dan biota ikan lainnya, baik yang berada di air tawar maupun air asin.

2) Sektor pertambangan dan penggalian

Kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, cair maupun gas. Sifat dan tujuan kegiatan tersebut yaitu menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual, atau diproses lebih lanjut. Seluruh jenis komoditas dalam sektor pertambangan dan penggalian dapat dikelompokkan ke dalam tiga subsektor, yaitu pertambangan migas, pertambangan non migas dan penggalian.

Output dari kegiatan penggalian diperoleh berdasarkan hasil perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit barang tersebut. Biaya antara diperoleh dengan mengalikan rasio biaya antara dan output. Perhitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan menggunakan metode revaluasi.

B. Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Selain itu, juga untuk mengetahui persamaan dan

perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya, sekaligus sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Beberapa penelitian yang dikaji, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Habib Candra Darmanto (2012) dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh *Population, Employment, Size, dan Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk (*population*), Jumlah Tenaga Kerja (*employment*), ukuran (*size*) pemerintah daerah, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sampel penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling method* berjumlah 704 laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2008-2010. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis data regresi berganda (*multiple regression*) menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (*population*) dan *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan variabel Jumlah Tenaga Kerja (*employment*) dan ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Steven dan McGowen (1983) telah melakukan penelitian terkait indikator keuangan dan tren keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan tiga buah variabel yang terdiri dari variabel pendapatan dan pengeluaran, variabel pajak dan *real estate*, dan variabel *composite* yang terbagi menjadi *debt to srevenue*, *grant to revenue ratio*, serta *grant to expenditure ratio*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti Jumlah Penduduk dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ratri Patriati (2010) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”. Penelitian ini menguji pengaruh *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population*, dan *tourist* sebagai variabel independen, terhadap kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang diprosikan dengan *faktor score* dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan sampel penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling method*. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis data regresi berganda (*multiple regression*) pada sample yang berjumlah 70 pemerintah daerah menunjukkan bahwa *revenue* dan *expenditure* merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jaka Winarna (2010) dalam *Journal of Rural and Development* yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”. Penelitian pada pemerintah di Jawa Tengah ini menguji pengaruh variabel *revenue*, *expenditure*, *real estate*,

taxes, grant, population tourist, gross domestic product, dan employment terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan tiga rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Sampel penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling method* berjumlah 70 laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2005-2007. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis data regresi berganda (*multiple regression*) menunjukkan bahwa variabel *revenue* dan *expenditure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

C. Kerangka Berpikir

Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Hasil penelitian yang baik terwujud dari kerangka yang sistematis dan saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakilkan oleh rasio kemandirian dengan menggunakan empat variabel bebas, yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam.

1. Pengaruh PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Tingkat PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi.

Putri (2014) melakukan pengujian terkait pengaruh PDRB terhadap kemandirian daerah. Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tinggi.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk yang berada pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Darmanto (2012) menyatakan bahwa salah satu indikator yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, yaitu pemerintah daerah yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Jumlah populasi penduduk yang menempati daerah juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar Jumlah Penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah Penduduk mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak Jumlah Penduduk maka semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik.

3. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

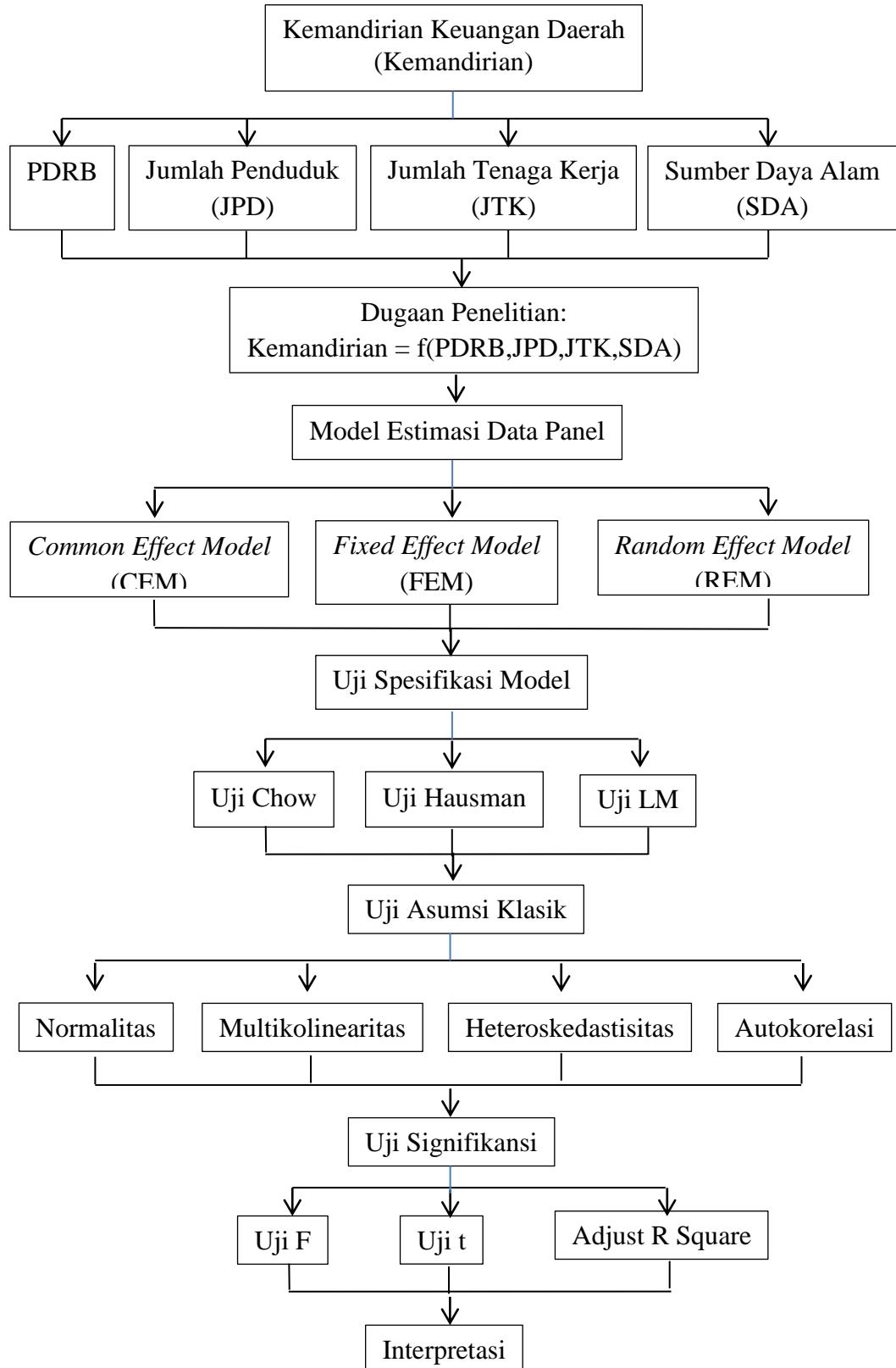
Penelitian yang dilakukan oleh Steven dan McGowen (1983) menyatakan bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin besar tingkat Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki oleh suatu daerah, maka akan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan pemerintah daerah yang tinggi inilah yang akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

4. Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2014) menunjukkan bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah. Sumber Daya Alam yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari Sumber Daya Alam masing-masing daerah, tentunya mengindikasikan bahwa Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh suatu daerah mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

Kerangka pemikiran model penelitian dan hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Penelitian

Arikunto (2010) mengemukakan bahwa hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Adapun hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sumber Daya Alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan lima variabel penelitian yang terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen, yaitu sebagai berikut.

1. Variabel Dependental

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel independen. Pada penelitian ini menempatkan Kemandirian Keuangan Daerah yang digambarkan dengan rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Formula yang digunakan, sebagai berikut (Halim, 2001).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Penelitian ini menetapkan empat variabel independen (bebas), yaitu sebagai berikut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk yang berada pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengacu pada Jumlah Penduduk hasil proyeksi berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, sensus penduduk tahun 2010 dan hasil proyeksi berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja dalam penelitian ini merupakan jumlah orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jumlah jam kerja mereka.

d. Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah yang dapat dinilai secara ekonomi dapat dilihat dari besaran pendapatan sektor alam terhadap PDRB, antara lain sektor pertanian dan sektor penggalian dan pertambangan.

C. Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu penggabungan dari data silang tempat (*cross section*) dan data deret waktu (*time series*) dari tahun 2006-2013.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006-2013
2. PDRB atas dasar harga konstan 2000 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006-2013
3. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2006-2009

4. Jumlah Penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2013
6. Jumlah Tenaga Kerja di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2006-2013

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2010) teknik dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel (*pooled data*) merupakan data yang mengkombinasikan antara data deret waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Data deret waktu (*time series*) adalah data observasi pada satu subjek penelitian diamati dalam satu periode waktu, misalnya selama sembilan tahun. Sedangkan data kerat lintang (*cross section*) adalah data observasi pada beberapa subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun. Dalam data panel,

observasi dilakukan pada beberapa subjek dianalisis dari waktu ke waktu. Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

di mana N adalah banyaknya data *cross section*. Sedangkan persamaan model dengan *time series* dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, 3, \dots, T$$

di mana T adalah banyaknya data *time series*. Sehingga persamaan data panel merupakan pengkombinasi dari persamaan *cross section* dan *time series* dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} ; i = 1, 2, 3, \dots, N ; t = 1, 2, 3, \dots, T$$

di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah banyaknya data panel.

Oleh karena itu, variabel-variabel dalam penelitian ini diaplikasikan dalam sebuah model, sebagai berikut.

$$\text{KEMANDIRIAN}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB}_{it} + \beta_2 \text{JPD}_{it} + \beta_3 \text{JTK}_{it} + \beta_4 \text{SDA}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

| | |
|---------------|-------------------------------|
| KEMANDIRIAN | = Kemandirian Keuangan Daerah |
| PDRB | = PDRB |
| JPD | = Jumlah Penduduk |
| JTK | = Jumlah Tenaga Kerja |
| SDA | = Sumber Daya Alam |
| ε | = Error Term |

i menunjukkan subjek ke-i, sedangkan t menunjukkan tahun ke-t

Beberapa kelebihan data panel menurut Gujarati (2013), antara lain:

- a. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas dalam setiap unit secara eksplisit dengan memberikan variabel spesifik subjek.
- b. Penggabungan observasi *time series* dan *cross section* memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antarvariabel, lebih banyak *degree of freedom* dan lebih efisien.
- c. Dengan mempelajari observasi *cross section* berulang-ulang, data panel sangat cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.
- d. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data *time series* murni atau *cross section* murni.

Model yang dapat digunakan dalam regresi data panel ada empat model, antara lain: model OLS *pooled*, model *fixed effects least square dummy variabel* (LSDV), model *fixed effects within-group* dan model *random effect* (Gujarati, 2013). Pemilihan model yang akan dipakai dalam penelitian diseleksi dengan uji spesifikasi model yang terdiri atas dua uji spesifikasi, yaitu efek tetap (*fixed effects*) atau efek random (*random effect*).

2. Uji Spesifikasi Model

a. Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow

Uji spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan.

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *common effect* yang sebaiknya dipakai.

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).

b. Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Pada *fixed effect model* (FEM), setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan *time-invariant*. Sedangkan pada *random effect model* (REM), intersep (bersama) mewakilkan nilai rata-rata dari semua intersep (*cross section*) dan komponen mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati, 2013). Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Jika H_0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai *fixed effect model* (FEM). Karena *random effect model* (REM) kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas. Sebaliknya, apabila H_a ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai adalah *random effect model* (REM).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residualnya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan *Jarque-Bera Test* di mana variabel tersebut dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Apabila variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel tidak ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan tetap, maka kondisi ini disebut homoskedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heteroskedastis. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastis. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastis adalah dengan me-regress model dengan log residi kuadrat sebagai variabel terikat.

H_0 : Homoskedastis

H_a : Heteroskedastis

Apabila probabilitas dari masing-masing variabel bebas $> 0,05$ maka terjadi penerimaan terhadap H_0 . Sehingga tidak terdapat heteroskedastis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homoskedastis.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (untuk data *time series*) atau ruang (data *cross-section*). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan penganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi

adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*. Kriteria dari uji DW sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pengujian Durbin Watson

| Hipotesis Nol | Keputusan | Kriteria |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| Ada autokorelasi positif | Tolak | $0 < d < d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi positif | Tidak ada keputusan | $d_l < d < d_u$ |
| Ada autokorelasi negatif | Tolak | $4-d_l < d < 4$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tidak ada keputusan | $4-d_u < d < 4d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi | Jangan tolak | $d_u < d < 4-d_u$ |

Sumber: Damodar Gujarati, *Basic Econometrics*

4. Uji Signifikansi

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) atau *goodness of fit* merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen. Nilai Koefisien Dererminasi (R^2) mengandung kelemahan mendasar di mana adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*). Nilai *adjusted R²* berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai *adjusted R²* makin mendekati satu, maka makin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji masing-masing variabel independen apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan *level of significant (α)* 0,05. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang berarti

variabel independen yang diuji berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan menggunakan alat analisis yaitu ANOVA dengan kriteria pengujian menggunakan *level of significant* (α) 0,05. Apabila $F_{hitung} > 0,05$ berarti terdapat pengaruh secara simultan dan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah layak untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi :

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.



Gambar 2. Peta Daerah Istimewa Yogyakarta

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara $7^{\circ}.33'$ - $8^{\circ}.12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00'$ - $110^{\circ}.50'$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²), merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari :

- Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40 persen)
- Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen)
- Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen)
- Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 persen)
- Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 persen)

Tabel 4. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Daerah di DIY

| Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa | | | Luas Area (km ²) |
|--------------------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------------------|
| | | Kota | Desa | Jumlah | |
| Bantul | 17 | 47 | 28 | 75 | 506,85 |
| Gunung Kidul | 18 | 5 | 139 | 144 | 1.485,36 |
| Kulon Progo | 12 | 13 | 75 | 88 | 586,27 |
| Sleman | 17 | 59 | 27 | 86 | 574,82 |
| Yogyakarta | 14 | 45 | 0 | 45 | 32,50 |
| DIY | 78 | 169 | 269 | 438 | 3.185,80 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil Susenas Agustus 2014 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 tercatat 3.666.533 jiwa, dengan persentase Jumlah Penduduk laki-laki 49,47 persen dan penduduk perempuan 50,53 persen. Menurut hasil proyeksi penduduk SP2010 *back casting*, persentase penduduk kota mencapai 66,74 persen dan penduduk desa mencapai 33,26 persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 mencapai 0,98 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni 0,82 persen.

Pasar tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh empat lapangan usaha, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertanian; sektor jasa-jasa; dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian yang pada awalnya paling dominan dalam menyerap angkatan kerja secara berangsur-angsur perannya mulai tergantikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu menyerap angkatan kerja sebesar 26,64% di bulan Februari 2014. Meskipun peranannya semakin menurun, sektor pertanian masih menjadi andalan utama untuk menyerap angkatan kerja terutama di daerah perdesaan dan di bulan Februari 2014 mampu menyerap angkatan kerja sebesar 25,42%. Sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan masing-masing menyerap angkatan 20,75% dan 14,91%. Kedua sektor ini mengalami peningkatan peranan yang cukup signifikan dalam menyerap angkatan kerja. Keempat sektor yang lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; angkutan dan komunikasi; dan keuangan) memiliki peranan yang relatif rendah, tetapi perkembangan andilnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. (Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta)

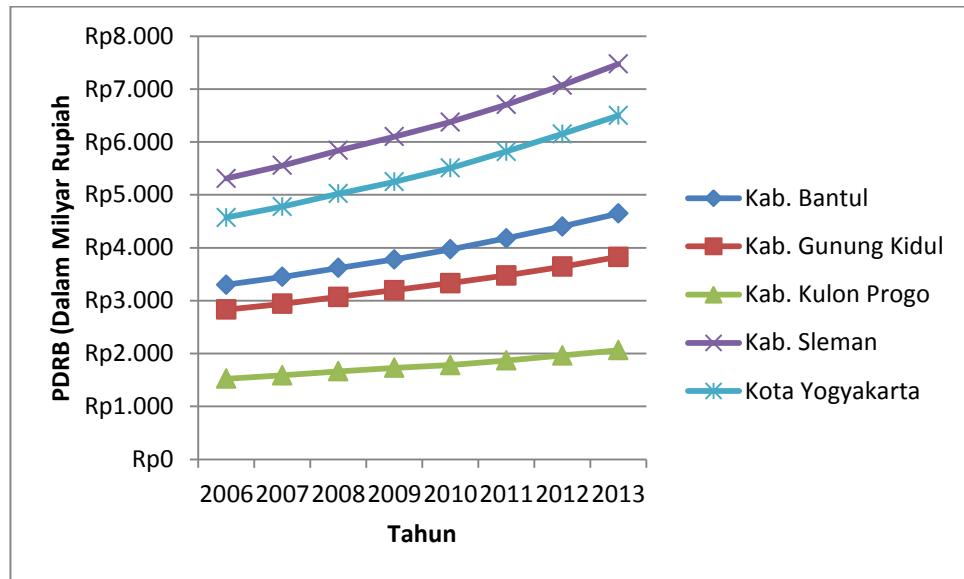
Adapun kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga

berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 tumbuh sebesar 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,40 persen. Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 tumbuh mengesankan karena hampir semua sektor tumbuh positif. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 8,97 persen, disusul sektor Jasa Pendidikan, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Pardagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Jasa lainnya, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas serta Sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu 7,91 persen sampai dengan 2,11 persen. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh negatif 2,13 persen. Berikut ini grafik PDRB menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-2013.



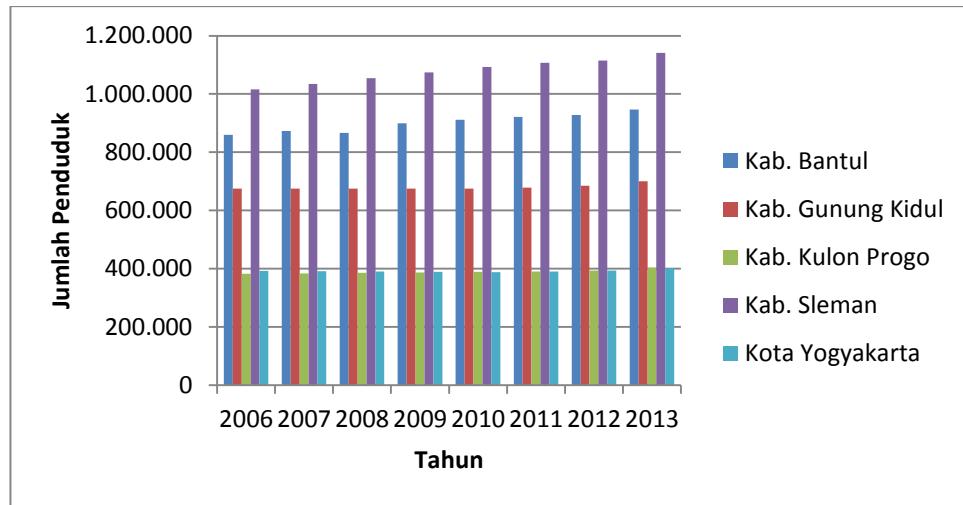
Gambar 3. PDRB Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2006-2013

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa perolehan PDRB semua kabupaten/kota di DIY memiliki tren atau kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan kesejahteraan penduduk DIY. Selain itu, peningkatan PDRB juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian pada masing-masing kabupaten/kota di DIY.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk DIY tahun 2014 tercatat 3.666.533 jiwa, dengan persentase Jumlah Penduduk laki-laki 49,47 persen dan penduduk perempuan 50,53 persen. Menurut hasil proyeksi penduduk SP2010 *back casting*, persentase penduduk kota mencapai 66,74 persen dan penduduk desa mencapai 33,26 persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 mencapai 0,98 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni 0,82 persen.

Berikut grafik perubahan Jumlah Penduduk pada tahun 2006-2013



Gambar 4. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2006-2013

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 3.185,80 km², maka kepadatan penduduk di DIY tercatat 1.142 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.322 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas wilayah DIY. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 persen memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 470 jiwa per km².

Apabila dicermati lebih dalam, selama 2006-2013 laju pertumbuhan penduduk di DIY tercepat terjadi di Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebaliknya, Kota Yogyakarta justru mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Sebagai wilayah pusat pemerintahan dan perekonomian, Kota Yogyakarta semakin jenuh untuk menampung penduduk akibat meningkatnya aktifitas perekonomian, pemerintahan dan sosial. Akibatnya, terjadi perkembangan kawasan pemukiman dan peningkatan Jumlah

Penduduk di wilayah penyangganya, terutama di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

3. Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan data statistik ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumlah Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2015 diperkirakan mencapai 2,87 juta jiwa. Jumlah Penduduk usia kerja laki-laki tercatat 1,4 juta dan perempuan 1,47 juta jiwa. Secara total terjadi kenaikan sebanyak 400 ribu orang bila dibandingkan keadaan pada Februari 2014 yaitu dari 2,83 juta orang. Berikut ini disajikan tabel penduduk usia kerja menurut jenis kegiatan selama seminggu Februari 2015.

Tabel 5. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Sempinggu

| Kegiatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Kota+Desa (N) | 1.403.719 | 1.466.296 | 2.870.015 |
| Kota+Desa (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Angkatan Kerja: | 83,95 | 62,72 | 73,10 |
| Bekerja | 79,58 | 61,09 | 70,13 |
| Pengangguran | 4,39 | 1,63 | 2,98 |
| Bukan Angkatan Kerja: | 16,05 | 37,28 | 26,90 |
| Sekolah | 8,26 | 9,10 | 8,69 |
| Mengurus Rumah Tangga | 2,87 | 26,05 | 14,71 |
| Lainnya | 4,92 | 2,13 | 3,49 |

Sumber: Sakernas Februari 2015

Berdasarkan tabel 5 (hasil Sakernas Februari 2015) di atas, persentase penduduk DIY umur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu adalah 73,10 persen merupakan angkatan kerja yaitu 70,13 persen bekerja dan 2,98 persen pengangguran. Sedangkan persentase bukan angkatan kerja sebesar 26,90 yaitu berstatus sekolah 8,69 persen, mengurus

rumah tangga 14,71 persen dan lainnya 3,49 persen. Persentase angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2015 mencapai sekitar 73,10 persen dari penduduk usia kerja, yang terdiri atas 43,83 persen angkatan kerja perempuan dan 56,17 persen angkatan kerja laki-laki.

4. Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat melalui pemberdayaan sektor pertanian dan sektor penggalian. Sektor penggalian masuk dalam kategori pemanfaatan Sumber Daya Alam karena hasil galian tersebut merupakan hasil alam yang terkandung dalam bumi serta diambil manfaatnya. Pada tahun 2013 pemanfaatan kedua sektor tersebut menyumbang 15,87% dari total pendapatan daerah.

Pada tahun 2008, pemerintah menggerakkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Hal ini mendorong pertumbuhan sektor pertanian hingga mencapai 5,63% pada tahun tersebut. Akan tetapi berakhirnya program P2BN, kondisi iklim yang kurang mendukung serta adanya erupsi Merapi menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian berkontraksi di tahun 2010-2011. Tahun berikutnya kondisi iklim kembali membaik sehingga pertumbuhan sektor pertanian kembali positif dan mencapai angka 4,19% pada tahun 2012.

Berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan, BPS membagi menjadi dua kategori besar, yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sawah dan bukan sawah.

Lahan sawah terdiri atas sawah irigasi, sawah tada hujan dan lainnya. Sedangkan lahan bukan sawah terdiri dari tegal/kebun, ladang, hutan rakyat, padang penggembalaan, lahan sementara tidak diusahakan dan lainnya. Kemudian untuk lahan bukan pertanian, antara lain jalan, pemukiman, perkantoran, dan lain-lain. Berikut disajikan pengklasifikasian penggunaan lahan menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014.

Tabel 6. Klasifikasi Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di DIY

| Kabupaten/Kota | Luas Lahan Pertanian | | Luas Lahan Bukan Pertanian | Jumlah |
|----------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------|
| | Sawah | Bukan Sawah | | |
| Bantul | 15.191 | 13.639 | 21.855 | 50.685 |
| Persentase (%) | 29,97 | 26,91 | 43,12 | 100,00 |
| Gunung Kidul | 7.865 | 117.701 | 22.970 | 148.536 |
| Persentase (%) | 5,30 | 79,24 | 15,46 | 100,00 |
| Kulon Progo | 10.296 | 35.027 | 13.304 | 58.627 |
| Persentase (%) | 17,56 | 59,75 | 22,69 | 100,00 |
| Sleman | 22.233 | 20.905 | 14.344 | 57.482 |
| Persentase (%) | 38,68 | 36,37 | 24,95 | 100,00 |
| Yogyakarta | 65 | 17 | 3.168 | 3.250 |
| Persentase (%) | 2,00 | 0,52 | 97,48 | 100,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015

Berdasarkan data di atas, maka persentase luas lahan pertanian pada empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih besar dibandingkan dengan luas lahan bukan pertanian. Sedangkan pada daerah kota, luas lahan bukan pertanian yang memiliki persentase lebih besar.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY) dan publikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui www.bpk.go.id

khusus tahun 2006-2013. Penelitian ini menguji pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

Berikut ini merupakan tabel mengenai deskripsi data dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 7. Statistik Deskriptif

| | N | Mean | Median | Std. Dev. | Min | Max |
|-----------------------|----------|-------------|---------------|------------------|------------|------------|
| Kemandirian | 40 | 12,4 | 9,8 | 6,9 | 4,7 | 29,2 |
| PDRB | 40 | 4145,4 | 3896,0 | 1693,5 | 1524 | 7471 |
| Σ Penduduk | 40 | 692067,1 | 680622,0 | 277411,4 | 373934 | 1141547 |
| Σ Tenaga Kerja | 40 | 364863,4 | 410247,5 | 135397,0 | 177200 | 568419 |
| SDA | 40 | 754052,3 | 949351,0 | 460028,3 | 17624 | 1419351 |

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, selama tahun 2006-2013 rasio kemandirian terendah 4,78 yang dicapai oleh Kabupaten Gunung Kidul dan tertinggi 29,25 yang dicapai Kota Yogyakarta. PDRB tertinggi diraih oleh Kota Yogyakarta sebesar Rp7.471 Milyar, sedangkan PDRB terendah diraih oleh Bantul yang hanya mencapai Rp1.524 Milyar. Jumlah Penduduk terbanyak berada di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sejumlah 1.141.547 jiwa, sedangkan Jumlah Penduduk terendah dimiliki oleh Kulon Progo yaitu sejumlah 373.934 jiwa. Jumlah Penduduk yang bekerja terbanyak berada di Kabupaten Sleman sebanyak 568.419 pekerja, sedangkan paling sedikit berada di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 yaitu 177.200 pekerja. Hasil kekayaan Sumber Daya Alam terbesar dicapai oleh Kabupaten Gunung Kidul yaitu

mencapai Rp1.419.726.000.000,00, sedangkan pencapaian hasil Sumber Daya Alam paling kecil oleh Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp17.624.000.000,00.

C. Analisis Data

1. Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *common effect* yang sebaiknya dipakai. Hipotesis uji Chow yaitu sebagai berikut.

$$H_0 : \text{Common Effect}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect}$$

Apabila hasil probabilitas Chi-square $> 0,05$ maka H_0 gagal ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Hasil estimasi uji Chow adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Chow

| Effect Test | Statistic | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|
| Cross-section F | 7,446444 | 0,0003 |
| Cross-section Chi-Square | 26,934744 | 0,0000 |

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square = 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*. Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect*, maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk

mengetahui apakah sebaiknya memakai model *fixed effect* atau model *random effect*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu model *fixed effect* atau model *random effect*.

$H_0 : \text{Random Effect}$

$H_a : \text{Fixed Effect}$

Apabila hasil probabilitas Chi-square $> 0,05$ maka H_0 gagal ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *random effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Hasil estimasi uji Hausman adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------|
| Cross-section random | 29,785776 | 0,0000 |

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

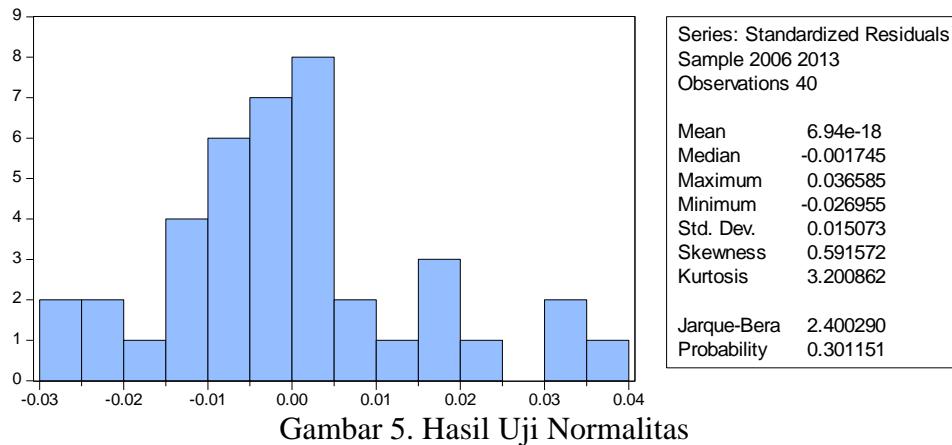
Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square = 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan *Jarque-Bera*

Bera Test apabila probabilitas lebih dari 0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal.



Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0,301151 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Menurut Gujarati (2013), apabila koefisien korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, apabila koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

| * | PDRB | JPD | JTK | SDA | Keterangan |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| PDRB | 1 | 0,307836 | 0,055597 | 0,192005 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| JPD | 0,307836 | 1 | 0,038773 | -0,194287 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| JTK | 0,055597 | 0,038773 | 1 | 0,177737 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| SDA | 0,192005 | -0,194287 | 0,177737 | 1 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, semua koefisien korelasi kurang dari 0,8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastis adalah dengan me-regress model dengan log residu kuadrat sebagai variabel dependen.

H_0 : Homoskedastis

H_a : Heteroskedastis

Apabila probabilitas dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 maka terjadi penerimaan terhadap H_0 , sehingga tidak terdapat heteroskedastis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homosedastis.

Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | Prob. | Keterangan |
|----------|--------|-----------------------------------|
| PDRB | 0,2404 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| JPD | 0,1075 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| JTK | 0,5857 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| SDA | 0,7965 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh variabel menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastis dalam model tersebut.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan penganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*.

Berdasarkan hasil uji yang dilaksanakan, didapatkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,105644 dengan $d_L = 1,285$ dan $d_U = 1,721$. Nilai d hitung berada pada kriteria $0 < d < d_L$ maka dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi positif. Oleh karena itu, dilakukan penyembuhan autokorelasi dengan *Cochrane Orcutt*, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,960787 dan nilai d hitung berada pada kriteria $d_U < d < 4-d_U$ maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

3. Analisis Data Panel

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan, model yang sebaiknya digunakan adalah dengan model *fixed effect*. Kemudian model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Hasil estimasi model regresi data panel sebagai berikut.

Tabel 12. Hasil Estimasi Model

| Variable | Coefficient | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|-------------|----------|
| C | -6,522940 | -2,382530 | 0,0235* |
| PDRB | 0,208370 | 4,323822 | 0,0001* |
| JPD | 0,398540 | 1,755586 | 0,0890** |
| JTK | -0,046319 | -0,975828 | 0,3367 |
| SDA | 0,915555 | 2,112521 | 0,0428* |

*Signifikan pada taraf 5%; **Signifikan pada taraf 10%

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas untuk variabel PDRB dan SDA masing-masing 0,0001 dan 0,0428 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel PDRB dan SDA signifikan dalam taraf 5%. Selanjutnya untuk variabel JPD memiliki probabilitas sebesar 0,890 lebih kecil dari 0,10 yang berarti bahwa variabel JPD signifikan dalam taraf 10%. Sedangkan untuk variabel JTK memiliki probabilitas sebesar 0,3367 lebih besar dari 0,10 yang berarti bahwa variabel JTK tidak signifikan.

D. Hasil Uji Signifikansi

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) atau *goodness of fit* merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) mengandung kelemahan mendasar di mana adanya bias terhadap jumlah variabel

independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*).

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| | |
|---------------------------|----------|
| R-squared | 0,952867 |
| Adjusted R-squared | 0,940703 |

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan hasil di atas, *adjusted R²* sebesar 0,940703. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 94,07%. Sisanya sebesar 5,93% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Hasil analisis uji t menunjukkan masing-masing variabel independen secara individu signifikan mempengaruhi variabel dependen.

a. Pengaruh PDRB Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki nilai t-hitung sebesar 4,323822 dan probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien regresi sebesar 0,208370 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan derah di DIY. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan PDRB 1% maka akan menyebabkan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,208370%.

b. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai t-hitung sebesar 1,755586 dan probabilitas sebesar 0,0890 lebih kecil dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk secara individu signifikan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada taraf 10%. Nilai koefisien regresi sebesar 0,398540 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah di DIY. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan Jumlah Penduduk 1% maka akan menyebabkan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,398540%

c. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja memiliki nilai t-hitung sebesar -0,975828 dan probabilitas sebesar 0,3367 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

d. Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Alam memiliki nilai t-hitung sebesar 2,112521 dan probabilitas sebesar 0,0428 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sumber Daya Alam secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien regresi sebesar 0,915555 menunjukkan bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap

kemandirian keuangan derah di DIY. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pendapatan daerah dari hasil pertanian dan penggalian (Sumber Daya Alam) sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,915555%.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *software Eviews 8*, diperoleh nilai F hitung sebesar 78,33860 dengan probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data panel pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2013. Berdasarkan hasil pengolahan data panel dengan model *fixed effect* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{KEMANDIRIAN}_{it} = -6,522940 + 0,208370 \text{ PDRB}_{it} + 0,398540 \text{ JPD}_{it} \\ - 0,046319 \text{ JTK}_{it} + 0,915555 \text{ SDA}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

| | |
|---------------|-------------------------------|
| KEMANDIRIAN | = Kemandirian Keuangan Daerah |
| PDRB | = PDRB |
| JPD | = Jumlah Penduduk |
| JTK | = Jumlah Tenaga Kerja |
| SDA | = Sumber Daya Alam |
| ε | = Error Term |

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diketahui bahwa koefisien konstanta sebesar -6,522940. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di DIY yang tidak masuk ke dalam model. Adapun variabel-variabel bebas dalam model yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di DIY. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014). Bahwa semakin tinggi tingkat PDRB mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tinggi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini memicu kenaikan pada pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.

Oleh karena pendapatan pemerintah daerah yang meningkat, maka pemerintah daerah akan mempunyai jumlah kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dengan demikian tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan PDRB.

2. Jumlah Penduduk

Pengujian variabel Jumlah Penduduk menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk secara individu berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di DIY. Hasil ini sama dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, yaitu Darmanto (2012). Peningkatan Jumlah Penduduk akan meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. Peningkatan daya beli masyarakat ini tentu akan menjadikan tambahan pendapatan bagi daerah, sehingga kemandirian keuangan daerah meningkat. Selain itu, jumlah penduduk yang menempati suatu daerah juga akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jumlah Penduduk yang semakin besar, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Adanya tuntutan tersebut menjadikan pemerintah terdorong untuk meningkatkan kinerja (dalam hal ini kemandirian keuangan daerah) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Darmanto (2012). Jumlah Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah disebabkan masih adanya tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah daerah semestinya mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di daerahnya (Suyono, 2010).

4. Sumber Daya Alam

Pengujian variabel Sumber Daya Alam dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Jolianis (2014), bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di DIY bernilai positif. Hal ini berarti bahwa dengan pemanfaatan/pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal oleh pemerintah daerah memberikan sumbangsih terhadap pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang diterima dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Persentase kontribusi sektor alam (Pertanian dan Penggalian) terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Selain itu, apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor lain, sektor alam bukan merupakan kontributor terbesar bagi PDRB. Berikut ini distribusi persentase PDRB Provinsi DIY tahun 2006-2013.

Tabel 14. Distribusi Persentase PDRB DIY Tahun 2006-2013

| Sektor | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | \bar{X} |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Pertanian | 18,86 | 18,22 | 18,33 | 18,16 | 17,26 | 16,08 | 15,9 | 15,18 | 17,54 |
| Penggalian | 0,72 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,71 |
| Industri | 14,15 | 13,82 | 13,36 | 13,01 | 13,27 | 13,48 | 12,51 | 12,79 | 13,37 |
| Listrik,gas,air | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,91 |
| Konstruksi | 9,01 | 9,47 | 9,57 | 9,59 | 9,7 | 9,89 | 9,95 | 10,01 | 9,60 |
| Perdagangan | 20,36 | 20,5 | 20,67 | 20,74 | 20,83 | 20,84 | 21,11 | 21,27 | 20,72 |
| Pengangkutan | 10,05 | 10,25 | 10,41 | 10,61 | 10,7 | 10,98 | 11,08 | 11,17 | 10,58 |
| Keuangan | 9,08 | 9,27 | 9,32 | 9,49 | 9,62 | 9,87 | 10,31 | 10,39 | 9,57 |
| Jasa | 16,91 | 16,8 | 16,71 | 16,79 | 17,04 | 17,25 | 17,54 | 17,57 | 17,01 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan tabel 14 di atas, diketahui bahwa perekonomian DIY mengalami pergeseran, dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. Secara angka, sektor industri terus mengalami peningkatan, akan tetapi persentase

kontribusinya terhadap PDRB cenderung turun. Hal ini menunjukkan ada sektor lain yang berkembang lebih pesat, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sepanjang tahun 2006-2013, selain menjadi kontributor terbesar pada PDRB, sektor perdagangan, hotel dan restoran juga konsisten mengalami kenaikan. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan nama besar yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota pariwisata, sehingga sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih berkembang.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. PDRB memiliki nilai t-hitung sebesar 4,323822 dan probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah daerah mempunyai jumlah kas (pendapatan) yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
 2. Jumlah Penduduk memiliki nilai t-hitung sebesar 1,755586 dan probabilitas sebesar 0,0890 lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk secara individu signifikan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.
 3. Jumlah Tenaga Kerja memiliki nilai t-hitung sebesar -0,975828 dan probabilitas sebesar 0,3367 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.
 4. Sumber Daya Alam memiliki nilai t-hitung sebesar 2,112521 dan probabilitas sebesar 0,0428 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel Sumber Daya Alam secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Nilai F hitung sebesar 78,33860 dengan probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kemandirian Keuangan Daerah).

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Periode waktu penelitian pendek, yaitu dari tahun 2006 sampai 2013.
2. Penelitian dilakukan tanpa memisahkan ke dalam kriteria tertentu, misalnya daerah kota/*non* kota.
3. Penelitian ini hanya menganalisis 4 variabel independen saja, padahal masih banyak faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
 - a. Peningkatan PDRB terbukti meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan capaian PDRB setiap tahunnya.
 - b. Jumlah Penduduk suatu daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, oleh karenanya, pertumbuhan penduduk yang terjadi sebaiknya diimbangi dengan perbaikan kualitas dari penduduk itu sendiri,

sehingga tercipta jumlah penduduk yang berkualitas dan terjadi pengingkatan kemandirian keuangan daerah.

- c. Perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kerja yang ada, sehingga jumlah tenaga kerja memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi.
- d. Pergeseran perekonomian dari agraris ke niaga jasa memberikan dampak yang baik. Hal ini berarti pemerintah lebih menggali potensi daerah agar tercipta Kemandirian Keuangan Daerah yang lebih mandiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Apabila tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, lebih baik menambahkan variabel yang lebih bervariasi dan jumlah observasi dalam penelitian ditambah. Memisahkan observasi ke dalam kriteria tertentu, misalnya daerah kota/*non* kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hafidh, Aula. 2013. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 18 No. 2, Oktober 2013.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS. 2015. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2014. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2012. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2011. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2011*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2010. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2010*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2009. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2009*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2008. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2008*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2007. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2006/2007*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.

- BPS. 2015. *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2014. *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2013*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2013. *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2012*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Darmanto, Habib Candra. 2012. Pengaruh Population, Employment, Size dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Gujarati, Damodar & Dawn, Porter. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Patriati, Ratri. 2010. Analis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Putri, Titin Kartika. 2014. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah*. Universitas Jember.
- Soleh, Chabib & Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Suprapto, Tri. 2006. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Suyono. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wijaya, H.A.W. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja Frafindo Persada.
- Winarna, Jaka. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Journal of Rural and Development*. Vol. 1 No. 2, Agustus 2010.

LAMPIRAN

1. Data Penelitian

| Tahun | Kabupaten /Kota | Rasio Kemandirian (%) | PDRB (milyar Rp) | JPD | JTK | SDA (%) |
|-------|-----------------|-----------------------|------------------|---------|--------|---------|
| 2006 | Bantul | 0.0734 | 3299.646 | 859729 | 430771 | 0.2572 |
| 2007 | Bantul | 0.0786 | 3448.949 | 872866 | 440259 | 0.2533 |
| 2008 | Bantul | 0.0682 | 3618.06 | 866061 | 491765 | 0.2532 |
| 2009 | Bantul | 0.1005 | 3779.948 | 899312 | 499319 | 0.2527 |
| 2010 | Bantul | 0.0827 | 3967.928 | 911503 | 468822 | 0.2444 |
| 2011 | Bantul | 0.1092 | 4177.201 | 921263 | 472076 | 0.2297 |
| 2012 | Bantul | 0.1246 | 4400.313 | 927958 | 488773 | 0.2262 |
| 2013 | Bantul | 0.1475 | 4645.476 | 947066 | 472808 | 0.2168 |
| 2006 | Gunung Kidul | 0.0565 | 2830.583 | 675140 | 405680 | 0.417 |
| 2007 | Gunung Kidul | 0.0479 | 2941.288 | 675359 | 396671 | 0.407 |
| 2008 | Gunung Kidul | 0.0478 | 3070.298 | 675471 | 418601 | 0.4093 |
| 2009 | Gunung Kidul | 0.054 | 3199.316 | 675474 | 415756 | 0.4152 |
| 2010 | Gunung Kidul | 0.0533 | 3330.08 | 675382 | 372189 | 0.3984 |
| 2011 | Gunung Kidul | 0.0564 | 3474.288 | 677998 | 358807 | 0.3856 |
| 2012 | Gunung Kidul | 0.0623 | 3642.562 | 684740 | 414815 | 0.3828 |
| 2013 | Gunung Kidul | 0.0672 | 3825.35 | 700192 | 420454 | 0.371 |
| 2006 | Kulon Progo | 0.0785 | 1524.848 | 382661 | 218280 | 0.282 |
| 2007 | Kulon Progo | 0.0739 | 1587.63 | 384326 | 219155 | 0.2786 |
| 2008 | Kulon Progo | 0.0727 | 1662.37 | 385937 | 210505 | 0.2837 |
| 2009 | Kulon Progo | 0.066 | 1728.304 | 387493 | 212963 | 0.2853 |
| 2010 | Kulon Progo | 0.0763 | 1781.227 | 388869 | 211069 | 0.2697 |
| 2011 | Kulon Progo | 0.0679 | 1869.338 | 390207 | 203425 | 0.2734 |
| 2012 | Kulon Progo | 0.0839 | 1963.028 | 393221 | 218042 | 0.2725 |
| 2013 | Kulon Progo | 0.0957 | 2062.182 | 403203 | 228572 | 0.2648 |
| 2006 | Sleman | 0.129 | 5309.059 | 1015521 | 462745 | 0.1778 |
| 2007 | Sleman | 0.1462 | 5553.593 | 1035032 | 505672 | 0.1722 |
| 2008 | Sleman | 0.1486 | 5838.246 | 1054751 | 537999 | 0.1743 |
| 2009 | Sleman | 0.1578 | 6099.557 | 1074673 | 530634 | 0.1694 |
| 2010 | Sleman | 0.1488 | 6373.2 | 1093110 | 531929 | 0.1624 |
| 2011 | Sleman | 0.1729 | 6704.1 | 1107304 | 561894 | 0.1517 |
| 2012 | Sleman | 0.1894 | 7069.229 | 1114833 | 544438 | 0.1497 |
| 2013 | Sleman | 0.2365 | 7471.898 | 1141684 | 568419 | 0.1437 |
| 2006 | Yogyakarta | 0.1858 | 4572.504 | 392799 | 177200 | 0.0048 |
| 2007 | Yogyakarta | 0.1853 | 4776.401 | 391821 | 222729 | 0.0041 |
| 2008 | Yogyakarta | 0.1839 | 5021.149 | 390783 | 233335 | 0.0037 |

| Tahun | Kabupaten /Kota | Rasio Kemandirian (%) | PDRB (milyar Rp) | JPD | JTK | SDA (%) |
|-------|-----------------|-----------------------|------------------|--------|--------|---------|
| 2009 | Yogyakarta | 0.2153 | 5244.851 | 389685 | 236976 | 0.0034 |
| 2010 | Yogyakarta | 0.22 | 5505.942 | 388685 | 191139 | 0.0032 |
| 2011 | Yogyakarta | 0.2405 | 5816.568 | 390553 | 202393 | 0.0032 |
| 2012 | Yogyakarta | 0.2922 | 6151.679 | 394012 | 201640 | 0.0029 |
| 2013 | Yogyakarta | 0.2925 | 6498.9 | 402709 | 195818 | 0.0028 |

2. Data Diolah (LN)

| Tahun | Kabupaten /Kota | Rasio Kemandirian | LN (PDRB) | LN (JPD) | LN (JTK) | SDA |
|-------|-----------------|-------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 2006 | Bantul | 0.0734 | 8.1016 | 13.6644 | 12.9733 | 0.2572 |
| 2007 | Bantul | 0.0786 | 8.1458 | 13.6795 | 12.9951 | 0.2533 |
| 2008 | Bantul | 0.0682 | 8.1937 | 13.6717 | 13.1058 | 0.2532 |
| 2009 | Bantul | 0.1005 | 8.2375 | 13.7094 | 13.121 | 0.2527 |
| 2010 | Bantul | 0.0827 | 8.286 | 13.7229 | 13.058 | 0.2444 |
| 2011 | Bantul | 0.1092 | 8.3374 | 13.7335 | 13.0649 | 0.2297 |
| 2012 | Bantul | 0.1246 | 8.3894 | 13.7407 | 13.0997 | 0.2262 |
| 2013 | Bantul | 0.1475 | 8.4436 | 13.7611 | 13.0664 | 0.2168 |
| 2006 | Gunung Kidul | 0.0565 | 7.9482 | 13.4227 | 12.9133 | 0.417 |
| 2007 | Gunung Kidul | 0.0479 | 7.9866 | 13.423 | 12.8909 | 0.407 |
| 2008 | Gunung Kidul | 0.0478 | 8.0295 | 13.4232 | 12.9447 | 0.4093 |
| 2009 | Gunung Kidul | 0.054 | 8.0707 | 13.4232 | 12.9379 | 0.4152 |
| 2010 | Gunung Kidul | 0.0533 | 8.1108 | 13.423 | 12.8272 | 0.3984 |
| 2011 | Gunung Kidul | 0.0564 | 8.1531 | 13.4269 | 12.7905 | 0.3856 |
| 2012 | Gunung Kidul | 0.0623 | 8.2004 | 13.4368 | 12.9356 | 0.3828 |
| 2013 | Gunung Kidul | 0.0672 | 8.2494 | 13.4591 | 12.9491 | 0.371 |
| 2006 | Kulon Progo | 0.0785 | 7.3297 | 12.8549 | 12.2935 | 0.282 |
| 2007 | Kulon Progo | 0.0739 | 7.37 | 12.8592 | 12.2975 | 0.2786 |
| 2008 | Kulon Progo | 0.0727 | 7.416 | 12.8634 | 12.2573 | 0.2837 |
| 2009 | Kulon Progo | 0.066 | 7.4549 | 12.8675 | 12.2689 | 0.2853 |
| 2010 | Kulon Progo | 0.0763 | 7.4851 | 12.871 | 12.2599 | 0.2697 |
| 2011 | Kulon Progo | 0.0679 | 7.5333 | 12.8744 | 12.2231 | 0.2734 |
| 2012 | Kulon Progo | 0.0839 | 7.5822 | 12.8821 | 12.2924 | 0.2725 |
| 2013 | Kulon Progo | 0.0957 | 7.6315 | 12.9072 | 12.3396 | 0.2648 |
| 2006 | Sleman | 0.129 | 8.5772 | 13.8309 | 13.0449 | 0.1778 |
| 2007 | Sleman | 0.1462 | 8.6222 | 13.8499 | 13.1336 | 0.1722 |
| 2008 | Sleman | 0.1486 | 8.6722 | 13.8688 | 13.1956 | 0.1743 |

| Tahun | Kabupaten /Kota | Rasio Kemandirian | LN (PDRB) | LN (JPD) | LN (JTK) | SDA |
|-------|-----------------|-------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 2009 | Sleman | 0.1578 | 8.716 | 13.8875 | 13.1818 | 0.1694 |
| 2010 | Sleman | 0.1488 | 8.7599 | 13.9045 | 13.1843 | 0.1624 |
| 2011 | Sleman | 0.1729 | 8.8105 | 13.9174 | 13.2391 | 0.1517 |
| 2012 | Sleman | 0.1894 | 8.8635 | 13.9242 | 13.2075 | 0.1497 |
| 2013 | Sleman | 0.2365 | 8.9189 | 13.948 | 13.2506 | 0.1437 |
| 2006 | Yogyakarta | 0.1858 | 8.4278 | 12.8811 | 12.085 | 0.0048 |
| 2007 | Yogyakarta | 0.1853 | 8.4714 | 12.8786 | 12.3137 | 0.0041 |
| 2008 | Yogyakarta | 0.1839 | 8.5214 | 12.8759 | 12.3602 | 0.0037 |
| 2009 | Yogyakarta | 0.2153 | 8.565 | 12.8731 | 12.3757 | 0.0034 |
| 2010 | Yogyakarta | 0.22 | 8.6136 | 12.8705 | 12.1608 | 0.0032 |
| 2011 | Yogyakarta | 0.2405 | 8.6685 | 12.8753 | 12.218 | 0.0032 |
| 2012 | Yogyakarta | 0.2922 | 8.7245 | 12.8841 | 12.2142 | 0.0029 |
| 2013 | Yogyakarta | 0.2925 | 8.7794 | 12.906 | 12.1849 | 0.0028 |

3. Deskripsi Statistik

| | KEMANDIRIAN | PDRB | JPD | JTK | SDA |
|---------------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Mean | 12.47425 | 4145.425 | 692067.1 | 364863.4 | 754052.3 |
| Median | 9.810000 | 3896.000 | 680622.0 | 410247.5 | 949351.0 |
| Maximum | 29.25000 | 7471.000 | 1141547. | 568419.0 | 1419726. |
| Minimum | 4.780000 | 1524.000 | 373934.0 | 177200.0 | 17624.00 |
| Std. Dev. | 6.942674 | 1693.557 | 277411.4 | 135397.0 | 460028.3 |
| Skewness | 0.847799 | 0.107128 | 0.166871 | -0.085004 | -0.451549 |
| Kurtosis | 2.710012 | 1.989748 | 1.492099 | 1.399454 | 1.923472 |
| Jarque-Bera | 4.931913 | 1.777524 | 3.975250 | 4.317751 | 3.290832 |
| Probability | 0.084928 | 0.411165 | 0.137020 | 0.115455 | 0.192932 |
| Sum | 498.9700 | 165817.0 | 27682682 | 14594537 | 30162091 |
| Sum Sq. Dev. | 1879.828 | 1.12E+08 | 3.00E+12 | 7.15E+11 | 8.25E+12 |
| Observations | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

4. Uji Spesifikasi Model

a. Uji Chow

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: KEMANDIRIAN

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 7.446444 | (4,31) | 0.0003 |
| Cross-section Chi-square | 26.934744 | 4 | 0.0000 |

Model Common Effect

Dependent Variable: KEMANDIRIAN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/23/16 Time: 14:18

Sample: 2006 2013

Included observations: 8

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 40

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | 0.121317 | 0.121179 | 1.001141 | 0.3236 |
| PDRB? | 0.091244 | 0.017861 | 5.108690 | 0.0000 |
| JPD? | 0.020695 | 0.052285 | 0.395803 | 0.6947 |
| JTK? | -0.076743 | 0.059731 | -1.284808 | 0.2073 |
| SDA? | -0.218696 | 0.064694 | -3.380437 | 0.0018 |
| R-squared | 0.907580 | Mean dependent var | 0.124743 | |
| Adjusted R-squared | 0.897017 | S.D. dependent var | 0.069427 | |
| S.E. of regression | 0.022280 | Akaike info criterion | -4.653814 | |
| Sum squared resid | 0.017373 | Schwarz criterion | -4.442704 | |
| Log likelihood | 98.07627 | Hannan-Quinn criter. | -4.577483 | |
| F-statistic | 85.92597 | Durbin-Watson stat | 0.685058 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Model Fixed Effect

Dependent Variable: KEMANDIRIAN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/23/16 Time: 14:19

Sample: 2006 2013

Included observations: 8

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 40

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | -6.522940 | 2.737821 | -2.382530 | 0.0235 |
| PDRB? | 0.208370 | 0.048191 | 4.323822 | 0.0001 |
| JPD? | 0.398540 | 0.227013 | 1.755586 | 0.0890 |
| JTK? | -0.046319 | 0.047466 | -0.975828 | 0.3367 |
| SDA? | 0.915555 | 0.433394 | 2.112521 | 0.0428 |
| Fixed Effects (Cross) | | | | |
| _BANTUL--C | -0.182019 | | | |
| _GUNUNGKIDUL--C | -0.227342 | | | |
| _KULONPROGO--C | 0.227799 | | | |
| _SLEMAN--C | -0.207327 | | | |
| _YOGYAKARTA--C | 0.388889 | | | |
| Effects Specification | | | | |
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | | |
| R-squared | 0.952867 | Mean dependent var | 0.124743 | |
| Adjusted R-squared | 0.940703 | S.D. dependent var | 0.069427 | |
| S.E. of regression | 0.016906 | Akaike info criterion | -5.127182 | |
| Sum squared resid | 0.008860 | Schwarz criterion | -4.747184 | |
| Log likelihood | 111.5436 | Hannan-Quinn criter. | -4.989787 | |
| F-statistic | 78.33860 | Durbin-Watson stat | 1.105644 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

b. Uji Hausman

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: KEMANDIRIAN

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 29.785776 | 4 | 0.0000 |

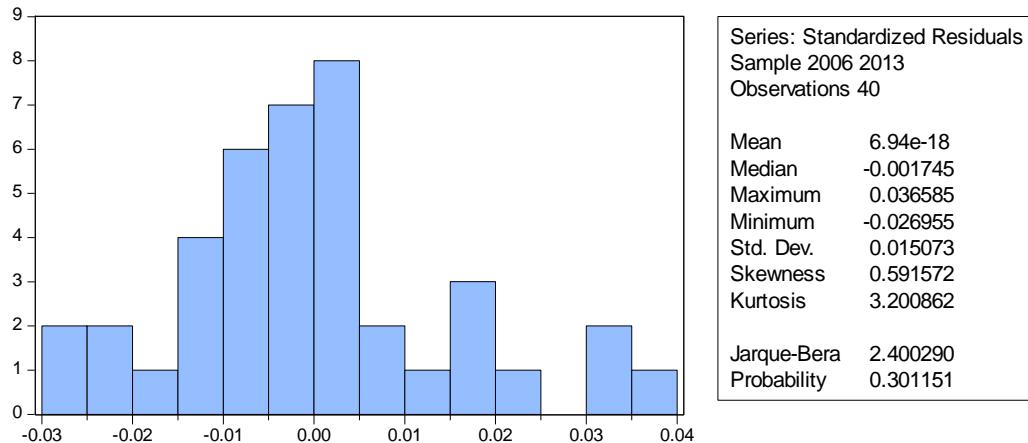
Model Random Effect

Dependent Variable: KEMANDIRIAN?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/23/16 Time: 14:22
 Sample: 2006 2013
 Included observations: 8
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 40
 Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | 0.121317 | 0.091952 | 1.319356 | 0.1956 |
| PDRB? | 0.091244 | 0.013553 | 6.732503 | 0.0000 |
| JPD? | 0.020695 | 0.039674 | 0.521610 | 0.6052 |
| JTK? | -0.076743 | 0.045324 | -1.693189 | 0.0993 |
| SDA? | -0.218696 | 0.049091 | -4.454919 | 0.0001 |
| Random Effects (Cross) | | | | |
| _BANTUL--C | -2.21E-11 | | | |
| _GUNUNGKIDUL--C | -1.84E-11 | | | |
| _KULONPROGO--C | 3.56E-11 | | | |
| _SLEMAN--C | 2.41E-11 | | | |
| _YOGYAKARTA--C | -1.92E-11 | | | |
| Effects Specification | | | | |
| | | S.D. | Rho | |
| Cross-section random | | 3.60E-07 | 0.0000 | |
| Idiosyncratic random | | 0.016906 | 1.0000 | |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.907580 | Mean dependent var | 0.124742 | |
| Adjusted R-squared | 0.897017 | S.D. dependent var | 0.069427 | |
| S.E. of regression | 0.022280 | Sum squared resid | 0.017373 | |
| F-statistic | 85.92597 | Durbin-Watson stat | 0.685058 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |
| Unweighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.907580 | Mean dependent var | 0.124743 | |
| Sum squared resid | 0.017373 | Durbin-Watson stat | 0.685058 | |

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOG(RESID?^2)

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/23/16 Time: 14:47

Sample: 2006 2013

Included observations: 8

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 40

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -726.7453 | 462.4679 | -1.571450 | 0.1262 |
| PDRB? | -9.744584 | 8.140372 | -1.197069 | 0.2404 |
| JPD? | 63.56655 | 38.34659 | 1.657684 | 0.1075 |
| JTK? | -4.416159 | 8.017902 | -0.550787 | 0.5857 |
| SDA? | 19.04175 | 73.20821 | 0.260104 | 0.7965 |
| Fixed Effects (Cross) | | | | |
| _BANTUL—C | -21.36025 | | | |
| _GUNUNGKIDUL—C | -9.756286 | | | |
| _KULONPROGO—C | 21.53856 | | | |
| _SLEMAN—C | -26.07016 | | | |
| _YOGYAKARTA—C | 35.64813 | | | |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.154996 | Mean dependent var | -10.04030 |
| Adjusted R-squared | -0.063070 | S.D. dependent var | 2.769733 |
| S.E. of regression | 2.855741 | Akaike info criterion | 5.131648 |
| Sum squared resid | 252.8130 | Schwarz criterion | 5.511645 |
| Log likelihood | -93.63295 | Hannan-Quinn criter. | 5.269043 |
| F-statistic | 0.710776 | Durbin-Watson stat | 2.914994 |
| Prob(F-statistic) | 0.680063 | | |

c. Uji Multikolinearitas

| | PDRB | JPD | JTK | SDA |
|------|----------|-----------|----------|-----------|
| PDRB | 1.000000 | 0.307836 | 0.055597 | 0.192005 |
| JPD | 0.307836 | 1.000000 | 0.038773 | -0.194287 |
| JTK | 0.055597 | 0.038773 | 1.000000 | 0.177737 |
| SDA | 0.192005 | -0.194287 | 0.177737 | 1.000000 |

d. Uji Autokorelasi

$n = 40$
 $k = 4$
 $d_L = 1,285$
 $d_U = 1,721$
 $4-d_U = 2,279$
 $d_{\text{awal}} = 1,105644$
 $d_{\text{penyembuhan}} = 1,960787$
 Tidak Ada Autokorelasi : $d_U < d < 4-d_U$

Penyembuhan Autokorelasi dengan Cochrane Orcutt

Dependent Variable: RESID?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/23/16 Time: 14:34
 Sample (adjusted): 2008 2013
 Included observations: 6 after adjustments
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 30

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | -0.001966 | 0.002786 | -0.705824 | 0.4874 |
| RESID?(-1) | 0.195956 | 0.224811 | 0.871647 | 0.3924 |
| RESID?(-2) | 0.103280 | 0.230497 | 0.448076 | 0.6583 |
| Fixed Effects (Cross) | | | | |
| _BANTUL--C | 0.000770 | | | |
| _GUNUNGKIDUL--C | -0.002162 | | | |
| _KULONPROGO--C | -0.007441 | | | |
| _SLEMAN--C | 0.001541 | | | |
| _YOGYAKARTA--C | 0.007292 | | | |
| Effects Specification | | | | |
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | | |
| R-squared | 0.154218 | Mean dependent var | -0.002788 | |
| Adjusted R-squared | -0.066421 | S.D. dependent var | 0.014320 | |
| S.E. of regression | 0.014788 | Akaike info criterion | -5.389081 | |
| Sum squared resid | 0.005030 | Schwarz criterion | -5.062135 | |
| Log likelihood | 87.83621 | Hannan-Quinn criter. | -5.284488 | |
| F-statistic | 0.698962 | Durbin-Watson stat | 1.960787 | |
| Prob(F-statistic) | 0.653180 | | | |

6. Laporan Ralisasi Anggaaran Kabupaten/Kota DI Yogyakarta 2006-2013



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI APBD

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2006

Dalam Rupiah

| | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | 2006 | BERLEBIH (BERKURANG) |
|---|--------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | AUDITED | |
| A PENDAPATAN | | | | |
| 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 31,779,625,336.79 | 44,005,310,869.67 | 12,225,685,532.88 |
| Pajak Daerah | | 5,501,466,000.00 | 9,836,299,528.00 | 4,334,833,528.00 |
| Retribusi Daerah | | 19,875,810,100.00 | 22,412,839,917.00 | 2,537,029,817.00 |
| Bagian Laba Usaha Daerah | | 2,873,759,676.79 | 2,579,134,676.79 | (294,625,000.00) |
| Lain-lain PAD yg sah | | 3,528,589,560.00 | 9,177,036,747.88 | 5,648,447,187.88 |
| 2 DANA PERIMBANGAN | | 544,674,728,172.00 | 555,614,340,014.95 | 10,939,611,842.95 |
| Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | | 12,067,723,091.00 | 22,016,134,017.00 | 9,948,410,926.00 |
| Dana Alokasi Umum | | 470,847,000,000.00 | 470,847,000,000.00 | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus | | 33,890,000,000.00 | 33,890,000,000.00 | 0.00 |
| Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Propinsi | | 27,870,005,081.00 | 28,861,205,997.95 | 991,200,916.95 |
| 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | 19,502,500,000.00 | 0.00 | (19,502,500,000.00) |
| Bantuan Dana Kontinjeni | | 19,502,500,000.00 | 0.00 | (19,502,500,000.00) |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 595,956,853,508.79 | 599,619,650,884.62 | 3,662,797,375.83 |
| B BELANJA | | | | |
| 1 APARATUR DAERAH | | 138,116,174,007.00 | 118,338,774,610.59 | (19,777,399,396.41) |
| Belanja Administrasi Umum | | 114,067,812,036.00 | 97,376,948,762.59 | (16,690,863,273.41) |
| Belanja Operasi dan Pemeliharaan | | 15,598,056,340.00 | 12,931,418,687.00 | (2,666,637,653.00) |
| Belanja Modal | | 8,450,305,631.00 | 8,030,407,161.00 | (419,898,470.00) |
| 2 PELAYANAN PUBLIK | | 491,864,568,013.84 | 426,793,361,322.79 | (65,071,206,691.05) |
| Belanja Administrasi Umum | | 274,664,478,300.00 | 248,232,383,883.00 | (26,432,094,417.00) |
| Belanja Operasi dan Pemeliharaan | | 37,944,748,462.00 | 36,908,235,994.59 | (1,036,512,467.41) |
| Belanja Modal | | 80,002,619,915.00 | 57,572,370,060.00 | (22,430,249,855.00) |
| Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan | | 48,996,041,600.00 | 43,404,030,124.00 | (5,592,011,476.00) |
| Belanja tak Terduga | | 50,256,679,736.84 | 40,676,341,261.20 | (9,580,338,475.64) |
| JUMLAH BELANJA | | 629,980,742,020.84 | 545,132,135,933.38 | (84,848,606,087.46) |
| SURPLUS DEFISIT | | (34,023,888,512.05) | 54,487,514,951.24 | 88,511,483,463.29 |
| C PEMBIAYAAN | | | | |
| 1 PENERIMAAN DAERAH | | 36,765,119,311.87 | 36,985,119,311.87 | 220,000,000.00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | | 36,765,119,311.87 | 36,765,119,311.87 | 0.00 |
| Penerimaan Piutang Daerah | | 0.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 2 PENGELUARAN DAERAH | | 2,741,230,800.00 | 3,003,993,002.26 | 262,762,202.26 |
| Penyertaan Modal | | 2,626,000,000.00 | 2,888,762,326.00 | 262,762,326.00 |
| Pembayaran Hutang Pokok Jatuh Tempo | | 115,230,800.00 | 115,230,676.26 | (123.74) |
| PEMBIAYAAN NETTO | | 34,023,888,511.87 | 33,981,126,309.61 | (42,762,202.26) |
| 3 SISA LEBIH TAHUN BERJALAN | | 0.00 | 88,468,641,260.85 | 88,468,641,260.85 |

BANTUL, JUNI 2007
BUPATI BANTUL

HM. IDHAM SAMAWI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2006
AUDITED

| REK | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PENDAPATAN | 519.249.089.143,00 | 527.352.228.328,13 | (8.103.139.185,13) |
| 1.1. | <i>Pendapatan Asli Daerah</i> | <i>30.235.598.650,00</i> | <i>29.801.036.248,67</i> | <i>434.562.401,33</i> |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 2.935.859.750,00 | 3.389.990.508,00 | (454.130.758,00) |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 18.545.480.010,00 | 18.327.422.191,00 | 218.057.819,00 |
| 1.1.3. | Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.595.118.890,00 | 1.608.249.564,82 | (13.130.674,82) |
| 1.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 7.159.140.000,00 | 6.475.373.984,85 | 683.766.015,15 |
| 1.2. | <i>Dana Perimbangan</i> | <i>487.413.490.493,00</i> | <i>496.521.378.289,46</i> | <i>(9.107.887.796,46)</i> |
| 1.2.1. | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 12.060.000.000,00 | 20.498.366.993,00 | (8.438.366.993,00) |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | 432.868.000.000,00 | 432.868.000.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 29.080.000.000,00 | 29.080.000.000,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi | 13.405.490.493,00 | 14.075.011.296,46 | (669.520.803,46) |
| 1.3. | <i>Lain-lain Pendapatan yang sah</i> | <i>1.600.000.000,00</i> | <i>1.029.813.790,00</i> | <i>570.186.210,00</i> |
| 1.3.2. | Restitusi PPh Pasal 21 | 1.600.000.000,00 | 1.029.813.790,00 | 570.186.210,00 |
| II | BELANJA | 543.824.565.981,20 | 503.624.606.065,30 | 40.199.959.915,90 |
| 2.1. | APARATUR DAERAH | 313.458.039.781,70 | 292.245.744.892,27 | 21.212.294.889,43 |
| 2.1.1. | <i>Belanja Administrasi Umum</i> | <i>292.901.421.061,70</i> | <i>276.155.708.352,27</i> | <i>16.745.712.709,43</i> |
| 2.1.1.1. | Belanja Pegawai/Personalia | 263.866.066.936,70 | 249.985.297.395,52 | 13.880.769.541,18 |
| 2.1.1.2. | Belanja Barang dan jasa | 20.379.458.775,00 | 19.045.076.479,75 | 1.334.382.295,25 |
| 2.1.1.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.290.230.000,00 | 2.308.110.830,00 | 982.119.170,00 |
| 2.1.1.4. | Belanja Pemeliharaan | 5.365.665.350,00 | 4.817.223.647,00 | 548.441.703,00 |
| 2.1.2. | <i>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</i> | <i>15.640.189.000,00</i> | <i>11.671.200.390,00</i> | <i>3.968.988.610,00</i> |
| 2.1.2.1. | Belanja Pegawai/Personalia | 3.843.179.600,00 | 3.077.869.500,00 | 765.310.100,00 |
| 2.1.2.2. | Belanja Barang dan jasa | 8.505.990.400,00 | 5.979.960.940,00 | 2.526.029.460,00 |
| 2.1.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.480.002.000,00 | 1.927.889.200,00 | 552.112.800,00 |
| 2.1.2.4. | Belanja Pemeliharaan | 811.017.000,00 | 685.480.750,00 | 125.536.250,00 |

| REK | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.3. | <i>Belanja Modal</i> | 4.916.429.720,00 | 4.418.836.150,00 | 497.593.570,00 |
| 2.1.3.4 | Belanja Modal Instalasi | 10.000.000,00 | 9.950.000,00 | 50.000,00 |
| 2.1.3.5 | Belanja Modal Jaringan | 26.200.000,00 | 22.615.200,00 | 3.584.800,00 |
| 2.1.3.6 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 763.134.720,00 | 426.005.250,00 | 337.129.470,00 |
| 2.1.3.9 | Belanja Modal Alat-alat Angkutan | 1.066.820.000,00 | 1.059.438.000,00 | 7.382.000,00 |
| 2.1.3.10 | Belanja Modal Alat-alat Bengkel | 20.000.000,00 | 19.950.000,00 | 50.000,00 |
| 2.1.3.11 | Belanja Modal Alat-alat Pengolahan | 70.000.000,00 | 67.250.000,00 | 2.750.000,00 |
| 2.1.3.12 | Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 2.640.700.000,00 | 2.518.978.950,00 | 121.721.050,00 |
| 2.1.3.13 | Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi | 224.400.000,00 | 202.258.300,00 | 22.141.700,00 |
| 2.1.3.15 | Belanja Modal Alat-alat Laboratorium | 9.025.000,00 | 7.735.000,00 | 1.290.000,00 |
| 2.1.3.16 | Belanja Modal Buku/Pustaka | 46.150.000,00 | 45.250.450,00 | 899.550,00 |
| 2.1.3.17 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 40.000.000,00 | 39.405.000,00 | 595.000,00 |
| 2.2. | PELAYANAN PUBLIK | 181.919.226.767,50 | 164.949.667.415,00 | 16.969.559.352,50 |
| 2.2.1. | <i>Belanja Administrasi Umum</i> | 6.815.331.805,50 | 6.402.318.649,00 | 413.013.156,50 |
| 2.2.1.1. | Belanja Pegawai/Personalia | 1.569.786.805,50 | 1.535.353.246,00 | 34.433.559,50 |
| 2.2.1.2. | Belanja Barang dan jasa | 4.393.896.000,00 | 4.055.863.314,00 | 338.032.686,00 |
| 2.2.1.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 70.590.000,00 | 53.500.000,00 | 17.090.000,00 |
| 2.2.1.4. | Belanja Pemeliharaan | 781.059.000,00 | 757.602.089,00 | 23.456.911,00 |
| 2.2.2. | <i>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</i> | 54.378.550.700,00 | 47.860.706.579,00 | 6.517.844.121,00 |
| 2.2.2.1. | Belanja Pegawai/Personalia | 13.124.391.025,00 | 11.105.477.750,00 | 2.018.913.275,00 |
| 2.2.2.2. | Belanja Barang dan jasa | 34.977.603.475,00 | 31.346.950.682,00 | 3.630.652.793,00 |
| 2.2.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.476.036.000,00 | 2.107.304.940,00 | 368.731.060,00 |
| 2.2.2.4. | Belanja Pemeliharaan | 3.800.520.200,00 | 3.300.973.207,00 | 499.546.993,00 |
| 2.2.3. | <i>Belanja Modal</i> | 120.725.344.262,00 | 110.686.642.187,00 | 10.038.702.075,00 |
| 2.2.3.1 | Belanja Modal Tanah | 15.170.975.000,00 | 12.573.644.996,00 | 2.597.330.004,00 |
| 2.2.3.2 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 39.619.275.000,00 | 36.229.828.111,00 | 3.389.446.889,00 |
| 2.2.3.3 | Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi) | 5.887.343.862,00 | 5.648.026.175,00 | 239.317.687,00 |
| 2.2.3.4 | Belanja Modal Instalasi | 3.298.200.000,00 | 2.761.614.500,00 | 536.585.500,00 |
| 2.2.3.5 | Belanja Modal Jaringan | 241.220.000,00 | 237.088.000,00 | 4.132.000,00 |
| 2.2.3.6 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 45.714.614.400,00 | 44.190.480.575,00 | 1.524.133.825,00 |
| 2.2.3.7 | Belanja Modal Monumen | 38.000.000,00 | 37.434.000,00 | 566.000,00 |

| REK | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
|-------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.3.8 | Belanja Modal Alat-alat Besar | 1.428.000.000,00 | 0,00 | 1.428.000.000,00 |
| 2.2.3.10 | Belanja Modal Alat-alat Bengkel | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 0,00 |
| 2.2.3.11 | Belanja Modal Alat-alat Pengolahan | 9.500.000,00 | 9.380.000,00 | 120.000,00 |
| 2.2.3.12 | Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 2.099.516.000,00 | 1.999.905.080,00 | 99.610.920,00 |
| 2.2.3.13 | Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi | 306.900.000,00 | 293.787.250,00 | 13.112.750,00 |
| 2.2.3.14 | Belanja Modal Alat-alat Kedokteran | 4.259.650.000,00 | 4.103.040.600,00 | 156.609.400,00 |
| 2.2.3.15 | Belanja Modal Alat-alat Laboratorium | 1.188.060.000,00 | 1.178.243.000,00 | 9.817.000,00 |
| 2.2.3.16 | Belanja Modal Buku/Pustaka | 252.820.000,00 | 250.724.400,00 | 2.095.600,00 |
| 2.1.3.17 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2.3.18 | Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 0,00 |
| 2.3. | BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN | 43.297.299.432,00 | 41.678.098.758,03 | 1.619.200.673,97 |
| 2.3.4 | Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | 43.297.299.432,00 | 41.678.098.758,03 | 1.619.200.673,97 |
| 2.3.4.02 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa | 1.206.466.432,00 | 493.766.891,03 | 712.699.540,97 |
| 2.3.4.04 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | 22.121.200.000,00 | 21.476.725.000,00 | 644.475.000,00 |
| 2.3.4.05 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 18.495.618.000,00 | 18.253.591.867,00 | 242.026.133,00 |
| 2.3.4.06 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi | 90.300.000,00 | 90.300.000,00 | 0,00 |
| 2.3.4.08 | Bantuan Kepada Partai Politik | 900.000.000,00 | 880.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2.3.4.11 | Subsidi PDAM | 483.715.000,00 | 483.715.000,00 | 0,00 |
| 2.4. | BELANJA TIDAK TERSANGKA | 5.150.000.000,00 | 4.751.095.000,00 | 398.905.000,00 |
| 2.4.5 | Belanja Tidak Tersangka | 5.150.000.000,00 | 4.751.095.000,00 | 398.905.000,00 |
| 2.4.5.1 | Belanja Tak Tersangka SURPLUS (DEVISIT) | 5.150.000.000,00 (24.575.476.838,20) | 4.751.095.000,00 23.727.622.262,83 | 398.905.000,00 (48.303.099.101,03) |
| III | PEMBIAYAAN | | | 48.303.099.101,03 |
| 3.1. | Penerimaan Daerah | 29.674.726.838,20 | 29.674.726.838,20 | 0,00 |
| 3.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | 29.674.726.838,20 | 29.674.726.838,20 | 0,00 |
| 3.2. | Pengeluaran Daerah | 5.099.250.000,00 | 5.099.076.910,26 | (48.303.099.101,03) |
| 3.2.2. | Penyertaan Modal | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 |

| REK 1 | URAIAN 2 | ANGGARAN 3 | REALISASI 4 | LEBIH/KURANG 5 |
|----------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.2.3. | Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo | 99.250.000,00 | 99.076.910,26 | 173.089,74 |
| 3.2.4. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (tahun 2006) | (0,00) | 48.303.272.190,77 | (48.303.272.190,77) |

BUPATI GUNUNGKIDUL

SUHARTO



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

| PERHITUNGAN ANGGARAN | Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Rp | Rp | Rp |
| PENDAPATAN | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | |
| Pendapatan Pajak daerah | 2.642.330.962,00 | 3.320.982.073,18 | 678.651.111,18 |
| Pendapatan Retribusi daerah | 18.656.733.531,00 | 20.018.580.396,00 | 1.361.846.865,00 |
| Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.391.952.411,76 | 3.781.700.430,17 | (610.251.981,59) |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 4.383.897.380,00 | 8.082.012.223,00 | 3.698.114.843,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 30.074.914.284,76 | 35.203.275.122,35 | 5.128.360.837,59 |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | | | |
| DANA PERIMBANGAN | | | |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 12.450.710.000,00 | 17.844.066.201,00 | 5.393.356.201,00 |
| Dana Alokasi Umum | 344.035.000.000,00 | 344.035.000.000,00 | - |
| Dana Alokasi Khusus | 32.865.000.000,00 | 32.865.000.000,00 | - |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 389.350.710.000,00 | 394.744.066.201,00 | 5.393.356.201,00 |
| TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI | | | |
| Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi | 10.890.538.590,46 | 16.567.634.973,91 | 5.677.096.383,45 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi | 10.890.538.590,46 | 16.567.634.973,91 | 5.677.096.383,45 |
| Total Pendapatan Transfer | 400.241.248.590,46 | 411.311.701.174,91 | 11.070.452.584,45 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | |
| Dana Penyesuaian / Kontinjenси | 0,00 | 0,00 | - |
| Penerimaan kelebihan pembayaran pajak | 0,00 | 0,00 | - |
| Pendapatan lainnya | 850.000.000,00 | 1.856.826.485,00 | 1.006.826.485,00 |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 850.000.000,00 | 1.856.826.485,00 | 1.006.826.485,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 431.166.162.875,22 | 448.371.802.782,26 | 17.205.639.907,04 |
| BELANJA | | | |
| BELANJA OPERASI | | | |
| Belanja Pegawai/Personalia | 248.164.684.780,00 | 238.634.204.484,00 | (9.530.480.296,00) |
| Belanja Barang dan Jasa | 100.104.693.806,00 | 95.067.448.394,50 | (5.037.245.411,50) |
| Bunga | 161.259.517,00 | 106.127.292,28 | (55.132.224,72) |
| Subsidi | 0,00 | 0,00 | - |
| Hibah | 0,00 | 0,00 | - |
| Bantuan Sosial | 8.173.018.500,00 | 8.168.898.500,00 | (4.120.000,00) |
| Jumlah Belanja Operasional | 356.603.656.603,00 | 341.976.678.670,78 | (14.626.977.932,22) |
| BELANJA MODAL | | | |
| Belanja Tanah | 2.970.432.920,00 | 2.934.276.745,00 | (36.156.175,00) |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 14.973.776.554,00 | 13.888.313.863,00 | (1.085.462.691,00) |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 17.327.135.020,00 | 17.427.528.225,00 | 100.393.205,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 38.070.071.110,00 | 37.256.820.844,00 | (813.250.266,00) |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 3.421.311.800,00 | 3.203.609.200,00 | (217.702.600,00) |
| Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | - |
| Jumlah Belanja Modal | 76.762.727.404,00 | 74.710.548.877,00 | (2.052.178.527,00) |
| BELANJA TAK TERDUGA | | | |
| Belanja Tak Terduga | 1.564.097.996,69 | 1.457.427.854,16 | (106.670.142,53) |
| Jumlah Belanja Tak terduga | 1.564.097.996,69 | 1.457.427.854,16 | (106.670.142,53) |
| JUMLAH BELANJA | 434.930.482.003,69 | 418.144.655.401,94 | (16.785.826.601,75) |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| TRANSFER | | | |
| TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | | | |
| Bagi Hasil Pajak/Retribusi | 933.262.500,00 | 933.262.500,00 | - |
| Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | 36.053.564.200,00 | 35.697.739.400,00 | (355.824.800,00) |
| Bantuan Keuangan untuk Instansi | 4.794.887.576,00 | 4.134.204.810,00 | (660.682.766,00) |
| Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa | 41.781.714.276,00 | 40.765.206.710,00 | (1.016.507.566,00) |
| Jumlah Transfer | 41.781.714.276,00 | 40.765.206.710,00 | (1.016.507.566,00) |
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 476.712.196.279,69 | 458.909.862.111,94 | (17.802.334.167,75) |
| SURPLUS/DEFISIT | | | |
| PEMBIAYAAN | | | |
| PENERIMAAN DAERAH | | | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | 23.094.905.108,47 | 23.094.905.108,47 | - |
| Pencairan dari dana cadangan | 22.000.000.000,00 | 22.000.000.000,00 | - |
| Penerimaan pinjaman dan obligasi | 210.000.000,00 | 0,00 | (210.000.000,00) |
| Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan | | | |
| Penerimaan Piutang | 6.758.244.311,00 | 2.241.858.914,00 | (4.516.385.397,00) |
| Jumlah Penerimaan | 52.063.149.419,47 | 47.336.764.022,47 | (4.726.385.397,00) |
| PENGELUARAN DAERAH | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | - |
| Penyertaan Modal | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - |
| Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo | 92.000.000,00 | 91.387.284,80 | (612.715,20) |
| Penguturan Modal | 1.064.500.000,00 | 1.064.500.000,00 | - |
| Pemberian Pinjaman/Dana Takungan | | | |
| Jumlah Pengeluaran | 5.156.500.000,00 | 5.155.887.284,80 | (612.715,20) |
| PEMBIAYAAN NETTO | 46.906.649.419,47 | 42.180.876.737,67 | (4.725.772.681,80) |
| SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN | 1.360.616.015,00 | 31.642.817.407,99 | 30.282.201.392,99 |

Wates, 20 Juli 2007
BUPATI KULON PROGO

H. TOYO SANTOSO DIPO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Auditan)

| NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SELISIH |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| A. PENDAPATAN | | | | |
| 1. Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 32.750.000.000,00 | 37.979.313.374,32 | (5.229.313.374,32) | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 33.405.992.000,00 | 34.867.831.814,83 | (1.461.839.814,83) | |
| Pendapatan dr Kekayaan yg dipisah | 3.372.204.050,00 | 5.048.288.039,65 | (1.676.083.989,65) | |
| Lain-lain PAD yang sah | 6.264.124.280,00 | 12.814.661.888,60 | (6.550.537.608,60) | |
| Jumlah PAD | 75.792.320.330,00 | 90.710.095.117,40 | (14.917.774.787,40) | |
| 2. Pendapatan Transfer | | | | |
| Transfer Pemerintah Pusat | | | | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 35.500.000.000,00 | 49.208.735.240,00 | (13.708.735.240,00) | |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 0,00 | 302.636.208,00 | (302.636.208,00) | |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 0,00 | 0,00 | - | |
| Dana Alokasi Umum | 485.397.000.000,00 | 485.397.000.000,00 | - | |
| Dana Alokasi Khusus | 25.800.000.000,00 | 25.860.000.000,00 | (60.000.000,00) | |
| | 546.697.000.000,00 | 560.768.371.448,00 | (14.071.371.448,00) | |
| Transfer Pemerintah Propinsi | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 31.800.000.000,00 | 49.531.420.688,89 | (17.731.420.688,89) | |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 0,00 | 1.919.693.500,00 | (1.919.693.500,00) | |
| | 31.800.000.000,00 | 51.451.114.188,89 | (19.651.114.188,89) | |
| Jumlah Pendapatan Transfer | 578.497.000.000,00 | 612.219.485.636,89 | (33.722.485.636,89) | |
| 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 0,00 | 0,00 | - | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 654.289.320.330,00 | 702.929.580.754,29 | (48.640.260.424,29) | |
| B. BELANJA | | | | |
| 1. Belanja Operasi | | | | |
| Belanja Pegawai | 427.336.430.419,00 | 370.635.197.503,86 | 56.701.232.915,14 | |
| Belanja Barang | 121.768.601.808,60 | 107.746.047.883,74 | 14.022.553.924,86 | |
| Belanja Bunga | 143.619.653,94 | 143.619.653,94 | - | |
| Belanja Subsidi | 0,00 | - | - | |
| Belanja Hibah | 0,00 | - | - | |
| Belanja Sosial | 37.037.050.200,00 | 34.050.335.606,00 | 2.986.714.594,00 | |
| Jumlah Belanja Operasi | 586.285.702.081,54 | 512.575.200.647,54 | 73.710.501.434,00 | |

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2. Belanja Modal | | | |
| Belanja Tanah | 8.254.062,500,00 | 2.320.424,892,00 | 5.933.637,608,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 17.520.046,250,00 | 12.150.118,637,00 | 5.369.927,613,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 60.423.574,390,00 | 50.609.104,970,01 | 9.814.469,419,99 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 19.599.040,550,00 | 14.310.185,299,00 | 5.288.855,251,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 7.267.063,850,00 | 1.032.739,500,00 | 6.234.324,350,00 |
| Belanja Aset Lainnya | 0,00 | - | - |
| Jumlah Belanja Modal | 113.063.787,540,00 | 80.422.573,298,01 | 32.641.214.241,99 |
| 3. Belanja Tak Terduga | | | |
| Belanja Tak Terduga | 4.000.000.000,00 | 3.748.417.382,00 | 251.582.618,00 |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | 4.000.000.000,00 | 3.748.417.382,00 | 251.582.618,00 |
| JUMLAH BELANJA | 703.349.489.621,54 | 596.746.191.327,55 | 106.603.298.293,99 |
| C. TRANSFER | | | |
| Transfer Bagi Hasil Ke Desa | | | |
| Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 13.370.650.000,00 | 13.019.217.200,00 | 351.432.800,00 |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | - | - |
| Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa | 13.370.650.000,00 | 13.019.217.200,00 | 351.432.800,00 |
| JUMLAH TRANSFER | 13.370.650.000,00 | 13.019.217.200,00 | 351.432.800,00 |
| JUMLAH BELANJA & TRANSFER | 716.720.139.621,54 | 609.765.408.527,55 | 106.954.731.093,99 |
| SURPLUS/DEFISIT | (62.430.819.291,54) | 93.164.172.226,74 | (155.594.991.518,28) |
| D. PEMBIAYAAN | | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | | | |
| Penggunaan SiLPA | 51.689.560.066,48 | 51.691.306.850,48 | (1.746.784,00) |
| Pinjaman Dalam Negeri | 20.079.004.150,52 | - | 20.079.004.150,52 |
| Penerimaan Kembali Pinjaman | 0,00 | - | - |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 71.768.564.217,00 | 51.691.306.850,48 | 20.077.257.366,52 |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.200.000.000,00 | 5.200.000.000,00 | - |
| Penguatan Modal | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman ke P. Pus | 137.744.925,40 | 137.744.925,40 | - |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 9.337.744.925,40 | 9.337.744.925,40 | - |
| PEMBIAYAAN NETTO | 62.430.819.291,60 | 42.353.561.925,08 | 20.077.257.366,52 |
| SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,06 | 135.517.734.151,82 | (135.517.734.151,82) |

Sleman, Juni 2007

BUPATI SLEMAN

Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006

| NO | URAIAN | APBD 2006 | | |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------|
| | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | (%) |
| A | PENDAPATAN | | | |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 42.678.850.000,00 | 43.997.150.025,00 | 103,09 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 25.028.663.530,00 | 24.704.781.396,00 | 98,71 |
| 3 | Pendapatan Bagian Laba Usaha Daerah | 6.885.906.000,00 | 7.722.505.202,62 | 112,15 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 20.664.074.470,00 | 19.995.019.680,90 | 96,76 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 95.257.494.000,00 | 96.419.456.304,52 | 101,22 |
| II | PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN | | | |
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 28.890.203.091,00 | 40.145.140.985,00 | 138,96 |
| 2 | Dana Alokasi Umum | 316.832.000.000,00 | 316.832.000.000,00 | 100,00 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus | 4.800.000.000,00 | 4.800.000.000,00 | 100,00 |
| 4 | Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi | 53.342.919.168,00 | 35.373.712.961,12 | 66,31 |
| | Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan | 403.865.122.259,00 | 397.150.853.946,12 | 98,34 |
| III | PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH | | | |
| 1 | Bantuan Dana Kontinjenensi/Penyeimbang dari Pemerintah | - | - | - |
| 2 | Dana Penyesuaian Ad Hoc | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 100,00 |
| 3 | Hibah | 11.202.353.000,00 | 10.451.927.071,00 | 93,30 |
| | Jumlah Pendapatan Lain-lain yang sah | 26.202.353.000,00 | 25.451.927.071,00 | 97,14 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 525.324.969.259,00 | 519.022.237.321,64 | 98,80 |
| B | BELANJA | | | |
| I | BELANJA APARATUR DAERAH | | | |
| 1 | Belanja Administrasi Umum | 43.174.324.789,00 | 36.737.618.808,30 | 85,09 |
| 2 | Belanja Operasi dan Pemeliharaan | 20.004.284.464,00 | 17.833.888.429,00 | 89,15 |
| 3 | Belanja Modal / Pembangunan | 3.382.189.140,00 | 3.294.805.480,00 | 97,42 |
| | Jumlah Belanja Aparatur Daerah | 66.560.798.393,00 | 57.866.312.717,30 | 86,94 |
| II | BELANJA PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1 | Belanja Administrasi Umum | 289.580.297.710,00 | 238.144.704.482,00 | 82,24 |
| 2 | Belanja Operasi dan Pemeliharaan | 63.431.326.526,00 | 55.504.444.118,00 | 87,50 |
| 3 | Belanja Modal / Pembangunan | 100.031.802.300,00 | 76.107.251.594,00 | 76,08 |
| 4 | Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan | 64.356.241.495,00 | 59.411.518.162,00 | 92,32 |
| 5 | Belanja Tak Tersangka | 25.881.685.000,00 | 9.734.745.979,00 | 37,61 |
| | Jumlah Belanja Pelayanan Publik | 543.281.353.031,00 | 438.902.664.335,00 | 80,79 |
| | JUMLAH BELANJA | 609.842.151.424,00 | 496.768.977.052,30 | 81,46 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (84.517.182.165,00) | 22.253.260.269,34 | (26,33) |
| C | PEMBIAYAAN | | | |
| I | PENERIMAAN | | | |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | 76.983.970.898,00 | 76.983.970.898,15 | 100,00 |
| 2 | Transfer dari Dana Cadangan | - | - | - |
| 3 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi | 17.920.000.000,00 | - | - |
| 4 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan | - | - | - |
| 5 | Hibah | - | - | - |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 94.903.970.898,00 | 76.983.970.898,15 | 81,12 |

| NO | URAIAN | APBD 2006 | | |
|----|---|--------------------------|----------------------------|----------------|
| | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | (%) |
| II | PENGELUARAN | | | |
| 1 | Transfer Ke Dana Cadangan | - | - | - |
| 2 | Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | 5.093.766.520,00 | 5.083.766.520,00 | 99,80 |
| 3 | Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah | 2.492.258.116,00 | 2.245.004.321,52 | 90,08 |
| 4 | Pemberian Piutang Daerah | 1.375.000.000,00 | 1.298.000.000,00 | 94,40 |
| 5 | Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan | 1.425.764.097,00 | 90.610.460.325,97 | 6.355,22 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 10.386.788.733,00 | 99.237.231.167,49 | 955,42 |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | 84.517.182.165,00 | (22.253.260.269,34) | (26,33) |

Walikota Yogyakarta

H. Herry Zudianto



KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007
(AUDITAN)

| NO. | URAIAN | Jumlah (Rp.) | | lebih/kurang dari Anggaran (Rp.) | |
|-----|--|--------------|-------------------------------|--|---------------------|
| | | Ref | Anggaran setelah perubahan | Realisasi | |
| A | PENDAPATAN | 521 | 693.827.536.928,60 | 727.836.911.979,62 | 34.009.375.051,02 |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1) | 46.240.676.769,60 | 57.229.726.493,62 | 10.989.049.724,02 |
| 1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | | 8.104.466.000,00 | 10.191.535.467,00 | 2.087.069.467,00 |
| 1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | | 27.329.701.674,00 | 30.808.408.803,00 | 3.478.707.129,00 |
| 1.3 | Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah | | 2.881.430.036,63 | 3.014.646.125,98 | 133.216.089,35 |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | 7.925.079.058,97 | 13.215.136.097,64 | 5.290.057.038,67 |
| 2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2) | 639.246.432.229,00 | 657.789.977.586,00 | 18.543.545.357,00 |
| 2.1 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | | 593.244.921.429,00 | 602.943.019.186,00 | 9.698.097.757,00 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | | 20.939.913.829,00 | 28.902.601.269,00 | 7.962.687.440,00 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak bukan pajak (SDA) | | 303.007.600,00 | 2.038.417.917,00 | 1.735.410.317,00 |
| | Dana Alokasi Umum | | 524.293.000.000,00 | 524.293.000.000,00 | - |
| | Dana Alokasi Khusus | | 47.709.000.000,00 | 47.709.000.000,00 | - |
| 2.2 | Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | | 17.500.000.000,00 | 22.142.804.400,00 | 4.642.804.400,00 |
| | Dana Otonomi Khusus | | - | - | - |
| | Dana Penyesuaian | | 17.500.000.000,00 | 22.142.804.400,00 | 4.642.804.400,00 |
| 2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | | 28.501.510.800,00 | 32.704.154.000,00 | 4.202.643.200,00 |
| | Pendapatan bagi Hasil Pajak | | 28.501.510.800,00 | 32.704.154.000,00 | 4.202.643.200,00 |
| | Pendapatan bagi Hasil Lainnya | | - | - | - |
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 3) | 8.340.427.930,00 | 12.817.207.900,00 | 4.476.779.970,00 |
| 3.1 | Pendapatan Hibah | | 250.000.000,00 | 450.250.000,00 | 200.250.000,00 |
| 3.2 | Pendapatan Dana Darurat | | - | - | - |
| 3.3 | Pendapatan Lainnya | | 8.090.427.930,00 | 12.366.957.900,00 | 4.276.529.970,00 |
| B | BELANJA | 522 | 763.254.947.189,05 | 676.835.481.623,06 | (86.419.465.565,99) |
| 1 | BELANJA OPERASI | 1) | 634.824.347.227,97 | 569.369.236.435,06 | (65.455.110.792,91) |
| 1.1 | Belanja Pegawai | | 467.041.631.050,00 | 423.004.092.327,00 | (44.037.538.723,00) |
| 1.2 | Belanja Barang | | 94.970.889.096,00 | 79.397.675.863,00 | (15.573.213.233,00) |
| 1.3 | Belanja Bunga | | 120.145.200,00 | 106.417.530,06 | (13.727.669,94) |
| 1.4 | Belanja Subsidi | | - | - | - |
| 1.5 | Belanja Hibah | | - | - | - |
| 1.6 | Belanja Bantuan Sosial | | 46.283.315.746,97 | 42.957.998.215,00 | (3.325.317.531,97) |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | 26.408.366.135,00 | 23.903.052.500,00 | (2.505.313.635,00) |
| 2 | BELANJA MODAL | 2) | 124.544.141.850,00 | 105.464.206.588,00 | (19.079.935.262,00) |
| 2.1 | Belanja Tanah | | 15.140.225.000,00 | 13.851.330.400,00 | (1.288.894.600,00) |
| 2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | | 18.057.248.750,00 | 16.842.861.403,00 | (1.214.387.347,00) |
| 2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | | 45.905.208.000,00 | 31.978.797.300,00 | (13.926.410.700,00) |
| 2.4 | Belanja jalan, irigasi dan jaringan | | 37.952.308.100,00 | 35.454.012.985,00 | (2.498.295.115,00) |
| 2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | | 7.489.152.000,00 | 7.337.204.500,00 | (151.947.500,00) |
| 2.6 | Belanja Aset Lainnya | | - | - | - |
| 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3) | 2.013.014.511,08 | 546.492.000,00 | (1.466.522.511,08) |
| 3.1 | Belanja tidak terduga | | 2.013.014.511,08 | 546.492.000,00 | (1.466.522.511,08) |

| NO. | URAIAN | Jumlah (Rp.) | | lebih/ kurang dari Anggaran (Rp.) |
|-----|--|--------------|-------------------------------|---|
| | | Ref | Anggaran setelah perubahan | |
| 4 | TRANSFER | | 1.873.443.600,00 | 1.455.546.600,00 |
| 4.1 | TRANSFER BAGI HSL KE KAB/KOTA/DESA | 4) | 1.873.443.600,00 | 1.455.546.600,00 |
| | Bagi Hasil Pajak | | 1.296.125.600,00 | 1.062.572.600,00 |
| | Bagi Hasil Retribusi | | 577.318.000,00 | 392.974.000,00 |
| | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | - | - |
| | | | | - |
| | Surplus/ (Defisit) | | (69.427.410.260,45) | 51.001.430.356,56 |
| | | | | 120.428.840.617,01 |
| C | PEMBIAYAAN | 523 | | |
| 1 | PENERIMAAN DAERAH | 1) | 88.468.641.260,45 | 88.468.641.260,85 |
| 1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | | 88.468.641.260,45 | 88.468.641.260,85 |
| 1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | - | - |
| 1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | | - | - |
| 1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | - | - |
| 1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | - | - |
| 1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | - | - |
| 2 | PENGELUARAN DAERAH | 2) | 19.041.231.000,00 | 19.756.301.722,82 |
| 2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | - | - |
| 2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | 18.926.000.000,00 | 19.641.071.046,56 |
| 2.3 | Pembayaran Pokok Hutang | | 115.231.000,00 | 115.230.676,26 |
| 2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | - | - |
| | | | | - |
| | Pembiayaan Neto | | 69.427.410.260,45 | 68.712.339.538,03 |
| | | | | (715.070.722,42) |
| | Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | - | 119.713.769.894,59 |
| | | | | 119.713.769.894,59 |

Bantul, 24 Juni 2008
BUPATI BANTUL

DRS. H.M. IDHAM SAMAWI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

| NOMOR | URAJAN | REALISASI 2007 | REALISASI | |
|-------------|--|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | % | 2006 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | | | |
| 1.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | |
| 1.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 5.105.382.324,00 | 128,47 | 3.389.990.508,00 |
| 1.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah | 15.093.480.315,00 | 108,43 | 18.327.422.191,00 |
| 1.1.3. | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.401.288.012,52 | 141,25 | 1.608.249.564,82 |
| 1.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 6.278.205.894,59 | 238,27 | 6.475.373.984,85 |
| | Jumlah Pendapatan Asli daerah | 28.878.356.546,15 | 129,92 | 29.801.036.248,67 |
| 1.2. | PENDAPATAN TRANSFER | | | |
| 1.2.1. | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | | | |
| 1.2.1.1. | Dana Bagi Hasil Pajak | 23.316.204.134,00 | 115,17 | 20.190.168.913,00 |
| 1.2.1.2. | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 308.712.307,00 | | 308.198.080,00 |
| 1.2.1.3. | Dana Alokasi Umum | 459.851.000.000,00 | 100,00 | 432.868.000.000,00 |
| 1.2.1.4. | Dana Alokasi Khusus | 49.167.000.000,00 | 100,00 | 29.080.000.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan | 532.642.916.441,00 | 100,55 | 482.446.366.993,00 |
| 1.2.2. | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | | |
| 1.2.2.1. | Dana Otonomi Khusus | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.2.2. | Dana Penyesuaian | 5.392.553.400,00 | | 0,00 |
| | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 5.392.553.400,00 | | 0,00 |
| 1.2.3. | Transfer Pemerintah Provinsi | | | |
| 1.2.3.1. | Pendapatan Bagi Hasil pajak | 21.412.246.700,00 | 126,04 | 14.075.011.296,46 |
| 1.2.3.2. | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 0,00 | | 0,00 |
| | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 21.412.246.700,00 | 126,04 | 14.075.011.296,46 |
| | Total Pendapatan Transfer | 559.447.716.541,00 | 102,33 | 495.521.378.289,46 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | |
| 1.3.1. | Pendapatan Hibah | 13.175.000.000,00 | 164,69 | 0,00 |
| 1.3.2. | Pendapatan Dana Darurat | 1.144.049.949,00 | | 0,00 |
| 1.3.3. | Pendapatan Lainnya | 500.000,00 | | 1.029.813.790,00 |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah | 14.319.549.949,00 | 178,99 | 1.029.813.790,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 602.645.623.036,15 | 104,46 | 527.352.228.328,13 |
| 2 | BELANJA | | | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 322.053.623.342,20 | 93,08 | 265.703.997.891,27 |
| 2.1.2. | Belanja Barang | 77.890.095.599,00 | 84,07 | 76.301.286.477,25 |
| 2.1.3. | Belanja Bunga | 76.390.552,14 | 99,21 | 84.649.601,75 |
| 2.1.4. | Belanja Subsidi | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.5. | Belanja Hibah | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.6. | Belanja Bantuan Sosial | 26.840.849.150,00 | 119,90 | 0,00 |
| | Jumlah Belanja Operasi | 426.860.918.643,34 | 92,57 | 342.089.993.970,27 |
| 2.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 2.2.1. | Belanja Tanah | 7.059.339.500,00 | 60,63 | 12.573.644.996,00 |
| 2.2.2. | Belanja Peralatan dan Mesin | 16.039.153.826,00 | 91,10 | 12.569.911.680,00 |
| 2.2.3. | Belanja Gedung dan Bangunan | 43.242.061.515,00 | 94,74 | 44.663.919.825,00 |
| 2.2.4. | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 40.628.790.648,00 | 93,61 | 44.909.121.986,00 |
| 2.2.5. | Belanja Aset Tetap Lainnya | 10.602.618.200,00 | 88,26 | 398.879.850,00 |
| 2.2.6. | Belanja Aset Lainnya | 0,00 | | 0,00 |

| | Jumlah Belanja Modal | 117.571.963.699,00 | 90,23 | 115.105.478.337,00 |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA | | | | |
| 2.3.1 Belanja Tidak Terduga | 1.856.345.000,00 | 38,54 | 4.751.095.000,00 | |
| | Jumlah Belanja Tidak Terduga | 1.856.345.000,00 | 38,54 | 4.751.095.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 546.289.227.332,34 | 91,62 | 461.946.507.307,27 |
| 2.4 TRANSFER | | | | |
| 2.4.1 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | | | | |
| 2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak | 915.871.000,00 | 99,49 | 0,00 | |
| 2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi | 1.376.540.000,00 | 0,00 | 493.766.891,03 | |
| 2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 27.100.112.533,00 | 95,86 | 41.184.331.867,00 | |
| | Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa | 29.394.524.033,00 | 98,13 | 41.678.098.758,03 |
| | Jumlah Belanja dan Transfer | 575.683.751.365,34 | 91,94 | 503.624.606.065,30 |
| | SURPLUS/DEFISIT | 26.961.871.670,81 | | 23.727.622.262,83 |
| 3 PEMBIAYAAN | | | | |
| 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 48.303.272.190,77 | 100,00 | 29.674.726.838,20 | |
| 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 3.858.426.450,00 | 97,99 | 0,00 | |
| | Jumlah Penerimaan | 52.191.698.640,77 | 99,85 | 29.674.726.838,20 |
| 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.2 Penyetoran Modal (Investasi) | 2.330.000.000,00 | 100,00 | 5.000.000.000,00 | |
| 3.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman | 69.326.910,00 | 100,00 | 99.076.910,26 | |
| 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | | 0,00 | |
| | Jumlah Pengeluaran | 2.399.326.910,00 | 100,00 | 5.069.076.910,26 |
| | PEMBIAYAAN NETO | 49.792.371.730,77 | | 24.575.649.927,94 |
| | Sisa Lebih Pembayaran Anggaran | 76.754.243.401,58 | | 48.303.272.190,77 |



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

| PER HITUNGAN ANGGARAN | 2007 | | Lebih/Kurang Realisasi | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | Anggaran Rp | Realisasi Rp | | |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak daerah | 3.148.025.000,00 | 3.366.877.168,76 | 218.852.168,76 | |
| Pendapatan Retribusi daerah | 20.585.388.800,00 | 22.355.637.683,00 | 1.770.248.883,00 | |
| Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.331.533.869,00 | 3.805.164.956,58 | (526.368.912,42) | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 7.279.431.882,00 | 9.110.153.695,00 | 1.830.721.813,00 | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 35.344.379.551,00 | 38.637.833.503,34 | 3.293.453.952,34 | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN | | | | |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 18.780.798.746,00 | 20.928.278.545,37 | 2.147.479.799,37 | |
| Dana Alokasi Umum | 374.760.000.000,00 | 378.145.129.800,00 | 3.385.129.800,00 | |
| Dana Alokasi Khusus | 42.119.000.000,00 | 42.156.538.164,00 | 37.538.164,00 | |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA | | | | |
| Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang – Pusat | 13.500.000.000,00 | 12.150.000.000,00 | (1.350.000.000,00) | |
| TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI | | | | |
| dari Propinsi | 21.928.312.300,00 | 29.331.209.200,00 | 7.402.896.900,00 | |
| Jumlah Pendapatan Transfer | | | | |
| Total Pendapatan Transfer | 471.088.111.046,00 | 482.711.155.709,37 | 11.623.044.663,37 | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| Pendapatan Hibah | 275.130.000,00 | 107.110.000,00 | (168.020.000,00) | |
| Dana Darurat | - | - | - | |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | - | 1.481.714.397,95 | 1.481.714.397,95 | |
| Pen. Kelebihan Pembyrn PPh Pasal 21 Gaji PNS | - | - | - | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 275.130.000,00 | 1.588.824.397,95 | 1.313.694.397,95 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 506.707.620.597,00 | 522.937.813.610,66 | 16.230.193.013,66 | |
| BELANJA | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | |
| Belanja Pegawai/Personalia | 309.067.121.690,00 | 292.800.835.972,37 | 16.266.285.717,63 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 82.079.186.397,00 | 74.605.437.192,00 | 7.473.749.205,00 | |
| Bunga | 108.000.000,00 | 95.258.147,34 | 12.741.852,66 | |
| Subsidi | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | - | |
| Hibah | 1.229.500.000,00 | 1.229.500.000,00 | - | |
| Bantuan Sosial | 7.997.000.000,00 | 7.573.782.525,00 | 423.217.475,00 | |
| Bantuan Keuangan | 22.932.146.345,00 | 22.421.441.155,00 | 510.705.190,00 | |
| Jumlah Belanja Operasional | 423.582.954.432,00 | 398.896.254.991,71 | 24.686.699.440,29 | |

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| BELANJA MODAL | | | |
| Belanja Tanah | 9.060.762,120,00 | 5.809.120.550,00 | 3.251.641.570,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 23.539.970,070,00 | 20.521.396.705,00 | 3.018.573.365,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 37.263.928,265,00 | 30.170.542.500,00 | 7.093.385.765,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 39.360.064,025,00 | 36.284.808.529,00 | 3.075.255.496,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 2.557.961.000,00 | 940.985.818,00 | 1.616.975.182,00 |
| Jumlah Belanja Modal | 111.782.685.480,00 | 93.726.854.102,00 | 18.055.831.378,00 |
| BELANJA TAK TERDUGA | | | |
| Belanja Tak Terduga | 2.284.305.486,00 | 216.998.000,00 | 2.067.307.486,00 |
| Jumlah Belanja Tak terduga | 2.284.305.486,00 | 216.998.000,00 | 2.067.307.486,00 |
| JUMLAH BELANJA | 537.649.945.398,00 | 492.840.107.093,71 | 44.809.838.304,29 |
| TRANSFER | | | |
| TRANSFER BAGI HASIL KE DESA | | | |
| Bagi Hasil Pajak/Retribusi | - | - | - |
| Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | - | - | - |
| Bantuan Keuangan untuk Instansi | - | - | - |
| Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa | - | - | - |
| Jumlah Transfer | - | - | - |
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 537.649.945.398,00 | 492.840.107.093,71 | 44.809.838.304,29 |
| SURPLUS/DEFISIT | (30.942.324.801,00) | 30.097.706.516,95 | (28.579.645.290,63) |
| PEMBIAYAAN | | | |
| PENERIMAAN DAERAH | | | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | 30.678.427.823,50 | 30.664.700.323,50 | 13.727.500,00 |
| Pencairan dari dana cadangan | - | - | - |
| Penerimaan pinjaman dan obligasi | - | - | - |
| Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan | - | - | - |
| Penerimaan Piutang | 8.489.246.977,50 | 2.854.313.374,00 | 5.634.933.603,50 |
| Jumlah Penerimaan | 39.167.674.801,00 | 33.519.013.697,50 | 5.648.661.103,50 |
| PENGELUARAN DAERAH | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - |
| Penyertaan Modal | 5.783.000.000,00 | 5.783.000.000,00 | - |
| Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo | 92.000.000,00 | 91.387.284,80 | 612.715,20 |
| Penguatan Modal | 2.350.350.000,00 | 2.350.350.000,00 | - |
| Pemberian Pinjaman/Dana Talangan | - | - | - |
| Jumlah Pengeluaran | 8.225.350.000,00 | 8.224.737.284,80 | 612.715,20 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 30.942.324.801,00 | 25.294.276.412,70 | 5.648.048.388,30 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | - | 55.391.982.929,65 | (55.391.982.929,65) |



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007

(Audit)

(dalam rupiah)

| NO. | URAIAN | Ref. | ANGGARAN | REALISASI | SELISIH |
|----------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| A. PENDAPATAN | | | | | |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | V.5.2.a.1) | 42.000.000.000,00 | 50.287.665.731,91 | (8.287.665.731,91) |
| | Pendapatan Pajak Daerah | | 39.299.207.160,00 | 40.965.628.030,57 | (1.666.420.870,57) |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | | 5.634.323.740,00 | 5.732.297.630,18 | (97.973.890,18) |
| | Pendapatan dr kekayaan yg Dipisahkan | | 7.962.915.820,00 | 23.670.957.328,34 | (15.708.041.508,34) |
| | Lain-lain PAD yang sah | | | | |
| | Jumlah PAD | | 94.896.446.720,00 | 120.656.548.721,00 | (25.760.102.001,00) |
| 2 | Pendapatan Transfer | V.5.2.a.2(a) | | | |
| a. | Transfer Pemerintah Pusat_ Dana Perimbangan | | 62.079.000.000,00 | 68.345.288.361,00 | (6.266.288.361,00) |
| | Dana Bagi Hasil Pajak & Non Pajak | | 543.065.000.000,00 | 543.065.000.000,00 | 0,00 |
| | Dana Alokasi Umum | | 10.151.000.000,00 | 10.151.000.000,00 | 0,00 |
| | Dana Alokasi Khusus | | 8.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | 0,00 |
| | Dana Penyes & Otonomi Khusus | | 0,00 | 5.613.532.600,00 | (5.613.532.600,00) |
| | Bant Keu dr Pempus untuk Pendidikan | | | | |
| | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat | | 623.295.000.000,00 | 635.174.820.961,00 | (11.879.820.961,00) |
| b. | Transfer Pemerintah Propinsi | V.5.2.a.2(b) | | | |
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop & Pemda Lainnya | | 48.924.981.600,00 | 52.201.913.300,00 | (3.276.931.700,00) |
| | Bantuan Keu dr Prop atau Pemda Lainnya | | 8.600.000.000,00 | 12.799.500.000,00 | (4.199.500.000,00) |
| | Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi | | 57.524.981.600,00 | 65.001.413.300,00 | (7.476.431.700,00) |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | V.5.2.a.3(a) | | | |
| | Pendapatan Hibah | | 0,00 | 2.062.081.450,00 | (2.062.081.450,00) |
| | Penerimaan kompensasi PPh | | | 2.109.321.660,00 | (2.109.321.660,00) |
| | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | | 0,00 | 4.171.403.110,00 | (4.171.403.110,00) |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | 775.716.428.320,00 | 825.004.186.092,00 | (49.287.757.772,00) |
| B. BELANJA | | | | | |
| 1 | Belanja Operasi | V.5.2.b.1 | | | |
| | Belanja Pegawai/Personalia | | 533.823.068.952,22 | 468.668.466.025,00 | 65.154.602.927,22 |
| | Belanja Barang | | 117.576.601.333,60 | 98.462.427.536,50 | 19.114.173.797,10 |
| | Belanja Bunga | | 144.000.000,00 | 136.590.831,64 | 7.409.168,36 |
| | Belanja Subsidi | | 7.750.204.585,00 | 7.743.887.439,00 | 6.317.146,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | | 48.511.290.033,80 | 39.938.343.865,00 | 8.572.946.168,80 |
| | Jumlah Belanja Operasi | | 707.805.164.904,62 | 614.949.715.697,14 | 92.855.449.207,48 |
| 2 | Belanja Modal | V.5.2.b.2 | | | |
| | Belanja Tanah | | 28.551.406.400,00 | 12.219.081.813,00 | 16.332.324.587,00 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | 29.346.454.450,00 | 22.030.162.300,00 | 7.316.292.150,00 |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | 60.326.995.979,00 | 50.763.440.056,86 | 9.563.555.922,14 |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 27.558.190.883,00 | 23.012.501.691,00 | 4.545.689.192,00 |

| NO. | URAIAN | Ref. | ANGGARAN | REALISASI | SELISIH |
|-----|---|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 | Belanja Aset Tetap Lainnya | V.5.2.b.3 | 7.450.725.150,00 | 1.535.008.240,12 | 5.915.716.909,88 |
| | Jumlah Belanja Modal | | 153.233.772.862,00 | 109.560.194.100,98 | 43.673.578.761,02 |
| | Belanja Tidak Terduga | | 7.933.301.990,00 | 0,00 | 7.933.301.990,00 |
| | JUMLAH BELANJA | | 868.972.239.756,62 | 724.509.909.798,12 | 144.462.329.958,50 |
| | 4 Transfer | | | | |
| | Transfer Bagi Hasil ke Desa | | 18.803.945.253,20 | 18.615.842.894,24 | 188.102.358,96 |
| | Blj Bg Hsl kpd Prop/Kab/Kota & Pemdes | | 9.062.420.000,00 | 8.988.223.200,00 | 74.196.800,00 |
| | Blj Bant Keu kpd Prop/Kab/Kota & Pemdes | | 27.866.365.253,20 | 27.604.066.094,24 | 262.299.158,96 |
| | Jumlah Transfer | | | | |
| | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | | 896.838.605.009,82 | 752.113.975.892,36 | 144.724.629.117,46 |
| D. | SURPLUS/DEFISIT | V.5.2.c. | (121.122.176.689,82) | 72.890.210.199,64 | (194.012.386.889,46) |
| | PEMBIAYAAN | | | | |
| | 1 Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| | SilPA Tahun Sebelumnya | | 135.517.734.154,82 | 135.517.734.151,82 | 3,00 |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pengembalian Piutang | | 0,00 | 1.750.823.200,00 | (1.750.823.200,00) |
| | Kompensasi Pajak Penghasilan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | 135.517.734.154,82 | 137.268.557.351,82 | (1.750.823.197,00) |
| | 2 Pengeluaran Pembiayaan | V.5.2.d.2) | | | |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemda | | 9.750.000.000,00 | 9.750.000.000,00 | 0,00 |
| | Pembayaran Pokok Utang | | 138.000.000,00 | 137.744.928,40 | 255.071,60 |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 | 0,00 |
| | Restitusi | | 7.557.465,00 | 7.557.465,00 | 0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | 14.395.557.465,00 | 14.395.302.393,40 | 255.071,60 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | V.5.2.e | 121.122.176.689,82 | 122.873.254.958,42 | (1.751.078.268,60) |
| | SILPA | | 0,00 | 195.763.465.158,06 | (195.763.465.158,06) |
| | | | | | |

Sleman, 15 Juli 2008

BUPATI SLEMAN,

Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007

| NO. | URAIAN | Jumlah | | Lebih/Kurang dari Anggaran (Rp) |
|----------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PENDAPATAN | | | |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 49,274,000,000,00 | 54,783,202,892,00 | 5,509,202,892,00 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 29,092,692,000,00 | 29,197,466,013,00 | 104,774,013,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 8,799,505,000,00 | 8,783,239,359,78 | (16,265,640,22) |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 16,996,685,000,00 | 21,334,442,677,53 | 4,337,757,677,53 |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 104,162,882,000,00 | 114,098,350,942,31 | 9,935,468,942,31 |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | | | |
| 1.2.1 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 49,705,420,217,00 | 46,842,560,104,00 | (2,862,860,113,00) |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 553,060,454,00 | 486,664,434,00 | (66,396,020,00) |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 365,042,000,000,00 | 365,042,000,000,00 | - |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 26,788,000,000,00 | 26,788,000,000,00 | - |
| | Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan | 442,088,480,671,00 | 439,159,224,538,00 | (2,929,256,133,00) |
| 1.2.2 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA | | | |
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | - | - | - |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | - | 2,917,756,400,00 | 2,917,756,400,00 |
| | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | - | 2,917,756,400,00 | 2,917,756,400,00 |
| 1.2.3 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | - | - | - |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | - | - |
| | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi | - | - | - |
| | Total Pendapatan Transfer | 442,088,480,671,00 | 442,076,980,938,00 | (11,499,733,00) |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 4,988,769,000,00 | 6,288,730,100,00 | 1,299,961,100,00 |
| 1.3.2 | Pendapatan Dana Darurat | - | - | - |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 43,849,620,300,00 | 53,184,790,500,00 | 9,335,170,200,00 |
| | Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 48,838,389,300,00 | 59,473,520,600,00 | 10,635,131,300,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 595,089,751,971,00 | 615,648,852,480,31 | 20,559,100,509,31 |
| 2 | BELANJA | | | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 392,723,577,238,00 | 332,205,140,033,00 | (60,518,437,205,00) |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 102,454,936,051,00 | 85,667,260,473,00 | (16,787,675,578,00) |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 707,120,555,00 | 707,120,553,55 | (1,45) |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 307,192,000,00 | 306,876,000,00 | (316,000,00) |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | - | - | - |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 62,875,796,994,00 | 57,696,628,060,00 | (5,179,168,934,00) |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | - | - | - |
| | Jumlah Belanja Operasi | 559,068,622,838,00 | 476,583,025,119,55 | (82,485,597,718,45) |
| 2.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 4,435,310,000,00 | 4,092,326,400,00 | (342,983,600,00) |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 12,413,938,825,00 | 11,067,578,735,00 | (1,346,360,090,00) |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 59,117,570,922,00 | 50,951,282,032,00 | (8,166,288,890,00) |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 22,991,214,744,00 | 22,307,082,701,00 | (684,132,943,00) |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 1,387,060,000,00 | 1,252,832,300,00 | (134,227,700,00) |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | 320,700,000,00 | 311,294,000,00 | (9,406,000,00) |
| | Jumlah Belanja Modal | 100,665,794,491,00 | 89,982,396,168,00 | (10,683,398,323,00) |

| NO. | URAIAN | Jumlah | | Lebih/Kurang dari Anggaran (Rp) |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 3.1 | Belanja Tidak Terduga | 23,546,970,746,00 | 2,554,951,274,41 | (20,992,019,471,59) |
| | Jumlah Tidak Terduga | 23,546,970,746,00 | 2,554,951,274,41 | (20,992,019,471,59) |
| 2.4 | TRANSFER | | | |
| 2.4.1 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | | | |
| 2.4.2 | Bagi Hasil Pajak | - | - | - |
| 2.4.3 | Bagi Hasil Retribusi | - | - | - |
| 2.4.4 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | - | - |
| | Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa | - | - | - |
| | JUMLAH BELANJA | 683,281,388,075,00 | 569,120,372,561,96 | (114,161,015,513,04) |
| | SURPLUS/DEFISIT | (88,191,636,104,00) | 46,528,479,918,35 | 134,720,116,022,35 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan SiLPA | 90,610,460,326,00 | 90,610,460,325,97 | (0,03) |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | - | - | - |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | - |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri | 90,610,460,326,00 | 90,610,460,325,97 | (0,03) |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | - | - | - |
| 3.2.3 | Pencairan Pokok Utang | 958,824,222,00 | 958,824,221,52 | (0,48) |
| 3.2.4 | Pencairan Pinjaman Daerah | 1,460,000,000,00 | 1,412,000,000,00 | (48,000,000,00) |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 2,418,824,222,00 | 2,370,824,221,52 | (48,000,000,48) |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 88,191,636,104,00 | 88,239,636,104,45 | 48,000,000,45 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | - | 134,768,116,022,80 | 134,768,116,022,80 |

Yogyakarta, 30 Juni 2008

Walikota Yogyakarta

H. Herry Zudianto

| APBD Tahun 2009 | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| Daerah | Kab. Bantul | Kab. Gunung Kidul | Kota Yogyakarta | |
| PENDAPATAN | Rp 882.149.788.430 | Rp 711.953.527.994 | Rp 749.989.016.367 | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rp 88.691.362.690 | Rp 38.455.406.172 | Rp 161.473.838.210 | |
| Pendapatan Pajak Daerah | Rp 14.108.451.479 | Rp 6.875.766.083 | Rp 71.852.539.011 | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | Rp 58.205.951.445 | Rp 21.690.642.796 | Rp 23.497.748.962 | |
| Pendapatan Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 7.512.838.195 | Rp 5.200.730.811 | Rp 10.218.454.601 | |
| Lain-lain PAD yang sah | Rp 8.864.121.572 | Rp 4.688.266.482 | Rp 55.905.095.636 | |
| PENDAPATAN TRANSFER | Rp 755.798.547.739 | Rp 655.216.626.822 | Rp 574.257.953.157 | |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | Rp 668.488.989.539 | Rp 609.362.836.722 | Rp 517.366.876.957 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | Rp 44.254.423.902 | Rp 28.862.596.605 | Rp 66.433.124.320 | |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | Rp 97.422.637 | Rp 764.932.117 | Rp 97.422.637 | |
| Dana Alokasi Umum | Rp 568.502.143.000 | Rp 508.212.308.000 | Rp 414.345.330.000 | |
| Dana Alokasi Khusus | Rp 55.635.000.000 | Rp 71.523.000.000 | Rp 36.491.000.000 | |
| TRANSFER PEM. PUSAT - LAINNYA | Rp 48.172.499.300 | Rp 22.370.625.000 | Rp 10.831.673.400 | |
| Dana Otonomi Khusus | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Dana Penyesuaian | Rp 48.172.499.300 | Rp 22.370.625.000 | Rp 10.831.673.400 | |
| TRANSFER PEMPROV | Rp 39.137.058.900 | Rp 23.483.165.100 | Rp 46.059.402.800 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Rp 39.137.058.900 | Rp 23.483.165.100 | Rp 46.059.402.800 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | Rp 37.659.878.000 | Rp 18.281.495.000 | Rp 14.257.225.000 | |
| Pendapatan Hibah | Rp 68.100.000 | Rp 18.281.495.000 | Rp 144.825.000 | |
| Pendapatan Dana Darurat | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Pendapatan Lainnya | Rp 37.591.778.000 | Rp - | Rp 14.112.400.000 | |
| BELANJA | Rp 899.804.171.129 | Rp 652.368.106.697 | Rp 783.851.692.760 | |
| BELANJA OPERASI | Rp 792.019.021.918 | Rp 557.392.233.795 | Rp 695.351.653.001 | |
| Belanja Pegawai | Rp 560.830.196.490 | Rp 462.231.695.650 | Rp 461.189.796.523 | |
| Belanja Barang | Rp 118.719.979.086 | Rp 68.963.385.843 | Rp 141.474.807.279 | |
| Bunga | Rp 78.962.221 | Rp 59.872.452 | Rp 459.221.795 | |
| Subsidi | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Hibah | Rp 29.718.902.000 | Rp 1.382.413.750 | Rp 49.915.246.350 | |
| Bantuan Sosial | Rp 82.670.982.121 | Rp 24.754.866.100 | Rp 42.312.581.054 | |
| BELANJA MODAL | Rp 107.353.190.571 | Rp 93.848.247.302 | Rp 86.735.745.636 | |
| Belanja Tanah | Rp 1.265.320.800 | Rp 569.580.000 | Rp 2.466.745.100 | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | Rp 16.897.162.231 | Rp 11.144.307.100 | Rp 16.396.567.920 | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | Rp 43.274.719.225 | Rp 58.775.210.220 | Rp 40.267.206.366 | |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 44.001.821.635 | Rp 22.859.026.862 | Rp 24.566.338.000 | |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | Rp 1.914.166.680 | Rp 500.123.120 | Rp 1.972.323.000 | |
| Belanja Aset Lainnya | Rp - | Rp - | Rp 1.066.565.250 | |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp 431.958.640 | Rp 1.127.625.600 | Rp 1.764.294.123 | |
| Belanja Tak Terduga | Rp 431.958.640 | Rp 1.127.625.600 | Rp 1.764.294.123 | |
| TRANSFER | Rp 3.962.829.300 | Rp 41.876.698.264 | Rp - | |
| Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa | Rp 3.361.925.800 | Rp 2.975.452.014 | Rp - | |
| Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa | Rp 600.903.500 | Rp - | Rp - | |
| Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp 38.901.246.250 | Rp - | |
| Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp - | Rp - | |
| SURPLUS/(DEFISIT) | Rp (17.654.382.699) | Rp 59.585.421.297 | Rp (33.862.676.393) | |
| PEMBIAYAAN | Rp 82.661.134.609 | Rp 39.958.484.276 | Rp 132.059.409.743 | |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 84.776.365.285 | Rp 41.464.603.686 | Rp 143.752.738.195 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | Rp 84.776.365.285 | Rp 39.957.654.436 | Rp 143.562.038.074 | |
| Pencairan dana cadangan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp - | Rp - | Rp 50.000.000 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp - | Rp 1.477.846.000 | Rp - | |
| Penerimaan Piutang Daerah | Rp - | Rp 29.103.250 | Rp 140.700.121 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 2.115.230.676 | Rp 1.506.119.410 | Rp 11.693.328.452 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp - | Rp - | Rp 5.000.000.000 | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Rp 2.000.000.000 | Rp 1.400.000.000 | Rp 5.500.000.000 | |
| Pembayaran Pokok Utang | Rp 115.230.676 | Rp 106.119.410 | Rp 1.193.328.452 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) | Rp 65.006.751.909 | Rp 99.543.905.573 | Rp 98.196.733.350 | |

| APBD 2009 | | | |
|--|--------------------|----------------------|--|
| Daerah | Kab. Kulon Progo | Kab. Sleman | |
| PENDAPATAN | Rp 596.428.928.201 | Rp 996.182.714.692 | |
| BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rp 39.358.629.412 | Rp 157.231.267.812 | |
| Pajak Daerah | Rp 3.549.894.569 | Rp 71.044.731.107 | |
| Retribusi Daerah | Rp 5.918.692.238 | Rp 54.719.438.556 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 5.208.953.134 | Rp 9.973.164.267 | |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Rp 24.681.089.471 | Rp 21.493.933.882 | |
| DANA PERIMBANGAN | Rp 494.268.843.933 | Rp 717.703.169.280 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp 24.788.201.933 | Rp 93.869.391.280 | |
| Dana Alokasi Umum | Rp 413.081.642.000 | Rp 587.857.778.000 | |
| Dana Alokasi Khusus | Rp 56.399.000.000 | Rp 35.976.000.000 | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Rp 62.801.454.856 | Rp 121.248.277.600 | |
| Pendapatan Hibah | Rp 13.035.824.000 | Rp 120.770.000 | |
| Dana Darurat | Rp - | Rp - | |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp 21.644.186.200 | Rp 68.062.049.000 | |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp 15.608.541.000 | Rp 36.573.458.600 | |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp 12.366.000.000 | Rp 16.492.000.000 | |
| Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp 146.903.656 | Rp - | |
| Dana Insentif Daerah | Rp - | Rp - | |
| BELANJA | Rp 577.736.996.100 | Rp 1.016.026.601.135 | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp 444.766.627.124 | Rp 672.286.269.327 | |
| BELANJA PEGAWAI | Rp 373.009.926.556 | Rp 556.313.854.101 | |
| BELANJA BUNGA | Rp 73.480.857 | Rp 102.458.157 | |
| BELANJA SUBSIDI | Rp 122.260.000 | Rp 10.189.618.480 | |
| BELANJA HIBAH | Rp 41.711.851.796 | Rp 19.401.387.158 | |
| BELANJA BANTUAN SOSIAL | Rp 7.006.025.838 | Rp 46.289.247.223 | |
| BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH | Rp 1.178.075.077 | Rp 20.517.574.208 | |
| BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH | Rp 21.252.930.000 | Rp 19.472.130.000 | |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | Rp 412.077.000 | Rp - | |
| BELANJA LANGSUNG | Rp 132.970.368.976 | Rp 343.740.331.809 | |
| BELANJA PEGAWAI | Rp 29.155.721.815 | Rp 80.293.674.749 | |
| BELANJA BARANG DAN JASA | Rp 63.004.170.636 | Rp 147.599.744.505 | |
| BELANJA MODAL | Rp 40.810.476.525 | Rp 115.846.912.555 | |
| SURPLUS/DEFISIT | Rp 18.691.932.101 | Rp (19.843.886.444) | |
| PEMBIAYAAN | Rp 26.677.363.614 | Rp 183.969.512.983 | |
| Penerimaan Daerah | Rp 34.141.233.435 | Rp 213.907.757.912 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | Rp 30.014.963.020 | Rp 213.907.757.912 | |
| Pencairan dana cadangan | Rp - | Rp - | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Piutang Daerah | Rp 4.126.270.415 | Rp - | |
| Pengeluaran Daerah | Rp 7.463.869.821 | Rp 29.938.244.928 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp - | Rp - | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Rp 3.552.000.000 | Rp 23.200.000.000 | |
| Pembayaran Pokok Utang | Rp 2.811.869.821 | Rp 137.744.928 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | Rp 1.100.000.000 | Rp 6.600.500.000 | |
| Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp - | Rp - | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga | Rp - | Rp - | |
| Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) | Rp 45.369.295.714 | Rp 164.125.626.540 | |



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(AUDITED)

| Uraian | Anggaran 2009 Rp | Realisasi 2009 Rp | Bertambah/ Berkurang Rp | % | Realisasi 2008 Rp |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| PENDAPATAN | | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 66.969.000.000,00 | 71.852.539.011,00 | 4.883.539.011,00 | 107,29% | 62.452.770.490,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 22.158.537.725,00 | 23.497.748.962,00 | 1.339.211.237,00 | 106,04% | 34.940.602.210,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.159.369.381,00 | 10.218.454.601,27 | 59.085.220,27 | 100,58% | 8.454.823.854,45 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 46.159.491.000,00 | 55.905.095.635,68 | 9.745.604.635,68 | 121,11% | 26.583.374.960,27 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 145.446.398.106,00 | 161.473.838.209,95 | 16.027.440.103,95 | 111,02% | 132.431.571.514,72 |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | | | | | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 71.042.879.869,00 | 66.433.124.320,00 | (4.609.755.549,00) | 93,51% | 61.081.198.662,00 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 249.280.000,00 | 97.422.637,00 | (151.857.363,00) | 39,08% | 164.724.201,00 |
| Dana Alokasi Umum | 414.345.330.000,00 | 414.345.330.000,00 | - | 100,00% | 411.257.232.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 36.491.000.000,00 | 36.491.000.000,00 | - | 100,00% | 32.238.000.000,00 |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 522.128.489.869,00 | 517.366.876.957,00 | (4.761.612.912,00) | 99,09% | 504.741.154.863,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | - | - | - | - | - |
| Dana Penyesuaian | 929.264.600,00 | 1.010.123.400,00 | 80.858.800,00 | 108,70% | 1.904.295.999,00 |
| Dana Tunjangan Pendidikan | - | 9.821.550.000,00 | 9.821.550.000,00 | - | 3.235.932.000,00 |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 929.264.600,00 | 10.831.673.400,00 | 9.902.408.800,00 | 1165,62% | 5.140.227.999,00 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 46.059.402.500,00 | 46.059.402.800,00 | 300,00 | 100,00% | 43.333.111.500,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | - | - | - | - |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 46.059.402.500,00 | 46.059.402.800,00 | 300,00 | 100,00% | 43.333.111.500,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer | 569.117.156.969,00 | 574.257.953.157,00 | 5.140.796.188,00 | 100,90% | 553.214.494.362,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | | |
| Pendapatan Hibah | 144.825.000,00 | 144.825.000,00 | - | 100,00% | 20.332.060.000,00 |
| Pendapatan Dana Darurat | - | - | - | - | 962.407.471,00 |
| Pendapatan Lainnya | 14.112.400.000,00 | 14.112.400.000,00 | - | 100,00% | 13.312.400.000,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | 14.257.225.000,00 | 14.257.225.000,00 | - | 100,00% | 34.606.867.471,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 728.820.780.075,00 | 749.989.016.366,95 | 21.168.236.291,95 | 102,90% | 720.252.933.347,72 |
| BELANJA | | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | | |
| Belanja Pegawai | 490.280.089.021,00 | 461.189.796.523,00 | (29.090.292.498,00) | 94,07% | 428.171.470.769,60 |
| Belanja Barang | 165.888.063.878,00 | 141.474.807.279,00 | (24.413.256.599,00) | 85,28% | 90.700.730.390,14 |
| Belanja Bunga | 459.221.795,00 | 459.221.794,86 | (0,14) | 100,00% | 579.027.616,04 |
| Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| Belanja Hibah | 51.671.837.850,00 | 49.915.246.350,00 | (1.756.591.500,00) | 96,60% | 22.180.860.900,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 45.130.701.000,00 | 42.312.581.054,00 | (2.818.119.946,00) | 93,76% | 49.587.684.559,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | - | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Operasi | 753.429.913.544,00 | 695.351.653.000,86 | (58.078.260.543,14) | 92,29% | 591.219.774.234,78 |
| BELANJA MODAL | | | | | |
| Belanja Tanah | 2.778.225.000,00 | 2.466.745.100,00 | (311.479.900,00) | 88,79% | 6.208.586.469,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 18.282.226.305,00 | 16.396.567.920,00 | (1.885.658.385,00) | 89,69% | 17.216.376.442,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 44.308.444.680,00 | 40.267.206.365,80 | (4.041.238.314,20) | 90,88% | 54.477.308.400,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 25.360.646.700,00 | 24.566.338.000,00 | (794.308.700,00) | 96,87% | 28.135.315.700,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 2.378.796.000,00 | 1.972.323.000,00 | (406.473.000,00) | 82,91% | 998.186.175,00 |
| Belanja Aset Lainnya | 1.478.000.000,00 | 1.066.565.250,00 | (411.434.750,00) | 72,16% | 250.288.700,00 |
| Jumlah Belanja Modal | 94.586.338.685,00 | 86.735.745.635,80 | (7.850.593.049,20) | 91,70% | 107.286.061.886,00 |

| Uraian | Anggaran 2009 Rp | Realisasi 2009 Rp | Bertambah/ Berkurang Rp | % | Realisasi 2008 Rp |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| BELANJA TAK TERDUGA | | | | | |
| Belanja Tak Terduga | 12.958.513.622,00 | 1.764.294.123,00 | (11.194.219.499,00) | 13,61% | 60.828.000,00 |
| <i>Jumlah Belanja Tak Terduga</i> | 12.958.513.622,00 | 1.764.294.123,00 | (11.194.219.499,00) | 13,61% | 60.828.000,00 |
| TRANSFER | | | | | |
| Transfer/Bagi Hasil ke Desa | | | | | |
| Bagi Hasil Pajak | - | - | | | - |
| Bagi Hasil Retribusi | - | - | | | - |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | - | | | - |
| <i>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i> | - | - | | | - |
| JUMLAH BELANJA | 860.974.765.851,00 | 783.851.692.759,66 | (77.123.073.091,34) | 91,04% | 698.566.664.120,78 |
| SURPLUS/DEFISIT | | | | | |
| | (132.153.985.776,00) | (33.862.676.392,71) | 98.291.309.383,29 | 25,62% | 21.686.269.226,94 |
| PEMBIAYAAN | | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | | |
| Penggunaan SiLPA TA 2008 | 143.597.315.073,00 | 143.562.038.073,54 | (35.276.999,46) | 99,98% | 134.768.116.022,80 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | | | - |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | | | - |
| Pinjaman Dalam Negeri | - | - | | | - |
| Penerimaan Kembali Pinjaman | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | (50.000.000,00) | 50,00% | - |
| Penerimaan Piutang Daerah | 150.000.000,00 | 140.700.121,00 | (9.299.879,00) | 93,80% | 125.892.112,00 |
| <i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i> | 143.847.315.073,00 | 143.752.738.194,54 | (94.576.878,46) | 99,93% | 134.894.008.134,80 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | - | 100,00% | - |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.500.000.000,00 | 5.500.000.000,00 | - | 100,00% | 12.000.000.000,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 1.193.329.297,00 | 1.193.328.451,86 | (845,14) | 100,00% | 982.962.288,20 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | | | - |
| <i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i> | 11.693.329.297,00 | 11.693.328.451,86 | (845,14) | 100,00% | 12.982.962.288,20 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 132.153.985.776,00 | 132.059.409.742,68 | (94.576.033,32) | 99,93% | 121.911.045.846,60 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA 2009 | - | 98.196.733.349,97 | 98.196.733.349,97 | | 143.597.315.073,54 |

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

| APBD 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--|
| Uraian | Kab. Bantul | Kab. Gunung Kidul | Kab. Kulon Progo | Kab. Sleman | Kota Yogyakarta | |
| Pendapatan | Rp 986.894 | Rp 798.249 | Rp 633.089 | Rp 1.095.629 | Rp 815.496 | |
| PAD | Rp 81.637 | Rp 42.542 | Rp 48.281 | Rp 163.056 | Rp 179.424 | |
| Pajak daerah | Rp 16.541 | Rp 5.949 | Rp 4.310 | Rp 80.612 | Rp 78.255 | |
| Retribusi daerah | Rp 15.978 | Rp 25.080 | Rp 7.728 | Rp 59.111 | Rp 32.215 | |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp 7.425 | Rp 4.732 | Rp 4.741 | Rp 10.170 | Rp 11.031 | |
| Lain-lain PAD yang sah | Rp 41.692 | Rp 6.782 | Rp 31.502 | Rp 13.165 | Rp 57.923 | |
| Pendapatan Transfer | Rp 749.631 | Rp 723.266 | Rp 566.488 | Rp 909.887 | Rp 614.973 | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | Rp 688.677 | Rp 633.692 | Rp 485.094 | Rp 740.198 | Rp 484.628 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | Rp 54.599 | Rp 34.689 | Rp 29.324 | Rp 104.362 | Rp 73.460 | |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | Rp - | Rp 135 | Rp 2.862 | Rp 2.668 | Rp 2.125 | |
| Dana alokasi umum | Rp 573.512 | Rp 521.294 | Rp 411.294 | Rp 563.321 | Rp 395.444 | |
| Dana alokasi khusus | Rp 60.566 | Rp 77.574 | Rp 41.614 | Rp 69.847 | Rp 13.599 | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | Rp 18.396 | Rp 64.102 | Rp 57.617 | Rp 84.453 | Rp 81.354 | |
| Dana Otonomi Khusus | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Dana Penyesuaian | Rp 18.396 | Rp 64.102 | Rp 57.617 | Rp 84.453 | Rp 81.354 | |
| Transfer Pemerintah Provinsi | Rp 42.559 | Rp 25.472 | Rp 23.776 | Rp 85.236 | Rp 48.991 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Rp 42.559 | Rp 25.472 | Rp 23.776 | Rp 73.869 | Rp 48.991 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 11.367 | Rp - | |
| Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp 155.626 | Rp 32.440 | Rp 18.320 | Rp 22.685 | Rp 21.099 | |
| Pendapatan Hibah | Rp 17.196 | Rp 14.430 | Rp 8.920 | Rp 20.785 | Rp 13.849 | |
| Pendapatan Dana Darurat | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Pendapatan Lainnya | Rp 138.429 | Rp 18.010 | Rp 9.400 | Rp 1.900 | Rp 7.250 | |
| Belanja | Rp 1.010.581 | Rp 722.211 | Rp 610.930 | Rp 1.093.347 | Rp 839.866 | |
| Belanja Operasi | Rp 883.984 | Rp 674.653 | Rp 564.187 | Rp 989.131 | Rp 784.517 | |
| Belanja Pegawai | Rp 689.823 | Rp 576.372 | Rp 461.489 | Rp 755.838 | Rp 559.147 | |
| Belanja Barang | Rp 114.323 | Rp 69.125 | Rp 66.695 | Rp 182.640 | Rp 159.120 | |
| Belanja Bunga | Rp 65 | Rp 52 | Rp 63 | Rp 78 | Rp 380 | |
| Belanja Subsidi | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Belanja Hibah | Rp 17.408 | Rp 9.246 | Rp 8.044 | Rp 18.414 | Rp 30.531 | |
| Belanja Bantuan sosial | Rp 32.613 | Rp 19.859 | Rp 8.001 | Rp 32.162 | Rp 35.340 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | Rp 29.752 | Rp - | Rp 19.897 | Rp - | Rp - | |
| Belanja Modal | Rp 123.249 | Rp 47.001 | Rp 46.582 | Rp 99.812 | Rp 54.040 | |
| Tanah | Rp - | Rp 2.251 | Rp 4.179 | Rp 70 | Rp 4.287 | |
| Peralatan dan Mesin | Rp - | Rp 14.809 | Rp 11.217 | Rp 25.940 | Rp 14.322 | |
| Gedung dan Bangunan | Rp - | Rp 10.804 | Rp 6.517 | Rp 31.752 | Rp 22.849 | |
| Jalan, irigasi dan jaringan | Rp - | Rp 18.984 | Rp 24.646 | Rp 29.450 | Rp 11.046 | |
| Aset tetap lainnya | Rp - | Rp 153 | Rp 23 | Rp 12.600 | Rp 1.297 | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Aset lainnya | Rp 123.249 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 240 | |
| Belanja tidak terduga | Rp 3.347 | Rp 557 | Rp 161 | Rp 4.404 | Rp 1.310 | |
| Belanja tidak terduga | Rp 3.347 | Rp 557 | Rp 161 | Rp 4.404 | Rp 1.310 | |
| Transfer | Rp 1.776 | Rp 42.979 | Rp 1.973 | Rp 38.255 | Rp - | |
| Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp 1.648 | Rp 580 | Rp - | Rp - | |
| Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp 1.492 | Rp 639 | Rp - | Rp - | |
| Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp 1.776 | Rp 39.839 | Rp - | Rp 19.529 | Rp - | |
| Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp - | Rp 754 | Rp 18.726 | Rp - | |
| Belanja dan Transfer | Rp 1.012.357 | Rp 765.190 | Rp 612.903 | Rp 1.131.602 | Rp 839.866 | |
| Pembiayaan | Rp 60.598 | Rp 57.222 | Rp 42.505 | Rp 147.387 | Rp 99.343 | |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 61.044 | Rp 59.308 | Rp 47.498 | Rp 164.126 | Rp 100.105 | |
| SiLPA TA sebelumnya | Rp 61.044 | Rp 57.667 | Rp 45.369 | Rp 164.126 | Rp 98.197 | |
| Pencairan dana cadangan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp - | Rp 1.640 | Rp 2.129 | Rp - | Rp 1.908 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 446 | Rp 2.085 | Rp 4.993 | Rp 16.738 | Rp 762 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Rp 281 | Rp 1.578 | Rp 4.902 | Rp 10.500 | Rp - | |
| Pembayaran Pokok Utang | Rp 115 | Rp 507 | Rp 91 | Rp 138 | Rp 762 | |
| Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp 50 | Rp - | Rp - | Rp 6.101 | Rp - | |
| Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(SETELAH KONVERSI)
(AUDITAN)

(dalam rupiah)

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2010 | REALISASI 2010 | | REALISASI 2009 | KET. |
|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------|
| | | | Rp | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PENDAPATAN | 1,096,899,222,057.99 | 1,095,628,887,559.93 | 99.88 | 996,182,714,691.84 | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 163,530,209,690.15 | 163,056,459,137.93 | 99.71 | 157,231,267,811.84 | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 75,969,096,600.00 | 80,611,542,955.52 | 106.11 | 71,044,731,106.66 | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 58,973,721,680.00 | 59,110,503,292.07 | 100.23 | 54,719,438,555.90 | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 10,448,161,337.99 | 10,169,824,623.38 | 97.34 | 9,973,164,266.92 | |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 18,139,230,072.16 | 13,164,588,266.96 | 72.58 | 21,493,933,882.36 | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 909,205,932,367.84 | 909,887,128,872.00 | 100.07 | 822,650,618,280.00 | |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 737,807,079,540.00 | 740,198,028,398.00 | 100.32 | 717,703,169,280.00 | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 102,354,729,965.00 | 104,361,867,117.00 | 101.96 | 93,771,968,643.00 | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | 2,284,157,575.00 | 2,667,969,281.00 | 116.80 | 97,422,637.00 | |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 563,320,892,000.00 | 563,320,892,000.00 | 100.00 | 587,857,778,000.00 | |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 69,847,300,000.00 | 69,847,300,000.00 | 100.00 | 35,976,000,000.00 | |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 86,168,469,000.00 | 84,453,294,000.00 | 98.01 | 20,393,400,000.00 | |
| 1.2.2.1 | Dana Turjangan Pendidikan | 86,168,469,000.00 | 84,453,294,000.00 | 98.01 | 20,393,400,000.00 | |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 85,230,383,827.84 | 85,235,806,474.00 | 100.01 | 84,554,049,000.00 | |
| 1.2.3.1 | Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya | 73,863,383,827.84 | 73,868,806,474.00 | 100.01 | 68,062,049,000.00 | |
| 1.2.3.2 | Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya | 11,367,000,000.00 | 11,367,000,000.00 | 100.00 | 16,492,000,000.00 | |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 24,163,080,000.00 | 22,685,299,550.00 | 93.88 | 16,300,828,600.00 | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 22,163,080,000.00 | 20,785,299,550.00 | 93.78 | 120,770,000.00 | |
| 1.3.2 | Dana Cukai Tembakau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285,611,600.00 | |
| 1.3.2 | Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,894,447,000.00 | |
| 1.3.6 | DPPIP | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 1.3.7 | DPPID | 1,000,000,000.00 | 900,000,000.00 | 90.00 | 0.00 | |
| 2 | BELANJA | 1,244,286,348,597.65 | 1,131,602,398,904.14 | 90.94 | 1,016,026,601,135.37 | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 1,072,860,038,694.49 | 989,131,133,924.33 | 92.20 | 860,189,984,372.37 | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai/Personalia | 801,509,598,773.49 | 755,838,243,854.94 | 94.30 | 636,607,528,849.82 | |
| 2.1.2 | Belanja Barang | 215,743,125,709.00 | 182,639,531,636.08 | 84.66 | 147,599,744,504.64 | |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 144,000,000.00 | 77,980,369.31 | 54.15 | 102,458,156.61 | |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,189,618,480.00 | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 20,280,011,487.00 | 18,413,622,487.00 | 90.80 | 19,401,387,158.00 | |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 35,183,302,725.00 | 32,161,755,577.00 | 91.41 | 46,289,247,223.30 | |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 126,792,132,400.00 | 99,812,269,370.81 | 78.72 | 115,846,912,555.00 | |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 150,000,000.00 | 69,802,625.00 | 46.54 | 2,446,529,845.00 | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 39,029,581,719.00 | 25,939,878,319.00 | 66.46 | 21,070,360,360.00 | |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 34,459,278,711.00 | 31,751,996,688.81 | 92.14 | 25,783,008,390.00 | |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 32,811,902,700.00 | 29,450,357,528.00 | 89.76 | 66,189,393,435.00 | |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 20,341,369,270.00 | 12,600,234,210.00 | 61.94 | 357,620,525.00 | |
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 4,404,158,474.92 | 4,404,090,314.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 4,404,158,474.92 | 4,404,090,314.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 2.4 | TRANSFER | 40,230,019,028.24 | 38,254,905,295.00 | 95.09 | 39,989,704,208.00 | |
| 2.4.1 | Transfer bagi Hasil ke Desa | 40,230,019,028.24 | 38,254,905,295.00 | 95.09 | 39,989,704,208.00 | |
| 2.4.1.1 | Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa | 19,528,558,295.24 | 19,528,558,295.00 | 100.00 | 20,517,574,208.00 | |
| 2.4.1.2 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa | 20,701,460,733.00 | 18,726,347,000.00 | 90.46 | 19,472,130,000.00 | |
| | Surplus/(Defisit) | (147,387,126,539.66) | (35,973,511,344.21) | 24.41 | (19,843,886,443.53) | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya | 164,125,626,539.66 | 164,125,626,539.66 | 100.00 | 213,907,757,911.59 | |
| | Jumlah | 164,125,626,539.66 | 164,125,626,539.66 | 100.00 | 213,907,757,911.59 | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal | 10,500,000,000.00 | 10,500,000,000.00 | 100.00 | 23,200,000,000.00 | |
| 3.2.4 | Pembayaran Pokok Utang | 1438,000,000.00 | 137,744,928.40 | 99.82 | 137,744,928.40 | |

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2010 | REALISASI 2010 | | REALISASI 2009 | KET. |
|-------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|------|
| | | | Rp | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.5 | Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal) | 6,100,500,000.00 | 6,100,500,000.00 | 100.00 | 6,600,500,000.00 | |
| | | 16,738,500,000.00 | 16,738,244,928.40 | 99.99 | 29,938,244,928.40 | |
| | Pembiayaan Netto | 147,387,126,539.66 | 147,387,381,611.26 | 100.00 | 183,969,512,983.19 | |
| | | 0.00 | 111,413,870,267.05 | 0.00 | 164,125,626,539.66 | |

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

| Uraian | Reff | Anggaran 2010 Rp | Realisasi 2010 Rp | % | Realisasi 2009 Rp |
|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| PENDAPATAN | 5.1.1 | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.1.1.1 | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.a | 75.200.000.000,00 | 78.254.579.242,00 | 104,06 | 71.852.539.011,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.b | 29.492.761.000,00 | 32.214.650.779,00 | 109,23 | 23.497.748.962,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.1.c | 11.031.304.700,00 | 11.031.304.700,40 | 100,00 | 10.218.454.601,27 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 5.1.1.1.d | 60.147.942.593,00 | 57.923.105.336,11 | 96,30 | 55.905.095.635,68 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | 175.872.008.293,00 | 179.423.640.057,51 | 102,02 | 161.473.838.209,95 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.2 | | | | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 5.1.1.2.a | | | | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.a.1) | 80.998.335.726,00 | 73.460.190.158,00 | 90,69 | 66.433.124.320,00 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.1.1.2.a.2) | 249.280.000,00 | 2.124.930.562,00 | 852,43 | 97.422.637,00 |
| Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.a.3) | 395.444.062.000,00 | 395.444.062.000,00 | 100,00 | 414.345.330.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 5.1.1.2.a.4) | 13.599.100.000,00 | 13.599.100.000,00 | 100,00 | 36.491.000.000,00 |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | | 490.290.777.726,00 | 484.628.282.720,00 | 98,85 | 517.366.876.957,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 5.1.1.2.b | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | 5.1.1.2.b.1) | - | - | - | - |
| Dana Penyesuaian | 5.1.1.2.b.2) | 83.003.370.525,00 | 81.353.699.000,00 | 98,01 | 1.010.123.400,00 |
| Dana Tunjangan Pendidikan | 5.1.1.2.b.3) | - | - | - | 9.821.550.000,00 |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat | | 83.003.370.525,00 | 81.353.699.000,00 | 98,01 | 10.831.673.400,00 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 5.1.1.2.c | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.c.1) | 48.986.880.441,00 | 48.991.022.874,00 | 100,01 | 46.059.402.800,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 5.1.1.2.c.2) | - | - | - | - |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | | 48.986.880.441,00 | 48.991.022.874,00 | 100,01 | 46.059.402.800,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer | | 622.281.028.692,00 | 614.973.004.594,00 | 98,83 | 574.257.953.157,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 5.1.1.3 | | | | |
| Pendapatan Hibah | 5.1.1.3.a | 12.649.280.000,00 | 13.849.280.000,00 | 109,49 | 144.825.000,00 |
| Pendapatan Dana Darurat | 5.1.1.3.b | - | - | - | - |
| Pendapatan Lainnya | 5.1.1.3.c | 7.250.000.000,00 | 7.250.000.000,00 | 100,00 | 14.112.400.000,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | | 19.899.280.000,00 | 21.099.280.000,00 | 106,03 | 14.257.225.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 818.052.316.985,00 | 815.495.924.651,51 | 99,69 | 749.989.016.366,95 |
| BELANJA | 5.1.2 | | | | |
| BELANJA OPERASI | 5.1.2.1 | | | | |
| Belanja Pegawai | 5.1.2.1.a | 584.733.466.519,00 | 559.146.974.048,00 | 95,62 | 461.189.796.523,00 |
| Belanja Barang | 5.1.2.1.b | 182.135.924.939,00 | 159.119.638.920,00 | 87,36 | 141.474.807.279,00 |
| Belanja Bunga | 5.1.2.1.c | 554.537.870,00 | 379.637.470,43 | 68,46 | 459.221.794,86 |
| Belanja Subsidi | 5.1.2.1.d | - | - | - | - |
| Belanja Hibah | 5.1.2.1.e | 31.026.861.150,00 | 30.530.575.535,00 | 98,40 | 49.915.246.350,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 5.1.2.1.f | 40.000.495.725,00 | 35.339.698.475,00 | 88,35 | 42.312.581.054,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 5.1.2.1.g | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Operasi | | 838.451.286.203,00 | 784.516.524.448,43 | 93,57 | 695.351.653.000,86 |
| BELANJA MODAL | 5.1.2.2 | | | | |
| Belanja Tanah | 5.1.2.2.a | 9.449.135.000,00 | 4.287.291.550,00 | 45,37 | 2.466.745.100,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.b | 20.010.850.392,00 | 14.321.567.817,00 | 71,57 | 16.396.567.920,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.c | 27.392.240.500,00 | 22.849.064.073,00 | 83,41 | 40.267.206.365,80 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5.1.2.2.d | 12.886.131.657,00 | 11.046.126.965,00 | 85,72 | 24.566.338.000,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.e | 5.461.402.700,00 | 1.296.757.800,00 | 23,74 | 1.972.323.000,00 |
| Belanja Aset Lainnya | 5.1.2.2.f | 522.164.300,00 | 239.624.000,00 | 45,89 | 1.066.565.250,00 |
| Jumlah Belanja Modal | | 75.721.924.549,00 | 54.040.432.205,00 | 71,37 | 86.735.745.635,80 |

| Uraian | Reff | Anggaran 2010 Rp | Realisasi 2010 Rp | % | Realisasi 2009 Rp |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.3 | | | | |
| Belanja Tak Terduga | | 2.880.959.428,00 | 1.309.524.008,00 | 45,45 | 1.764.294.123,00 |
| <i>Jumlah Belanja Tak Terduga</i> | | 2.880.959.428,00 | 1.309.524.008,00 | 45,45 | 1.764.294.123,00 |
| TRANSFER | 5.1.2.4 | | | | |
| <i>Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i> | | | | | |
| Bagi Hasil Pajak | | - | - | - | - |
| Bagi Hasil Retribusi | | - | - | - | - |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | - | - | - | - |
| <i>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i> | | - | - | - | - |
| JUMLAH BELANJA | | 917.054.170.180,00 | 839.866.480.661,43 | 91,58 | 783.851.692.759,66 |
| SURPLUS/DEFISIT | 5.1.2.5 | (99.001.853.195,00) | (24.370.556.009,92) | 24,62 | (33.862.676.392,71) |
| PEMBIAYAAN | 5.1.3 | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.1 | | | | |
| Penggunaan SiLPA TA 2009 | 5.1.3.1.a | 98.196.733.350,00 | 98.196.733.349,97 | 100,00 | 143.562.038.073,54 |
| Pencairan Dana Cadangan | | - | - | - | - |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | - | - | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri | | - | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Pinjaman | 5.1.3.1.b | 150.000.000,00 | 1.589.781.128,00 | 1.059,85 | 50.000.000,00 |
| Penerimaan Piutang Daerah | 5.1.3.1.c | 1.916.772.000,00 | 318.363.751,00 | 16,61 | 140.700.121,00 |
| <i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i> | | 100.263.505.350,00 | 100.104.878.228,97 | 99,84 | 143.752.738.194,54 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.2 | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 5.1.3.2.1) | - | - | - | 5.000.000.000,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.1.3.2.2) | 500.000.000,00 | - | - | 5.500.000.000,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - | 5.1.3.2.3) | 761.652.155,00 | 761.652.154,88 | 100,00 | 1.193.328.451,86 |
| Pemerintah Pusat | | - | - | - | - |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | - | - | - | - |
| <i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i> | | 1.261.652.155,00 | 761.652.154,88 | 60,37 | 11.693.328.451,86 |
| PEMBIAYAAN NETTO | | 99.001.853.195,00 | 99.343.226.074,09 | 100,34 | 132.059.409.742,68 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA 2010 | 5.1.3.3 | - | 74.972.670.064,17 | | 98.196.733.349,97 |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

| APBD 2011 (Dalam Jutaan Rupiah) | | | |
|---|------------------|--------------|--|
| Uraian | Kab. Kulon Progo | Kab. Sleman | |
| Pendapatan | Rp 791.827 | Rp 1.311.474 | |
| PAD | Rp 53.752 | Rp 226.723 | |
| Pajak daerah | Rp 5.854 | Rp 142.698 | |
| Retribusi daerah | Rp 8.451 | Rp 33.164 | |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp 4.936 | Rp 11.036 | |
| Lain-lain PAD yang sah | Rp 34.511 | Rp 39.825 | |
| Pendapatan Transfer | Rp 716.344 | Rp 1.062.766 | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | Rp 522.277 | Rp 753.889 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | Rp 29.592 | Rp 76.229 | |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | Rp 305 | Rp 3.089 | |
| Dana alokasi umum | Rp 444.044 | Rp 631.921 | |
| Dana alokasi khusus | Rp 48.337 | Rp 42.650 | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | Rp 164.558 | Rp 206.591 | |
| Dana Otonomi Khusus | Rp - | Rp 206.591 | |
| Dana Penyesuaian | Rp 164.558 | Rp - | |
| Transfer Pemerintah Provinsi | Rp 29.509 | Rp 102.285 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Rp 29.509 | Rp 94.205 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | Rp - | Rp 8.080 | |
| Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp 21.731 | Rp 21.985 | |
| Pendapatan Hibah | Rp 21.731 | Rp 21.985 | |
| Pendapatan Dana Darurat | Rp - | Rp - | |
| Pendapatan Lainnya | Rp - | Rp - | |
| Belanja | Rp 778.747 | Rp 1.238.719 | |
| Belanja Operasi | Rp 672.059 | Rp 1.142.119 | |
| Belanja Pegawai | Rp 520.609 | Rp 860.573 | |
| Belanja Barang | Rp 100.693 | Rp 214.563 | |
| Belanja Bunga | Rp 52 | Rp 62 | |
| Belanja Subsidi | Rp - | Rp - | |
| Belanja Hibah | Rp 16.841 | Rp 36.819 | |
| Belanja Bantuan sosial | Rp 11.347 | Rp 30.102 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | Rp 22.518 | Rp - | |
| Belanja Modal | Rp 105.605 | Rp 96.111 | |
| Tanah | Rp 5.366 | Rp 16.553 | |
| Peralatan dan Mesin | Rp 22.433 | Rp 12.746 | |
| Gedung dan Bangunan | Rp 25.784 | Rp 25.009 | |
| Jalan, irigasi dan jaringan | Rp 46.142 | Rp 41.563 | |
| Aset tetap lainnya | Rp 5.880 | Rp 241 | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp - | Rp - | |
| Aset lainnya | Rp - | Rp - | |
| Belanja tidak terduga | Rp 1.083 | Rp 489 | |
| Belanja tidak terduga | Rp 1.083 | Rp 489 | |
| Transfer | Rp 1.873 | Rp 39.336 | |
| Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa | Rp 968 | Rp 19.693 | |
| Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa | Rp 905 | Rp - | |
| Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp - | |
| Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp 19.643 | |
| Belanja dan Transfer | Rp 780.620 | Rp 1.278.055 | |
| Pembiayaan | Rp 59.563 | Rp 105.276 | |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 64.590 | Rp 111.414 | |
| SiLPA TA sebelumnya | Rp 62.691 | Rp 111.414 | |
| Pencairan dana cadangan | Rp - | Rp - | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp 1.899 | Rp - | |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 5.026 | Rp 6.138 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp - | Rp - | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Rp 4.935 | Rp 6.000 | |
| Pembayaran Pokok Utang | Rp 91 | Rp 138 | |
| Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp - | Rp - | |
| Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp - | Rp - | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | Rp - | Rp - | |

| APBD 2011 (Dalam Jutaan Rupiah) | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------------|--|--|
| Uraian | Kab. Bantul | Kab. Gunung Kidul | Kota Yogyakarta | | |
| Pendapatan | Rp 1.180.547 | Rp 965.826 | Rp 951.681 | | |
| PAD | Rp 128.896 | Rp 54.462 | Rp 228.871 | | |
| Pajak daerah | Rp 35.069 | Rp 8.130 | Rp 120.458 | | |
| Retribusi daerah | Rp 17.799 | Rp 11.384 | Rp 34.408 | | |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp 7.291 | Rp 4.259 | Rp 10.121 | | |
| Lain-lain PAD yang sah | Rp 68.738 | Rp 30.689 | Rp 63.883 | | |
| Dana Perimbangan | Rp 717.123 | Rp 667.005 | Rp 500.614 | | |
| DBH | Rp 46.143 | Rp 35.839 | Rp 62.722 | | |
| DAU | Rp 625.061 | Rp 572.009 | Rp 436.130 | | |
| DAK | Rp 45.919 | Rp 59.157 | Rp 1.762 | | |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 334.527 | Rp 244.359 | Rp 222.197 | | |
| Hibah | Rp - | Rp - | Rp 3.345 | | |
| Dana darurat | Rp - | Rp - | Rp - | | |
| Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya | Rp 53.144 | Rp 30.917 | Rp 60.273 | | |
| Dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp 102.331 | Rp 185.897 | Rp 125.374 | | |
| Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya | Rp 37.649 | Rp 27.545 | Rp - | | |
| Lain-lain | Rp 141.404 | Rp - | Rp 33.205 | | |
| Belanja | Rp 1.151.886 | Rp 938.850 | Rp 932.019 | | |
| Belanja Tidak Langsung | Rp 817.127 | Rp 687.032 | Rp 608.011 | | |
| Belanja Pegawai | Rp 723.599 | Rp 615.375 | Rp 515.296 | | |
| Belanja Bunga | Rp 52 | Rp 43 | Rp 235 | | |
| Belanja Subsidi | Rp - | Rp - | Rp - | | |
| Belanja Hibah | Rp 23.889 | Rp 9.387 | Rp 59.496 | | |
| Belanja Bantuan sosial | Rp 36.168 | Rp 16.454 | Rp 31.532 | | |
| Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | Rp 1.906 | Rp 3.181 | Rp - | | |
| Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes | Rp 30.447 | Rp 41.797 | Rp - | | |
| Belanja tidak terduga | Rp 1.066 | Rp 794 | Rp 1.453 | | |
| Belanja Langsung | Rp 334.759 | Rp 251.818 | Rp 324.007 | | |
| Belanja Pegawai | Rp 63.518 | Rp 36.052 | Rp 92.852 | | |
| Belanja Barang dan jasa | Rp 151.824 | Rp 104.745 | Rp 172.005 | | |
| Belanja Modal | Rp 119.417 | Rp 111.021 | Rp 59.151 | | |
| Pembiayaan Netto | Rp 30.993 | Rp 87.214 | Rp 75.782 | | |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 35.108 | Rp 91.877 | Rp 76.344 | | |
| SiLPA TA sebelumnya | Rp 35.108 | Rp 90.266 | Rp 74.973 | | |
| Pencairan dana cadangan | Rp - | Rp - | Rp - | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp - | Rp - | Rp - | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | Rp - | Rp - | Rp - | | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp - | Rp 1.611 | Rp 1.371 | | |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 4.115 | Rp 4.663 | Rp 562 | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp - | Rp - | Rp - | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Rp 4.000 | Rp 3.000 | Rp - | | |
| Pembayaran Pokok Utang | Rp 115 | Rp 86 | Rp 562 | | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | Rp - | Rp 1.578 | Rp - | | |
| Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp - | Rp - | Rp - | | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | Rp - | Rp - | Rp - | | |

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(AUDITED)

| Uraian | Anggaran 2011 Rp | Realisasi 2011 Rp | Bertambah/ Berkurang Rp | % | Realisasi 2010 Rp |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|
| PENDAPATAN | | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 101.349.000.000,00 | 120.457.515.127,00 | 19.108.515.127,00 | 118,85% | 78.254.579.242,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 31.725.760.317,00 | 34.408.438.184,00 | 2.682.677.867,00 | 108,46% | 32.214.650.779,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.121.339.863,00 | 10.121.339.866,01 | 3,01 | 100,00% | 11.031.304.700,40 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 60.642.117.706,00 | 63.883.266.468,58 | 3.241.148.762,58 | 105,34% | 57.923.105.336,11 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 203.838.217.886,00 | 228.870.559.645,59 | 25.032.341.759,59 | 112,28% | 179.423.640.057,51 |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | | | | | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 51.162.089.069,00 | 60.239.274.648,00 | 9.077.185.579,00 | 117,74% | 73.460.190.158,00 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 2.125.905.447,00 | 2.482.754.849,00 | 356.849.402,00 | 116,79% | 2.124.930.562,00 |
| Dana Alokasi Umum | 436.129.821.000,00 | 436.129.821.000,00 | - | 100,00% | 395.444.062.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 1.761.900.000,00 | 1.761.900.000,00 | - | 100,00% | 13.599.100.000,00 |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 491.179.715.516,00 | 500.613.750.497,00 | 9.434.034.981,00 | 101,92% | 484.628.282.720,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | - | - | - | - | - |
| Dana Penyesuaian | 125.374.128.480,00 | 125.374.128.480,00 | - | 100,00% | 81.353.699.000,00 |
| Dana Tunjangan Pendidikan | - | - | - | - | - |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 125.374.128.480,00 | 125.374.128.480,00 | - | 100,00% | 81.353.699.000,00 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 60.317.654.000,00 | 60.272.804.000,00 | (44.850.000,00) | 99,93% | 48.991.022.874,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | - | - | - | - |
| Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | 60.317.654.000,00 | 60.272.804.000,00 | (44.850.000,00) | 99,93% | 48.991.022.874,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer | 676.871.497.996,00 | 686.260.682.977,00 | 9.389.184.981,00 | 101,39% | 614.973.004.594,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | | |
| Pendapatan Hibah | 3.491.882.849,00 | 3.345.000.000,00 | (146.882.849,00) | 95,79% | 13.849.280.000,00 |
| Pendapatan Dana Darurat | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Lainnya | 33.780.500.000,00 | 33.205.190.000,00 | (575.310.000,00) | 98,30% | 7.250.000.000,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah | 37.272.382.849,00 | 36.550.190.000,00 | (722.192.849,00) | 98,06% | 21.099.280.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 917.982.098.731,00 | 951.681.432.622,59 | 33.699.333.891,59 | 103,67% | 815.495.924.651,51 |
| BELANJA | | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | | |
| Belanja Pegawai | 630.631.459.637,00 | 608.147.454.347,00 | (22.484.005.290,00) | 96,43% | 559.146.974.048,00 |
| Belanja Barang | 188.168.122.471,00 | 172.004.549.017,00 | (16.163.573.454,00) | 91,41% | 159.119.638.920,00 |
| Belanja Bunga | 235.378.950,00 | 235.378.946,03 | (3,97) | 100,00% | 379.637.470,43 |
| Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| Belanja Hibah | 66.911.634.085,00 | 59.495.647.781,00 | (7.415.986.304,00) | 88,92% | 30.530.575.535,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 33.056.803.116,00 | 31.531.674.575,00 | (1.525.128.541,00) | 95,39% | 35.339.698.475,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | - | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Operasi | 919.003.398.259,00 | 871.414.704.666,03 | (47.588.693.592,97) | 94,82% | 784.516.524.448,43 |
| BELANJA MODAL | | | | | |
| Belanja Tanah | 2.166.750.000,00 | 740.936.000,00 | (1.425.814.000,00) | 34,20% | 4.287.291.550,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 17.366.234.796,00 | 15.697.340.372,00 | (1.668.894.424,00) | 90,39% | 14.321.567.817,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 14.341.022.375,00 | 13.385.579.965,00 | (955.442.410,00) | 93,34% | 22.849.064.073,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 30.024.402.270,00 | 26.198.900.740,00 | (3.825.501.530,00) | 87,26% | 11.046.126.965,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 3.576.825.000,00 | 2.968.496.900,00 | (608.328.100,00) | 82,99% | 1.296.757.800,00 |
| Belanja Aset Lainnya | 309.483.940,00 | 159.857.100,00 | (149.626.840,00) | 51,65% | 239.624.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal | 67.784.718.381,00 | 59.151.111.077,00 | (8.633.607.304,00) | 87,26% | 54.040.432.205,00 |

| Uraian | Anggaran 2011 Rp | Realisasi 2011 Rp | Bertambah/ Berkurang Rp | % | Realisasi 2010 Rp |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|
| BELANJA TAK TERDUGA | | | | | |
| Belanja Tak Terduga | 4.000.000.000,00 | 1.452.691.600,00 | (2.547.308.400,00) | 36,32% | 1.309.524.008,00 |
| <i>Jumlah Belanja Tak Terduga</i> | 4.000.000.000,00 | 1.452.691.600,00 | (2.547.308.400,00) | 36,32% | 1.309.524.008,00 |
| TRANSFER | | | | | |
| Transfer/Bagi Hasil ke Desa | | | | | |
| Bagi Hasil Pajak | - | - | | | - |
| Bagi Hasil Retribusi | - | - | | | - |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | - | | | - |
| <i>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i> | - | - | | | - |
| JUMLAH BELANJA | 990.788.116.640,00 | 932.018.507.343,03 | (58.769.609.296,97) | 94,07% | 839.866.480.661,43 |
| SURPLUS/DEFISIT | (72.806.017.909,00) | 19.662.925.279,56 | 92.468.943.188,56 | -27,01% | (24.370.556.009,92) |
| PEMBIAYAAN | | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | | |
| Penggunaan SiLPA TA 2010 | 74.972.670.064,00 | 74.972.670.064,17 | 0,17 | 100,00% | 98.196.733.349,97 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | | | - |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | | - |
| Pinjaman Dalam Negeri | - | - | | | - |
| Penerimaan Kembali Pinjaman | 1.120.000.000,00 | 1.212.182.072,00 | 92.182.072,00 | 108,23% | 1.589.781.128,00 |
| Penerimaan Piutang Daerah | 275.000.000,00 | 159.282.041,00 | (115.717.959,00) | 57,92% | 318.363.751,00 |
| <i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i> | 76.367.670.064,00 | 76.344.134.177,17 | (23.535.886,83) | 99,97% | 100.104.878.228,97 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | | - |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 3.000.000.000,00 | - | (3.000.000.000,00) | 0,00% | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 561.652.155,00 | 561.652.154,86 | (0,14) | 100,00% | 761.652.154,88 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | | | - |
| <i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i> | 3.561.652.155,00 | 561.652.154,86 | (3.000.000.000,14) | 15,77% | 761.652.154,88 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 72.806.017.909,00 | 75.782.482.022,31 | 2.976.464.113,31 | 104,09% | 99.343.226.074,09 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA 2011 | - | 95.445.407.301,87 | 95.445.407.301,87 | | 74.972.670.064,17 |

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HARYADI SUYUTI

| APBD 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--|
| Uraian | Kab. Bantul | Kab. Gunung Kidul | Kab. Kulon Progo | Kab. Sleman | Kota Yogyakarta | |
| Pendapatan | Rp 1.337.571 | Rp 1.076.502 | Rp 882.587 | Rp 1.589.723 | Rp 1.157.579 | |
| PAD | Rp 166.598 | Rp 67.051 | Rp 74.029 | Rp 301.070 | Rp 338.284 | |
| Pajak daerah | Rp 51.768 | Rp 10.728 | Rp 8.448 | Rp 177.836 | Rp 207.703 | |
| Retribusi daerah | Rp 20.595 | Rp 19.667 | Rp 11.655 | Rp 34.035 | Rp 38.771 | |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp 8.184 | Rp 5.329 | Rp 6.765 | Rp 12.783 | Rp 11.497 | |
| Lain-lain PAD yang sah | Rp 86.050 | Rp 31.326 | Rp 47.160 | Rp 76.416 | Rp 80.313 | |
| Pendapatan Transfer | Rp 1.155.535 | Rp 995.903 | Rp 790.237 | Rp 1.281.708 | Rp 808.715 | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | Rp 885.352 | Rp 799.932 | Rp 612.420 | Rp 946.821 | Rp 602.310 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | Rp 49.865 | Rp 39.141 | Rp 35.583 | Rp 98.529 | Rp 56.908 | |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | Rp 4.172 | Rp 2.262 | Rp 353 | Rp 345 | Rp 2.450 | |
| Dana alokasi umum | Rp 768.035 | Rp 687.944 | Rp 531.104 | Rp 795.709 | Rp 536.467 | |
| Dana alokasi khusus | Rp 63.281 | Rp 70.584 | Rp 45.380 | Rp 52.237 | Rp 6.485 | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | Rp 205.720 | Rp 159.564 | Rp 143.946 | Rp 208.487 | Rp 139.338 | |
| Dana Otonomi Khusus | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Dana Penyesuaian | Rp 205.720 | Rp 159.564 | Rp 143.946 | Rp 208.487 | Rp 139.338 | |
| Transfer Pemerintah Provinsi | Rp 64.463 | Rp 36.407 | Rp 33.871 | Rp 126.401 | Rp 67.067 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Rp 64.463 | Rp 36.407 | Rp 33.871 | Rp 112.501 | Rp 67.067 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 13.900 | Rp - | |
| Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp 15.438 | Rp 13.549 | Rp 18.321 | Rp 6.945 | Rp 10.580 | |
| Pendapatan Hibah | Rp - | Rp 174 | Rp 18.321 | Rp 6.945 | Rp - | |
| Pendapatan Dana Darurat | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Pendapatan Lainnya | Rp 15.438 | Rp 13.375 | Rp - | Rp - | Rp 10.580 | |
| Belanja | Rp 1.280.929 | Rp 1.024.040 | Rp 879.479 | Rp 1.375.419 | Rp 1.023.803 | |
| Belanja Operasi | Rp 1.140.612 | Rp 859.480 | Rp 730.279 | Rp 1.241.689 | Rp 935.210 | |
| Belanja Pegawai | Rp 894.160 | Rp 734.394 | Rp 593.856 | Rp 979.254 | Rp 668.724 | |
| Belanja Barang | Rp 181.312 | Rp 113.301 | Rp 101.204 | Rp 203.245 | Rp 223.121 | |
| Belanja Bunga | Rp 38 | Rp 35 | Rp 41 | Rp 45 | Rp 119 | |
| Belanja Subsidi | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Belanja Hibah | Rp 14.952 | Rp 6.031 | Rp 5.808 | Rp 45.171 | Rp 39.430 | |
| Belanja Bantuan sosial | Rp 6.895 | Rp 5.719 | Rp 2.467 | Rp 13.975 | Rp 1.510 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | Rp 43.254 | Rp - | Rp 26.903 | Rp - | Rp 2.307 | |
| Belanja Modal | Rp 140.107 | Rp 164.361 | Rp 147.831 | Rp 132.536 | Rp 88.336 | |
| Tanah | Rp 1.723 | Rp 5.684 | Rp 2.462 | Rp 10.616 | Rp 1.320 | |
| Peralatan dan Mesin | Rp 30.385 | Rp 21.465 | Rp 24.117 | Rp 40.383 | Rp 24.677 | |
| Gedung dan Bangunan | Rp 36.129 | Rp 79.424 | Rp 34.554 | Rp 46.567 | Rp 28.930 | |
| Jalan, irigasi dan jaringan | Rp 63.582 | Rp 55.303 | Rp 83.520 | Rp 33.358 | Rp 30.568 | |
| Aset tetap lainnya | Rp 8.288 | Rp 2.484 | Rp 3.179 | Rp 1.612 | Rp 2.597 | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Aset lainnya | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 244 | |
| Belanja tidak terduga | Rp 210 | Rp 198 | Rp 1.370 | Rp 1.194 | Rp 257 | |
| Belanja tidak terduga | Rp 210 | Rp 198 | Rp 1.370 | Rp 1.194 | Rp 257 | |
| Transfer | Rp 1.949 | Rp 49.119 | Rp 2.211 | Rp 45.982 | Rp - | |
| Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa | Rp 1.201 | Rp 1.940 | Rp 1.080 | Rp 23.825 | Rp - | |
| Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa | Rp 748 | Rp 1.857 | Rp 1.131 | Rp - | Rp - | |
| Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp 45.321 | Rp - | Rp 22.157 | Rp - | |
| Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Belanja dan Transfer | Rp 1.282.878 | Rp 1.073.158 | Rp 881.690 | Rp 1.421.401 | Rp 1.023.803 | |
| Pembiayaan | Rp 49.415 | Rp 107.427 | Rp 66.478 | Rp 120.758 | Rp 90.746 | |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 62.687 | Rp 115.388 | Rp 72.791 | Rp 138.695 | Rp 96.108 | |
| SiLPA TA sebelumnya | Rp 59.581 | Rp 114.190 | Rp 70.770 | Rp 138.695 | Rp 95.445 | |
| Pencairan dana cadangan | Rp - | Rp - | Rp 2.022 | Rp - | Rp - | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp 3.106 | Rp 1.198 | Rp - | Rp - | Rp 663 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 13.271 | Rp 7.962 | Rp 6.313 | Rp 17.936 | Rp 5.362 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Rp 13.156 | Rp 6.500 | Rp 6.222 | Rp 17.799 | Rp 4.000 | |
| Pembayaran Pokok Utang | Rp 115 | Rp 378 | Rp 91 | Rp 138 | Rp 362 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | Rp - | Rp 1.084 | Rp - | Rp - | Rp 1.000 | |
| Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |

| APBD 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) | | | |
|---|------------------|-----------------|--|
| Uraian | Kab. Kulon Progo | Kota Yogyakarta | |
| Pendapatan | Rp 1.003.179 | Rp 1.309.580 | |
| PAD | Rp 95.992 | Rp 383.052 | |
| Pajak daerah | Rp 8.696 | Rp 227.749 | |
| Retribusi daerah | Rp 14.987 | Rp 40.339 | |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp 8.253 | Rp 12.596 | |
| Lain-lain PAD yang sah | Rp 64.056 | Rp 102.368 | |
| Pendapatan Transfer | Rp 886.199 | Rp 914.763 | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | Rp 681.455 | Rp 658.771 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | Rp 33.215 | Rp 52.704 | |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | Rp 367 | Rp 2.634 | |
| Dana Alokasi Umum | Rp 594.979 | Rp 597.212 | |
| Dana Alokasi Khusus | Rp 52.894 | Rp 6.221 | |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | Rp 163.769 | Rp 177.684 | |
| Dana Otonomi Khusus | Rp - | Rp - | |
| Dana Penyesuaian | Rp 163.769 | Rp 177.684 | |
| Transfer Pemerintah Provinsi | Rp 40.975 | Rp 78.308 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Rp 40.975 | Rp 78.308 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | Rp - | Rp - | |
| Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp 20.989 | Rp 11.765 | |
| Pendapatan Hibah | Rp 20.989 | Rp - | |
| Pendapatan Dana Darurat | Rp - | Rp - | |
| Pendapatan Lainnya | Rp - | Rp 11.765 | |
| Belanja | Rp 963.446 | Rp 1.232.912 | |
| Belanja Operasi | Rp 839.661 | Rp 1.065.813 | |
| Belanja Pegawai | Rp 650.493 | Rp 714.061 | |
| Belanja Barang | Rp 105.082 | Rp 308.922 | |
| Belanja Bunga | Rp 30 | Rp 75 | |
| Belanja Subsidi | Rp - | Rp - | |
| Belanja Hibah | Rp 38.152 | Rp 34.288 | |
| Belanja Bantuan sosial | Rp 14.057 | Rp 6.045 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | Rp 31.847 | Rp 2.421 | |
| Belanja Modal | Rp 123.314 | Rp 167.080 | |
| Tanah | Rp 6.609 | Rp 25.974 | |
| Peralatan dan Mesin | Rp 15.922 | Rp 42.075 | |
| Gedung dan Bangunan | Rp 26.221 | Rp 57.268 | |
| Jalan, irigasi dan jaringan | Rp 73.779 | Rp 39.085 | |
| Aset tetap lainnya | Rp 782 | Rp 2.024 | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp - | Rp - | |
| Aset lainnya | Rp - | Rp 654 | |
| Belanja tidak terduga | Rp 471 | Rp 19 | |
| Belanja tidak terduga | Rp 471 | Rp 19 | |
| Transfer | Rp 1.141 | Rp - | |
| Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa | Rp 733 | Rp - | |
| Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa | Rp 409 | Rp - | |
| Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp - | |
| Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa | Rp - | Rp - | |
| Belanja dan Transfer | Rp 964.588 | Rp 1.232.912 | |
| Pembangunan | Rp 62.881 | Rp 226.709 | |
| Penerimaan Pembangunan | Rp 68.613 | Rp 227.223 | |
| SiLPA TA sebelumnya | Rp 67.375 | Rp 224.522 | |
| Pencairan dana cadangan | Rp - | Rp - | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp - | Rp - | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | Rp - | Rp 2.698 | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp 1.239 | Rp 2 | |
| Pengeluaran Pembangunan | Rp 5.732 | Rp 514 | |
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp - | Rp - | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Rp 5.641 | Rp - | |
| Pembayaran Pokok Utang | Rp 91 | Rp 514 | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | Rp - | Rp - | |
| Pembayaran Kegiatan Lanjutan | Rp - | Rp - | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | Rp - | Rp - | |



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2013 DAN 31 Desember 2012

Audited

| URAIAN | CaLK | Anggaran TA 2013 (Rp) | | Realisasi TA 2013 (Rp) | (%) | Realisasi TA 2012 (Rp) |
|---|-------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| PENDAPATAN | 511 | 1.503.865.465.664,67 | | 1.520.302.695.802,31 | 101,09 | 1.337.570.725.382,56 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1. | 205.407.209.787,07 | 13,66% | 224.197.864.331,31 | 109,15 | 166.597.778.028,56 |
| Pajak Daerah | 1.a) | 64.487.000.000,00 | | 83.232.017.500,20 | 129,07 | 51.768.352.231,50 |
| Retribusi Daerah | 1.b) | 26.671.104.494,00 | | 27.116.286.436,00 | 101,67 | 20.595.098.751,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 1.c) | 9.508.075.667,00 | | 9.508.075.666,16 | 100,00 | 8.184.263.102,01 |
| Lain-lain PAD | 1.d) | 104.741.029.626,07 | | 104.341.484.728,95 | 99,62 | 86.050.063.944,05 |
| | | | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2 | 1.258.229.035.877,60 | 83,67% | 1.262.574.142.571,00 | 100,35 | 1.155.535.427.354,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana P | 2.a) | 938.968.131.005,00 | | 938.492.077.341,00 | 99,95 | 885.352.411.354,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 2.a).1) | 32.602.492.211,00 | | 31.655.243.100,00 | - | 49.864.791.011,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 2.a).2) | 4.358.124.794,00 | | 4.829.320.241,00 | 110,81 | 4.171.586.343,00 |
| Dana Alokasi Umum | 2.a).3) | 854.810.634.000,00 | | 854.810.634.000,00 | 100,00 | 768.034.584.000,00 |
| Dana Alokasi khusus | 2.a).4) | 47.196.880.000,00 | | 47.196.880.000,00 | 100,00 | 63.281.450.000,00 |
| | | | | | | |
| Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya | 2.b) | 246.782.676.000,00 | | 246.782.676.000,00 | 100,00 | 205.719.691.000,00 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khus | 2.b).1) | | | | | 0,00 |
| Dana Tunjangan Pendidikan | 2.b).2) | 246.782.676.000,00 | | 246.782.676.000,00 | 100,00 | 205.719.691.000,00 |
| lainnya | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| Transfer Pemerintah Propinsi | 2.c) | 72.478.228.872,60 | | 77.299.389.230,00 | 106,65 | 64.463.325.000,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 2.c).1) | 72.478.228.872,60 | | 77.299.389.230,00 | 106,65 | 64.463.325.000,00 |
| | | | | | | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SA | 3 | 40.229.220.000,00 | 0,77% | 33.530.688.900,00 | 83,35 | 15.437.520.000,00 |
| Pendapatan Hibah | 3.a) | 11.605.280.000,00 | | 4.931.948.900,00 | #DIV/0! | - |
| Pendapatan Dana Darurat | 3.b) | | | | - | |
| Pendapatan Lainnya | 3.c) | 28.623.940.000,00 | | 28.598.740.000,00 | 99,91 | 15.437.520.000,00 |
| | | | | | - | |
| BELANJA | 512 | 1.570.168.261.924,38 | | 1.387.719.170.740,07 | 88,38 | 1.282.878.383.296,48 |
| BELANJA OPERASI | 1 | 1.345.198.933.881,00 | 77,38% | 1.204.273.540.264,98 | 89,52 | 1.140.612.229.886,48 |
| Belanja Pegawai | 1.a) | 1.040.922.484.824,00 | | 947.096.405.053,00 | 90,99 | 894.160.129.295,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.b) | 222.764.890.857,00 | | 188.170.397.306,06 | 84,47 | 181.312.175.634,00 |
| Belanja Bunga | 1.c) | 51.506.900,00 | | 24.051.602,92 | 46,70 | 37.873.282,48 |
| Belanja Subsidi | 1.d) | | | | | |
| Belanja Hibah | 1.e) | 22.932.379.800,00 | | 19.101.477.840,00 | 83,29 | 14.952.495.000,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.f) | 18.003.050.000,00 | | 15.778.200.000,00 | 87,64 | 6.895.326.112,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 1.g) | 40.524.621.500,00 | | 34.103.008.463,00 | 84,15 | 43.254.230.563,00 |
| | | | | | | |
| BELANJA MODAL | 2 | 196.988.137.204,00 | 0,36% | 183.269.840.475,09 | 93,04 | 140.106.752.810,00 |
| Belanja Tanah | 2.a) | 4.892.652.400,00 | | 3.571.227.380,00 | 72,99 | 1.723.046.790,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 2.b) | 35.784.526.319,00 | | 28.204.936.652,00 | 78,82 | 30.384.563.920,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 2.c) | 41.415.647.503,00 | | 40.669.661.505,91 | 98,20 | 36.129.061.430,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan | 2.d) | 106.977.976.407,00 | | 103.788.960.292,18 | 97,02 | 63.581.718.620,00 |
| Belanja Aset tetap lainnya | 2.e) | 7.917.334.575,00 | | 7.035.054.645,00 | 88,86 | 8.288.362.050,00 |
| Belanja Aset lainnya | 2.f) | | | | | - |

| URAIAN | CaLK | Anggaran TA 2013 (Rp) | | Realisasi TA 2013 (Rp) | (%) | Realisasi TA 2012 (Rp) |
|--|------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| BELANJA TAK TERDUGA | 3 | 25.912.008.239,38 | 1,93% | 175.790.000,00 | 0,68 | 210.218.000,00 |
| Belanja Tak terduga | | 25.912.008.239,38 | | 175.790.000,00 | 0,68 | 210.218.000,00 |
| TRANSFER KE KAB/KOTA/DESA | 4 | 2.069.182.600,00 | 0,09% | 0,00 | - | 1.949.182.600,00 |
| Bagi Hasil Pajak | 4.a) | 1.201.463.600,00 | 72,22% | 0,00 | - | 1.201.463.600,00 |
| Bagi Hasil Retribusi | 4.b) | 867.719.000,00 | #REF! | 0,00 | - | 747.719.000,00 |
| Surplus Defisit | | (66.302.796.259,71) | | 132.583.525.062,24 | (199,97) | 54.692.342.086,08 |
| Pembiayaan | 513 | | | | | |
| PENERIMAAN DAERAH | 1 | 113.940.333.809,71 | | 110.873.724.177,71 | 97,31 | 62.686.562.399,89 |
| Penggunaan SILPA | | 104.107.673.809,71 | | 104.107.673.809,71 | 100,00 | 59.581.049.143,07 |
| Pencairan dana Cadangan | | | | | | |
| Penjualan Kekayaan daerah yang dispisahkan | | | | | | |
| Penerimaan Pinjaman daerah | | | | | | |
| Penerimaan pemberian Pinjaman | | | | | | |
| Penerimaan kembali dana bergulir | | 9.832.660.000,00 | | 6.766.050.368,00 | 68,81 | 3.105.513.256,82 |
| PENGELUARAN DAERAH | 2 | 47.637.537.550,00 | | 39.062.286.226,26 | 82,00 | 13.271.230.676,26 |
| Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | |
| Penyertaan (Investasi) Pemda | 2.a) | 37.074.500.000,00 | | 31.074.500.000,00 | 83,82 | 13.156.000.000,00 |
| Pembayaran Pokok Hutang | 2.b) | 181.037.550,00 | | 181.036.226,26 | 100,00 | 115.230.676,26 |
| Pemberian Pinjaman | 2.c) | 10.382.000.000,00 | | 7.806.750.000,00 | | |
| Pembiayaan Netto | | 66.302.796.259,71 | | 71.811.437.951,45 | 108,31 | 49.415.331.723,63 |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN | | 0,00 | | 204.394.963.013,69 | | 104.107.673.809,71 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SKPD : 1.20.05.03. - K P P D DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

Halaman : 1

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran | Realisasi | Lebih / Kurang (%) | |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Pendapatan | 59,235,060,000.00 | 63,621,375,290.00 | 4,386,315,290.00 | 107.00 |
| 4.1. | Pendapatan Asli Daerah | 59,235,060,000.00 | 63,621,375,290.00 | 4,386,315,290.00 | 107.00 |
| 4.1.1. | Pajak Daerah | 59,225,480,000.00 | 63,606,037,290.00 | 4,380,557,290.00 | 107.40 |
| 4.1.2. | Hasil Retribusi Daerah | 2,780,000.00 | 4,648,000.00 | 1,868,000.00 | 167.19 |
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 6,800,000.00 | 10,690,000.00 | 3,890,000.00 | 157.21 |
| | JUMLAH | 59,235,060,000.00 | 63,621,375,290.00 | 4,386,315,290.00 | |
| 5. | BELANJA | 3,857,086,116.00 | 3,363,086,205.00 | (493,999,911.00) | 87.00 |
| 5.1. | Belanja Tidak Langsung | 847,502,606.00 | 837,693,980.00 | (9,808,626.00) | 99.00 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 847,502,606.00 | 837,693,980.00 | (9,808,626.00) | 98.84 |
| 5.2. | Belanja Langsung | 3,009,583,510.00 | 2,525,392,225.00 | (484,191,285.00) | 84.00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 126,481,856.00 | 120,895,000.00 | (5,586,856.00) | 95.58 |
| 5.2.2. | Belanja Barang Dan Jasa | 1,303,261,640.00 | 998,565,625.00 | (304,696,015.00) | 76.62 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 1,579,840,014.00 | 1,405,931,600.00 | (173,908,414.00) | 88.99 |
| | JUMLAH | 3,857,086,116.00 | 3,363,086,205.00 | (493,999,911.00) | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | 55,377,973,884.00 | 60,258,289,085.00 | 4,880,315,201.00 | - |

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Kepala K P P D di Kabupaten Gunungkidul DIY

Drs. JOKO PRAKOSO
NIP.19571211 198503 1 013

LAMPIRAN I:
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 14 • 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2013
 (SETELAH KONVERSI)
 AUDITAN

(dalam rupiah)

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI 2013 | | REALISASI 2012 | KET. |
|-------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| | | | RP | % | | |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.768.438.488.349,11 | 1.899.525.636.838,83 | 107,41 | 1.589.722.974.409,13 | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 342.895.307.197,81 | 449.270.304.864,83 | 131,02 | 301.069.539.284,13 | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 223.900.000.000,00 | 274.628.955.500,77 | 122,86 | 177.835.870.150,47 | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 26.304.202.320,00 | 48.001.679.730,61 | 182,49 | 34.034.969.787,28 | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 14.355.000.000,00 | 15.551.529.372,17 | 108,34 | 12.783.121.935,56 | |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 78.336.104.877,81 | 111.088.140.261,29 | 141,81 | 76.415.577.410,82 | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 1.425.543.181.151,30 | 1.442.483.146.251,00 | 101,19 | 1.281.708.216.150,00 | |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 992.417.480.016,00 | 992.782.430.677,00 | 100,04 | 946.821.049.150,00 | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 47.223.707.347,00 | 46.908.099.802,00 | 99,33 | 95.851.408.966,00 | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | 0,00 | 346.339.971,00 | 0,00 | 345.477.415,00 | |
| 1.2.1.3 | Dana Bagi Hasil Cukai | 2.780.530.669,00 | 3.112.748.904,00 | 111,95 | 2.678.005.769,00 | |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Umum | 891.589.912.000,00 | 891.589.912.000,00 | 100,00 | 795.708.767.000,00 | |
| 1.2.1.5 | Dana Alokasi Khusus | 50.823.330.000,00 | 50.823.330.000,00 | 100,00 | 52.237.390.000,00 | |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 278.966.095.880,00 | 286.912.555.070,00 | 102,85 | 208.486.544.000,00 | |
| 1.2.2.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat | 246.870.770.880,00 | 254.817.230.070,00 | 103,22 | 208.486.544.000,00 | |
| 1.2.2.2 | Dana Insentif Khusus | 32.095.325.000,00 | 32.095.325.000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | 154.159.605.255,30 | 162.788.160.504,00 | 105,60 | 126.400.623.000,00 | |
| 1.2.3.1 | Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya | 125.109.605.255,30 | 134.451.960.504,00 | 107,47 | 112.500.623.000,00 | |
| 1.2.3.2 | Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya | 29.050.000.000,00 | 28.336.200.000,00 | 97,54 | 13.900.000.000,00 | |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0,00 | 7.772.185.723,00 | | 6.945.218.975,00 | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 1.016.000.000,00 | 0,00 | 6.945.218.975,00 | |
| 1.3.2 | Pendapatan dari piutang PBB-P2 yg belum diserahterimakan | 0,00 | 6.756.185.723,00 | 0,00 | 6.756.185.723,00 | |
| 2 | BELANJA | 1.946.380.363.064,13 | 1.693.528.297.005,79 | 87,01 | 1.421.401.170.875,33 | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 1.604.540.910.957,21 | 1.420.339.683.204,62 | 88,52 | 1.241.689.260.072,05 | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai/Personalia | 1.161.524.368.836,40 | 1.034.255.811.435,98 | 89,04 | 979.253.621.029,36 | |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 250.125.006.794,81 | 227.028.261.886,61 | 90,77 | 203.244.891.404,66 | |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 144.000.000,00 | 28.750.905,83 | 19,97 | 45.273.123,03 | |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 34.745.931.658,00 | 19.518.562.420,00 | 56,18 | 0,00 | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 129.419.872.168,00 | 117.707.233.556,20 | 90,95 | 45.170.865.015,00 | |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 28.581.731.500,00 | 21.801.063.000,00 | 76,28 | 13.974.609.500,00 | |
| 2.3 | BELANJA MODAL | 260.990.406.145,00 | 206.859.865.136,17 | 79,26 | 132.536.252.044,00 | |
| 2.3.1 | Belanja Tanah | 58.597.146.055,00 | 37.115.234.370,00 | 63,34 | 10.616.365.435,00 | |
| 2.3.4 | Belanja Peralatan dan Mesin | 52.095.617.295,00 | 45.628.593.658,40 | 87,59 | 33.358.242.745,00 | |
| 2.3.2 | Belanja Gedung dan Bangunan | 86.406.447.175,00 | 73.350.676.738,77 | 84,89 | 40.382.726.115,00 | |
| 2.3.3 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 54.599.042.470,00 | 49.490.108.162,00 | 90,64 | 46.566.932.866,00 | |
| 2.3.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 9.292.153.150,00 | 1.275.252.207,00 | 13,72 | 1.611.984.883,00 | |
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 12.395.768.134,93 | 0,00 | 0,00 | 1.193.672.563,00 | |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 12.395.768.134,93 | 0,00 | 0,00 | 1.193.672.563,00 | |
| 2.4 | TRANSFER | 68.453.277.826,99 | 66.328.748.665,00 | 96,90 | 45.981.986.196,28 | |
| 2.4.1 | Transfer bagi Hasil ke Desa | 68.453.277.826,99 | 66.328.748.665,00 | 96,90 | 45.981.986.196,28 | |
| 2.4.1.1 | Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemdes | 33.879.052.826,99 | 33.366.158.150,00 | 98,49 | 23.824.947.196,28 | |
| 2.4.1.2 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemdes | 34.574.225.000,00 | 32.962.590.515,00 | 95,34 | 22.157.039.000,00 | |
| | Surplus/(Defisit) | (177.941.874.715,02) | 205.997.339.833,04 | (115,77) | 168.321.803.533,80 | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya | 289.079.874.715,02 | 289.079.874.715,22 | 100,00 | 138.694.508.682,82 | |
| | Jumlah | 289.079.874.715,02 | 289.079.874.715,22 | 100,00 | 138.694.508.682,82 | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal | 111.000.000.000,00 | 63.580.000.000,00 | 57,28 | 17.798.692.573,00 | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 138.000.000,00 | 137.744.928,40 | 99,82 | 137.744.928,40 | |
| | Jumlah | 111.138.000.000,00 | 63.717.744.928,40 | 57,33 | 17.938.437.501,40 | |
| | Pembayaran Netto | 177.941.874.715,02 | 225.362.129.766,82 | 126,66 | 120.758.071.181,42 | |
| | SILPA | 0,00 | 431.359.469.619,86 | | 289.079.874.715,22 | |

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO